



LAPORAN PENELITIAN

**SINKRONISASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
MAKASSAR CREATIVE HUB**

**TAHUN
2025**

Disusun oleh Tim Peneliti :

Politeknik STIA LAN Makassar
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Makassar



politeknik.stialanmakassar.ac.id

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
MAKASSAR *CREATIVE HUB***



Oleh :

Dr. Muh. Idris DP, M.Si.

Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si.

Dr. Erni Cahyani Ibrahim, SE., Ak., M.Si.

Dr. Wahyu Nurdiansyah N., M.Si.

Arif Alauddin Umar, S.IP., [M.Si.](#)

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BEKERJA SAMA DENGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR**

2025

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Makassar *Creative Hub*” ini tepat waktu sesuai yang telah direncanakan. Tidak Lupa Salam dan Shalawat atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Suri Teladan umat manusia hingga akhir zaman, Nabi Terakhir, yang tiada lagi nabi setelahnya.

Banyak tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak, maka laporan penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya. Peneliti telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikannya. Sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca maka penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Munafri Arifuddin, SH., selaku Walikota Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE., MAP., selaku Wakil Walikota Makassar beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak H. Haidil Adha, S.Sos., MM., selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar beserta staf dan jajarannya.
4. Bapak Dr. Sulaeman Fattah, M.Si., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Makassar
5. Kepala Kantor Kecamatan (Camat) se Kota Makassar beserta staf dan jajarannya.
6. Kepala Kantor Kelurahan (Lurah) se Kota Makassar beserta staf dan jajarannya.
7. Komunitas Kreatif se Kota Makassar
8. Komunitas Pelaku UMKM se Kota Makassar
9. Komunitas Pemuda dan OKP se Kota Makassar
10. Pelaku UMKM/Industri Kreatif se Kota Makassar
11. Kelompok Rentan/Disabilitas se Kota Makassar

12. Serta Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti dalam penelitian ini.

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Kota Makassar pada khususnya. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, *Wassalamu Alaiykum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Desember 2025

Tim Peneliti

INTISARI

Pemkot Makassar jika ingin mewujudkan program MCH di 15 kecamatan yang ada akan menghadapi berbagai tantangan, mengingat setiap kecamatan memiliki potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Tantangan lainnya datang dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan/mengelola MCH. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi/pemetaan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap kecamatan sebagai basis data pembangunan *creative hub*. Kedua, melakukan sinkronisasi kebijakan diantara stakeholder *creative hub* di setiap kecamatan lingkup Kota Makassar. Ketiga, Menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam bentuk *policy brief* kepada Pemkot Makassar melalui Dinas PU, guna membantu merumuskan prioritas pembangunan/pengembangan *creative hub* yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di masing-masing Kecamatan dalam lingkup Kota Makassar

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif yang menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif. implementasikan strategi sinkronisasi kebijakan pembangunan *creative hub* Kota Makassar didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada kebutuhan penelitian yang ingin mendapatkan data yang valid, reliabel, objektif, dan komprehensif mengenai potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap kecamatan di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih juga karena dapat mengakomodir fleksibilitas yang sangat mungkin dijumpai di lapangan, dalam hal ini keragaman data dan informasi, keunikan komunitas kreatif di setiap wilayah, dan prioritas stakeholder program *creative hub* yang lintas sektor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Makassar Creative Hub (MCH) merupakan program strategis Pemkot Makassar yang dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan, mengurangi pengangguran, dan memperkuat sektor ekonomi kreatif masyarakat, terutama generasi muda. Program ini sejalan dengan visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” serta sinkron dengan arah pembangunan nasional. Setiap kecamatan memiliki kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang berbeda, sehingga pembangunan *creative hub* perlu berbasis pada data lokal. Misalnya, wilayah pesisir membutuhkan pelatihan berbasis kelautan, sementara wilayah padat UMKM membutuhkan dukungan pemasaran dan sertifikasi. Pembangunan MCH membutuhkan kolaborasi lintas OPD, mulai dari Dinas PU sebagai penyedia ruang fisik, Dinas Pariwisata sebagai leading sector, hingga OPD lain seperti Dispora, Diskominfo, Dinas Koperasi-UKM, dan Dinas Ketenagakerjaan yang berperan dalam pelatihan, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sinkronisasi kebijakan menjadi syarat penting keberhasilan program. Ekonomi kreatif Makassar memiliki potensi besar, dengan lebih dari 37.000 pelaku industri kreatif dan dominasi sektor kuliner, fashion, dan kriya. Keberadaan MCH menjadi katalisator untuk mengoptimalkan potensi ini. Makassar Creative hub memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan, seperti membuka peluang kerja, memperkuat komunitas, menyediakan ruang kolaboratif, serta mendorong inovasi dan lahirnya usaha baru. Dampak ini relevan dengan tantangan kota, khususnya tingginya jumlah penduduk berpendidikan menengah ke bawah dan anak putus sekolah.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Kebijakan, Makassar Creative Hub

ABSTRACT

The Makassar City Government will face various challenges if it wants to implement the MCH program in 15 sub-districts, considering that each sub-district has different potentials, needs, and problems. Another challenge comes from a number of regional apparatus organizations (OPD) that are expected to contribute to the realization/management of MCH. This study aims to identify/map the potential, needs, and problems in each sub-district as a database for creative hub development. Second, to synchronize policies among creative hub stakeholders in each sub-district within the scope of Makassar City. Third, to produce policy recommendations in the form of policy briefs to the Makassar City Government through the Public Works Agency, in order to help formulate development priorities for creative hubs in accordance with the potential, needs, and problems in each sub-district within the city of Makassar.

This research is descriptive in nature and uses a qualitative research approach. The implementation of the Makassar City creative hub development policy synchronization strategy is designed using a qualitative approach. This is based on the research need to obtain valid, reliable, objective, and comprehensive data on the potential, needs, and problems in each sub-district in Makassar City. This approach was also chosen because it can accommodate the flexibility that is very likely to be encountered in the field, in this case the diversity of data and information, the uniqueness of the creative community in each region, and the priorities of stakeholders in the creative hub program across sectors.

The results of the study show that the Makassar Creative Hub (MCH) is a strategic program of the Makassar City Government designed as a solution to improve skills, reduce unemployment, and strengthen the creative economy sector of the community, especially the younger generation. This program is in line with the vision of “Excellent, Inclusive, Safe, and Sustainable Makassar” and is synchronized with the direction of national development. Each sub-district has different needs, potentials, and problems, so the development of creative hubs needs to be based on local data. For example, coastal areas need marine-based training, while areas with a high concentration of MSMEs need marketing and certification support. The development of MCH requires collaboration across OPDs, starting from the Public Works Agency as the provider of physical space, the Tourism Agency as the leading sector, to other OPDs such as the Manpower Agency, which play a role in training, digitization, and community empowerment. Policy synchronization is an important requirement for the success of the program. Makassar’s creative economy has great potential, with more than 37,000 creative industry players and a dominance of the culinary, fashion, and craft sectors. The existence of MCH is a catalyst for optimizing this potential. The Makassar Creative Hub has a significant socio-economic impact, such as creating job opportunities, strengthening communities, providing collaborative spaces, and encouraging innovation and the emergence of new businesses. This impact is relevant to the challenges facing the city, particularly the high number of people with lower-middle education and school dropouts.

Keywords: Synchronization, Policy, Makassar Creative Hub

DAFTAR ISI

Halaman Judul	0
Kata Pengantar	i
Intisari	iii
Abstract	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pernyataan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Batasan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Tinjauan Konsep Sinkronisasi Kebijakan	8
2.1.2. Tinjauan tentang Program Makassar <i>Creative Hub</i>	9
2.1.3. Hubungan <i>Creative Hub</i> dengan Bidang Pekerjaan Umum	15
2.1.4. Strategi Sinkronisasi kebijakan dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan <i>Creative Hub</i> di Kota Makassar	17
2.2. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian	22
3.2. Sumber Data	22
3.3. Teknik Pengumpulan Data	22
3.4. Teknik Analisis Data	23
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1. Hasil Analisis Data dan Pembahasan	25
4.1.1. Deskripsi Umum Kota Makassar	25
4.1.2. Deskripsi Umum Makassar <i>Creative Hub</i>	25
4.1.3. Deskripsi Analisis Data dan Pembahasan	34
1. Kecamatan Wajo	35
2. Kecamatan Sangkarrang	38

3. Kecamatan Ujung Tanah	42
4. Kecamatan Ujung Pandang	45
5. Kecamatan Makassar	48
6. Kecamatan Tallo	51
7. Kecamatan Bontoala	53
8. Kecamatan Rappocini	56
9. Kecamatan Manggala	59
10. Kecamatan Tamalanrea	61
11. Kecamatan Biringkanaya	65
12. Kecamatan Panakkukang	68
13. Kecamatan Mamajang	71
14. Kecamatan Tamalate	74
15. Kecamatan Mariso	77
4.1.4. Pembahasan Sinkronisasi Kebijakan Makassar <i>Creative Hub</i>	79
4.2. Implikasi Penelitian Sinkronisasi Kebijakan Makassar <i>Creative Hub</i>	83
4.2.1. Aspek Skema Kolaborasi	84
1. Kecamatan Wajo	84
2. Kecamatan Sangkarrang	85
3. Kecamatan Ujung Tanah	86
4. Kecamatan Ujung Pandang	87
5. Kecamatan Makassar	88
6. Kecamatan Tallo	89
7. Kecamatan Bontoala	90
8. Kecamatan Rappocini	91
9. Kecamatan Manggala	92
10. Kecamatan Tamalanrea	93
11. Kecamatan Biringkanaya	94
12. Kecamatan Panakkukang	95
13. Kecamatan Mamajang	96
14. Kecamatan Tamalate	97
15. Kecamatan Mariso	98
4.2.2. Aspek Kategorisasi <i>Creative Hub</i>	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Rekomendasi	104
Daftar Pustaka	106
LAMPIRAN	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Alur Sinkronisasi Kebijakan	17
Gambar 2 Strategi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan <i>Creative Hub</i> di Kota Makassar	18
Gambar 3 Peta Administrasi Kota Makassar	25
Gambar 4 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Wajo berdasarkan Skema Kolaborasi	84
Gambar 5 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Kep. Sangkarrang berdasarkan Skema Kolaborasi	85
Gambar 6 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Ujung Tanah berdasarkan Skema Kolaborasi	86
Gambar 7 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Ujung Pandang berdasarkan Skema Kolaborasi	87
Gambar 8 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Makassar berdasarkan Skema Kolaborasi	88
Gambar 9 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Tallo berdasarkan Skema Kolaborasi	89
Gambar 10 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Bontoala berdasarkan Skema Kolaborasi	90
Gambar 11 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Rappocini berdasarkan Skema Kolaborasi	91
Gambar 12 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Manggala berdasarkan Skema Kolaborasi	92
Gambar 13 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Tamalanrea berdasarkan Skema Kolaborasi	93
Gambar 14 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Biringkanaya berdasarkan Skema Kolaborasi	94
Gambar 15 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Panakkukang berdasarkan Skema Kolaborasi	95
Gambar 16 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Mamajang berdasarkan Skema Kolaborasi	96

Gambar 17 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Tamalate berdasarkan Skema Kolaborasi	97
Gambar 18 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan Mariso berdasarkan Skema Kolaborasi	98
Gambar 19 <i>Mapping Creative Hub</i> Kecamatan berdasarkan Skema Kolaborasi	99
Gambar 20 <i>Mapping Creative Space</i> berdasarkan Kategorisasi	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas dan Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2023	26
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2023	28
Tabel 3 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Wajo.....	35
Tabel 4 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Kep. Sangkarrang	39
Tabel 5 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Ujung Tanah.....	42
Tabel 6 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Ujung Pandang.....	45
Tabel 7 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Makassar.....	49
Tabel 8 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Tallo.....	51
Tabel 9 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Bontoala.....	54
Tabel 10 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Rappocini	57
Tabel 11 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Manggala.....	60
Tabel 12 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Tamalanrea.....	63
Tabel 13 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Biringkanaya.....	66
Tabel 14 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Panakkukang.....	69
Tabel 15 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Mamajang.....	71

Tabel 16 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Tamalate.....	75
Tabel 17 Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Mariso.....	78
Tabel 18 Kategorisasi <i>Creative Hub</i> di Setiap Kecamatan berdasarkan Skala Prioritas.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Tahun 2045, Indonesia dalam sektor ekonomi digadang-gadang akan menjadi negara dengan PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar urutan ke 4 (hanya di bawah Amerika Serikat, India, China). PDB sendiri adalah nilai atau value dari barang dan juga jasa yang diproduksi dalam sebuah negara pada periode tertentu, diproduksi baik oleh perusahaan yang dimiliki penduduk negara tersebut, maupun penduduk asing yang beroperasi di negara tersebut (Latumaerissa dalam Larasati, 2018). Dalam poin peningkatan ekonomi tersebut, terdapat kata kunci “Ekonomi Kreatif” dengan mewujudkan Indonesia Menjadi Pusat dari Ekonomi Kreatif dan Digital Internasional dengan cara meningkatkan SDM yang kreatif, penyediaan fasilitas untuk berinovasi, dan juga pengembangan start-up dengan kualitas internasional, pengembangan industri kreatif yang berorientasi pada ekspor, juga penguatan 10 Kota/Kluster kreatif & digital skala internasional. Program pelaksanaan ini dapat direalisasikan melalui rancangan “*Creative Hub*”.

Creative space merupakan istilah yang baru saja terdengar dalam ranah fungsi ruang. Namun, jika ditinjau dari segi historis, *creative space* sendiri sebenarnya merupakan sebuah ruang bagi penggunaannya untuk melakukan sesuatu dan bereksperimen, guna menghasilkan sesuatu. Ruang ini dapat berupa setting furniture, layout ruang maupun secara arsitektur, yang tidak terdefinisi secara baku, dan mampu mengembangkan lingkungan kreatif dan bisnis yang mendukung kreativitas dan inovasi (Thoring, 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat setting khusus untuk *Creative space*, selama pengguna dapat terwadahi untuk berkumpul, berdiskusi dan menghasilkan gagasan dan ide maupun karya kreatif dan inovatif. Jika *Creative Space* identik dengan setting ruang yang digunakan untuk melakukan aktivitas kreatif, maka sebuah pusat atau kumpulan dari setting aktivitas *Creative Space* juga dikenal dengan istilah *Creative Hub*.

Adanya geliat kreatif yang dihasilkan pengguna *Creative Space*, tentunya akan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dari pelakunya dalam membuat barang ataupun jasa, yang kemudian menghasilkan bisnis dan membentuk sektor ekonomi,

sektor ekonomi inilah yang dikenal sebagai ekonomi kreatif (Hasan, 2018). Ekonomi Kreatif saat ini berada di bawah naungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF). Dalam kurun waktu 10 tahun (2010-2020), nilai PDB yang disumbangkan oleh sektor ekonomi kreatif terus meningkat secara signifikan mencapai hingga Rp 1.200 Triliun dalam setahun.

Pemerintahan Kota (Pemkot) Makassar selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah secara inheren mengusung visi, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, yang diturunkan ke dalam 7 misi, diantaranya meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja. Pada dasarnya, visi dan misi Pemkot Makassar ini selain dibangun untuk kepentingan realisasi janji politik Walikota dan Wakil Walikota terpilih, juga dibangun guna penyelarasan kebijakan, dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sekaligus sebagai upaya nyata dalam mendukung Asta Cita pemerintahan nasional saat ini. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat sinkronisasi dalam hal arah penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah, khususnya dalam lingkup Pemerintahan Kota Makassar (Bappeda Kota Makassar, 2025).

Program prioritas Pemkot Makassar yang signifikan dalam rangka sinkronisasi arah pembangunan dengan pemerintahan pusat, yakni program Makassar *Creative Hub* (MCH). Program ini secara inheren merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem kreatif di Kota Makassar, yang menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Program ini menjadi menarik untuk dikaji tidak saja karena program ini secara langsung bersinergi dengan program prioritas pemerintahan pusat sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi juga karena program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan di Kota Makassar khususnya terkait dengan bidang ketenagakerjaan/SDM, dalam hal ini diproyeksikan dapat menekan angka pengangguran sekaligus kemiskinan di Kota Makassar melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja dengan memberikan pelatihan yang berbasis kebutuhan industri, sehingga masyarakat tidak hanya dibekali keahlian, tetapi juga diberikan peluang untuk bekerja sektor formal, membuka usaha atau bahkan berkarier di luar negeri (makassarkota.go.id, 2025). Selain itu, program ini turut mendapatkan

pengakuan dari sejumlah lembaga pemerintahan, salah satunya Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, dalam hal ini dari berbagai kepala daerah di 10 provinsi yang menjadi wilayah kerja BBPVP Makassar, Kota Makassar memiliki program yang paling menonjol berkat kebijakan strategisnya dalam bidang ketenagakerjaan, yakni *creative hub*, karena membekali masyarakat dengan keterampilan dan membuka peluang kerja yang lebih luas (penaonline.id, 2025).

Program MCH ini kian memiliki signifikansi dan urgensi, bila melihat statistik sosial kemasyarakatan Kota Makassar. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Kota Makassar sebesar 4,58%, pada tahun 2023 sebesar 5,07%, dan 4,97% pada tahun 2024. Kondisi fluktuatif yang terjadi dalam dimensi kemiskinan masyarakat ini mengakibatkan perlunya program yang efektif dalam menekan angka kemiskinan, seperti yang dicanangkan program Makassar Creative Hub. Selain itu, di satu sisi indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Makassar memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni sebesar 84,00 pada tahun 2021, pada tahun 2022 sebesar 84,45, pada tahun 2023 sebesar 84,85, dan pada tahun 2024 sebesar 85,23; yang juga sejalan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dalam hal ini sebesar 62,04 pada tahun 2024 dengan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dalam hal ini sebesar 9,71 pada tahun 2024. Namun, dibalik peningkatan statistik yang ada atas IPM dan TPAK, justru hanya terdapat sebesar 26,84% tenaga kerja di Kota Makassar yang berada pada jenjang pendidikan tinggi, sementara sisanya sebesar 73,16% berada pada jenjang pendidikan menengah ke bawah (BPS, 2025). Statistik lain juga menunjukkan adanya tantangan dari segi SDM, yakni anak-anak yang putus sekolah dan tidak sekolah mencapai ribuan orang. Pada bulan Juli 2023 terdapat 3.295 anak putus sekolah dan tidak sekolah di Kota Makassar (makassarpena.com, 2024). Dari statistik ini dapat dipahami bahwa permasalahan utama dalam dimensi sosial kemasyarakatan di Kota Makassar terletak pada kualitas tenaga kerja yang pada gilirannya berkontribusi pada angka kemiskinan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2023, bahwa persoalan pengangguran di kota Makassar dipicu dari ketidaksesuaian antara jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Seiring dengan kemajuan industri di kota Makassar, maka dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi

dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan (Investor.id, 2024). Hal ini pun pada dasarnya diakui Walikota Makassar, bahwa permasalahan utama sehubungan dengan tenaga kerja di Makassar bukanlah minimnya lapangan kerja, melainkan rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal dan rendahnya kemampuan berbahasa asing bagi tenaga kerja migran. Jika statistik dan uraian di atas dijadikan dasar, maka Program MCH memiliki signifikansi dan urgensi untuk dikaji, karena secara inheren program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus menekan angka kemiskinan melalui sektor ekonomi kreatif. Bahkan dinyatakan pula bahwa program ini sejak diluncurkan telah mendapat respons luar biasa dari masyarakat, yang dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mendaftarkan dirinya untuk sejumlah pelatihan dalam program tersebut (makassarkota.go.id, 2025). Hal ini turut pula disadari Pemkot Makassar ketika menyusun rancangan teknokratik RPJMD Kota Makassar 2025-2029, yang kemudian menuangkannya dalam kajian permasalahan dan isu strategis Kota Makassar (Bappeda Kota Makassar, 2025).

Pogram MCH bila ditelaah bukanlah hal yang sederhana dalam konteks Kota Makassar, mengingat melalui program ini, Pemkot Makassar ingin membangun MCH sebagai wadah kreativitas, pengembangan skill, dan *co-working space* di setiap kecamatan. Sedikit berbeda dengan konsep pembangunan/pengembangan *creative hub* pada umumnya, dalam hal ini *creative hub* baik jenisnya berupa *creative space*, *co-working space*, ataupun *makerspace* biasanya diinisiasi dan dikelola oleh komunitas kreatif atau sektor privat/industri. Namun dalam konteks Kota Makassar, Pemkot Makassar ingin terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan/pengembangan *creative hub* tersebut. Selain itu, Pemkot Makassar juga memberikan penekanan pada pengembangan skill masyarakat untuk kebutuhan pasar kerja/industri, sehingga dalam konteks ini Pemkot Makassar tidak sekedar memfasilitasi *creative hub* dalam perspektif wadah/ruang aktivitas kreatif tetapi juga ingin berkontribusi secara aktif dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat, khususnya anak muda Makassar secara langsung melalui peningkatan kapasitas/kompetensi/keterampilan.

Kota Makassar sendiri menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat lebih dari 140 kelompok komunitas kreatif yang aktif di 15 kecamatan di kota Makassar belum termasuk kelompok-kelompok komunitas kreatif yang lahir di kampus-kampus,

jumlahnya juga sangat signifikan dan jumlah yang besar tersebut aktif menggelar kegiatan dalam sektor sosial, ekonomi dan budaya secara rutin. Serta yang menarik, kelompok-kelompok kreatif tersebut berjalan bergandengan tangan menjunjung semangat kolaboratif untuk saling membesarkan satu sama lain. Industri kreatif di Makassar dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik Lembaga Kementerian Ekonomi Kreatif/BEKRAF (Badan Ekonomi kreatif) yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaku industri kreatif di Kota Makassar berjumlah kurang lebih 37.375 yang bergerak di berbagai sektor (Data Statistik BPS) yang subsektor terbesarnya bergerak di subsektor kuliner sebanyak 24.490 usaha kreatif, subsektor fashion 7.952 usaha kreatif, subsektor kriya dengan 3.189 usaha kreatif, subsektor penerbitan dengan 849 usaha kreatif dan subsektor fotografi dengan 287 usaha kreatif. Makassar juga termasuk 10 teratas dalam hal ekspor ekonomi kreatif di sektor kriya ke berbagai negara (Data Statistik BEKRAF). Hal ini sangat potensial untuk pengembangan industri kreatif di Makassar (Kurniawan, dkk. 2023)

Mencermati hal tersebut, menjadi suatu tantangan bagi Pemkot Makassar jika ingin mewujudkan program MCH di 15 kecamatan yang ada, mengingat setiap kecamatan memiliki potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Tantangan lainnya datang dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan/mengelola MCH, diantara Dinas Pariwisata selaku *leading stakeholder*, yang bertanggung jawab atas operasional, strategi, dan kemitraan dengan Kemenparekraf dan badan kreatif nasional; Dinas Pemuda dan Olahraga, bersama Dinas Kebudayaan, mendorong aktivasi komunitas pemuda di 15 kecamatan dan pulau, serta memfasilitasi inkubasi program dan hibah; Dinas Koperasi dan UKM menjadi penggerak inkubasi UMKM berbasis ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, dan produk digital; Dinas Komunikasi dan Informatika memastikan infrastruktur digital, media kreatif, dan teknologi penunjang di seluruh wilayah aktivitas MCH; Dinas Ketenagakerjaan menggelar pelatihan dan sertifikasi SDM subsektor ekonomi kreatif, serta membuka koneksi ke sektor kerja swasta; serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) bertanggungjawab untuk membangun wadah/menyediakan ruang fisik yang menjadi tempat penyaluran berbagai aktivitas kreatif dan peningkatan kapasitas/keterampilan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan tidak saja kolaborasi

yang apik diantara stakeholder program yang ada tetapi juga sinkronisasi kebijakan dalam membangun *creative hub* di Kota Makassar, sehingga MCH hadir bukan hanya sebagai fasilitas fisik, tetapi sebagai ekosistem kreatif yang menjembatani anak muda, komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah melalui pendekatan yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat umum (rri.co.id, 2025). Dengan demikian, MCH secara sederhana dapat dimaknai sebagai pusat kreatif, yakni ruang, baik fisik maupun virtual, yang mempertemukan individu-individu kreatif untuk mendorong jaringan, pengembangan bisnis, dan keterlibatan komunitas dalam sektor kreatif, budaya, dan teknologi (Boswinkel et.al, 2023).

Politeknik STIA LAN Makassar selaku mitra kolaborasi Pemkot Makassar berinisiatif untuk memfasilitasi Pemkot Makassar, khususnya Dinas PU melalui kajian yang objektif, terukur, dan sistematis dalam beberapa hal. Pertama, mengidentifikasi/memetakan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap kecamatan lingkup Kota Makassar sebagai basis data pembangunan *creative hub*. Kedua, mengupayakan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pembangunan *creative hub* di seluruh kecamatan lingkup Kota Makassar, sehingga setiap institusi/lembaga, baik pemerintahan, swasta, maupun kemasyarakatan dapat berpartisipasi/berkontribusi dan bahkan berkolaborasi dalam arah dan spirit yang sama/sejalan guna membangun dan mengembangkan *creative hub* sebagaimana yang dicita-citakan Pemkot Makassar.

1.2. Pernyataan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan pada permasalahan utama yakni bagaimana membangun *creative hub* yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan permasalahan di setiap kecamatan dalam lingkup Kota Makassar dan Bagaimana Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan *creative hub* di Kota Makassar.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, melakukan identifikasi/pemetaan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap kecamatan sebagai basis data pembangunan *creative hub*. Kedua, melakukan sinkronisasi kebijakan diantara stakeholder *creative hub* di setiap

kecamatan lingkup Kota Makassar. Ketiga, Menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam bentuk *policy brief* kepada Pemkot Makassar melalui Dinas PU, guna membantu merumuskan prioritas pembangunan/pengembangan *creative hub* yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di masing-masing Kecamatan dalam lingkup Kota Makassar

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian/riset ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan program MCH Kota Makassar dalam 2 hal. Pertama, menghasilkan kajian/telaah akademik terkait potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap kecamatan lingkup Kota Makassar yang perlu dijumpai melalui wadah *creative hub*, sehingga Pemkot Makassar khususnya Dinas PU memiliki basis data yang memadai dalam menentukan jenis/model *creative hub* yang perlu dibangun di setiap kecamatan. Kedua, membantu Pemkot Makassar dalam melakukan sinkronisasi kebijakan diantara stakeholder *creative hub*, sehingga terwujud kesatuan arah/visi pembangunan *creative hub* di setiap kecamatan. Selain itu, penelitian/riset ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan, baik akademik maupun praktis bagi akademisi/praktisi pemerintahan dalam merancang/membangun *creative hub* di daerah lainnya.

1.5 Batasan Penelitian

Disadari bahwa penelitian/riset ini memiliki limitasi tertentu, terutama hanya berfokus pada tahap awal pembentukan/pembangunan *creative hub* di setiap kecamatan. Riset lanjutan tentunya dibutuhkan guna mengoptimalkan pemanfaatan *creative hub* sebagai wadah kreatifitas publik sekaligus wadah peningkatan kapasitas/keterampilan kemasyarakatan. Selain itu, penelitian lanjutan juga diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program ini, sehingga program MCH dapat terus memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas hidup kemasyarakatan khususnya anak muda di Kota Makassar sekaligus memastikan keberlanjutan program ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan Konsep Sinkronisasi Kebijakan

Sistem pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi, kebijakan publik tidak hanya ditetapkan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah. Kondisi ini sering menimbulkan potensi tumpang tindih kebijakan, perbedaan prioritas pembangunan, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme sinkronisasi kebijakan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua tingkatan berjalan selaras, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menurut Dunn (2018), salah satu prinsip utama keberhasilan kebijakan publik adalah integrasi kebijakan antar level dan antar sektor, sehingga setiap program dapat saling memperkuat dan menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan nasional maupun daerah. Sinkronisasi kebijakan juga merupakan bagian penting dari *good governance* yang menekankan kolaborasi, koordinasi, dan koherensi antar aktor (Birkland, 2019).

Sinkronisasi kebijakan secara inheren merupakan proses penyelarasan substansi, arah, strategi, dan pelaksanaan kebijakan publik antara berbagai tingkatan pemerintahan dan lintas sektor agar tidak saling bertentangan, saling mendukung, dan memperkuat efektivitas pembangunan. Sinkronisasi kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMN, RPJMD, dan Renstra perangkat daerah, atau dengan kata lain, sinkronisasi kebijakan merupakan upaya mewujudkan keselarasan dan keserasian arah pembangunan nasional dan daerah melalui proses perencanaan, koordinasi, dan evaluasi yang terpadu.

Secara umum, sinkronisasi kebijakan bertujuan untuk: a). menyatukan arah, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional dan daerah; b). menghindari duplikasi dan tumpang tindih program; c). menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; d). memperkuat koordinasi antar lembaga dan sektor pemerintahan; e). memastikan pelaksanaan kebijakan nasional secara konsisten di tingkat daerah; serta f). menjamin keberlanjutan program lintas periode pemerintahan (Birkland, 2019; Howlett et.al, 2020).

Dari berbagai hasil telaah literatur ditemukan bahwa sinkronisasi kebijakan memiliki sejumlah prinsip. Pertama konsistensi, yang dapat dipahami sebagai keselarasan arah kebijakan pusat dan daerah dengan prioritas pembangunan nasional (Dunn, 2018). Kedua koherensi, yang dapat dipahami sebagai tidak adanya pertentangan antar kebijakan sektor dan level pemerintahan (Birkland, 2019). Ketiga keterpaduan, yang dalam praktiknya setiap program lintas sektor saling mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan (Howlett et.al, 2020). Keempat kolaborasi, yang dapat dilihat dari koordinasi aktif antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Kelima adaptabilitas, yang dapat dimaknai sebagai penyesuaian implementasi kebijakan nasional terhadap konteks dan kondisi lokal. Selain itu, sinkronisasi kebijakan dapat dilakukan dalam sejumlah bentuk/model. Pertama sinkronisasi vertikal, yang pada umumnya berupa penyelarasan antara kebijakan nasional (pusat) dan kebijakan daerah (provinsi, kabupaten/kota). Kedua sinkronisasi horizontal, yang pada umumnya berupa penyelarasan antara kebijakan sektor/lembaga pada level yang sama. Ketiga sinkronisasi temporal (waktu), yang pada umumnya berupa penyelarasan antara rencana jangka pendek, menengah, dan panjang (Howlett et.al, 2020).

Berdasarkan tinjauan singkat di atas, sinkronisasi kebijakan dalam penelitian ini diarahkan pada dua hal. Pertama, sinkronisasi antara kebijakan/program strategis Pemkot Makassar, dalam hal ini program MCH dengan stakeholder terkait, terutama yang berada di lingkup kecamatan sebagai target utama/sasaran program, sehingga tercipta harmonisasi dalam kesatuan arah dan tujuan implementasi program. Kedua, sinkronisasi antara sesama stakeholder level kecamatan dalam memetakan potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang ada di setiap kecamatan, yang memberi data/informasi signifikan sebagai basis pembentukan *creative hub* di setiap kecamatan. Jika hal ini berjalan sebagaimana yang direncanakan, maka tugas Dinas PU selaku *person in charge* (PIC) dalam membangun *creative hub* di setiap kecamatan akan jauh lebih mudah dan pada gilirannya *creative hub* yang dibangun di setiap kecamatan akan lebih sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang ingin diwadahi melalui pembentukannya.

2.1.2. Tinjauan Program Makassar *Creative Hub*

Dari sejumlah hasil penelusuran didapatkan pemahaman bahwa *creative hub* secara inheren merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi kegiatan para pelaku

ekonomi kreatif (ekraf) dan membantu mereka menghasilkan produk terbaik mereka, sekaligus mendorong pengembangan ide, bisnis, jaringan, dan organisasi. Secara umum, *creative hub* adalah infrastruktur fisik yang berfungsi sebagai wadah kreativitas bagi para pelaku ekraf. Sebagai pusat ekonomi kreatif masyarakat, *creative hub* berfungsi sebagai tempat di mana berbagai elemen dari ekonomi kreatif bertemu, bukan hanya antara subsektornya. *Creative hub* menjadi wadah bagi pengrajin atau pelaku industri kreatif dengan investor, pemerintah, komunitas, dan media dalam hal ini. Dengan kata lain, *creative hub* berfungsi sebagai "jembatan" yang memungkinkan produk ekraf lokal dikenali lebih luas dan di seluruh dunia melalui kerja sama dan dukungan elemen pentahelix (kemenparekraf.go.id, 2024).

Sebuah *Creative Hub* memiliki tiga dimensi. Pertama, merupakan lokasi menampung aktivitas-aktivitas dalam industri kreatif. Umumnya, lokasi tersebut tidak hanya berdekatan, tetapi sebenarnya berada dalam satu gedung yang sama. Gedung ini sering kali diubah dari penggunaan sebelumnya sebagai gedung industri, gudang, atau kantor. Ciri khasnya adalah ruang besar yang dibagi menjadi studio atau bengkel individu untuk usaha mikro. Kedua, properti tersebut dikelola dengan sistem sewa fleksibel yang memungkinkan transisi "mudah masuk, mudah keluar", serta penyewaan ulang ruang. Secara kritis, dalam banyak kasus, "manajer utama" sebagai pemimpin dalam Creative Hub bertindak sebagai penasihat bisnis, penggerak, dan mediator baik bagi penghuni pusat, maupun antara penghuni dan dunia luar. Terakhir, Creative hub yang dapat menjadi tempat pertukaran pengetahuan dan informasi informal serta dukungan sosial mutual di antara penghuni. Keseimbangan antara ketiga dimensi ini bervariasi tergantung pada setidaknya dua faktor lintas sektoral: pertama, pada tujuan manajer hub, pemberi dana (yang dapat berasal dari sektor publik, swasta, atau ketiga), atau lembaga kebijakan; dan kedua, pada campuran spesifik penghuni, serta keahlian dan bidang kegiatan mereka (Pratt, 2021).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer banyak memunculkan *trend* penting bagi para *changemaker* muda, yang salah satu bentuknya adalah *creative hub* ini atau sederhananya pusat kreatif. Pusat-pusat ini muncul di seluruh dunia termasuk di Indonesia, terutama didorong oleh kebutuhan akan ruang untuk inovasi dan kerja sama dalam industri kreatif. Dari sejumlah riset yang dilakukan,

didapatkan pemahaman bahwa *creative hub* sendiri merupakan sebuah tempat yang menyatukan orang-orang kreatif dengan menyediakan ruang dan dukungan untuk pengembangan jejaring, pengembangan bisnis, dan keterlibatan masyarakat dalam sektor kreatif, budaya, dan teknologi (British Council, 2017). Istilah ini menandai pergeseran baru di bidang budaya, dalam hal ini ruang tidak saja sebagai tempat komunitas menyalurkan karya, ide, aspirasi, dan ekspresi, tetapi juga dimungkinkan untuk melahirkan inovasi dan pengembangan, memungkinkan audiens yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kreasi, dan mendorong masyarakat untuk ikut berkreasi.

Creative hub terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan mereka: *creative space*, *coworking space*, dan *makerspace*. *Creative space* biasanya didirikan dan dikelola oleh komunitas kreatif atau seniman individu dengan tujuan menyediakan ruang fisik untuk membuat, menampilkan, atau menyimpan karya seni serta melibatkan aktivitas dan nilai-nilai komunitas. Tempat kreatif telah menjadi bagian dari budaya independen, dan diikuti oleh berbagai aktivitas lain, seperti seni modern, musik, film, *fashion*, dan sarana pembelajaran alternatif. *Co-working space* adalah jenis *creative hub* lainnya yang menawarkan ruang fisik untuk bekerja dan wadah bagi startup atau individu yang mencari peluang untuk bekerja sama dan membuat produk bersama. Di Indonesia, *coworking space* biasanya menargetkan *startup*, pekerja lepas, dan karyawan jauh. *Makerspace* berbeda dari *co-working space* dengan menyediakan ruang dan peralatan kantor umum serta alat produksi khusus untuk berkolaborasi dan berkreasi secara publik. Dalam kebanyakan kasus, *makerspace* memiliki area kerja yang lebih besar yang difokuskan pada hasil akhir program, yaitu produk jadi (kompasiana.com, 2023). Dari sini dapat dipahami bahwa pusat kreatif bisa berupa inisiatif dari bawah ke atas (*bottom-up*) yang dilakukan oleh seniman atau upaya yang didorong oleh kebijakan (*top-down*) yang bertujuan untuk regenerasi perkotaan dan pembangunan ekonomi (Labbe et.al, 2022).

Menurut British Council (dalam Iswari, 2018) *Creative Space* adalah sebuah wadah, baik fisik maupun virtual, yang berfungsi sebagai wadah bersatunya/berkumpulnya orang-orang pelaku kreatif dengan fasilitas maupun dukungan (support) pengembangan relasi, bisnis, maupun kontribusi masyarakat di bidang kreatif, teknologi, dan juga budaya. Sedangkan menurut Dewi (Dalam Rachfa, 2022) *creative space* adalah sebuah wadah untuk mengembangkan berbagai macam ide dan gagasan.

Ide ini dapat berupa bisnis, teknologi, seni, dan lainnya. Tempat ini merupakan tempat berkumpulnya insan-insan dengan background yang beragam, memiliki tujuan untuk mengembangkan ide juga gagasan kreatif, serta inovatif ke arah yang lebih bermanfaat.

Menurut Thoring (2019), Tipologi dalam Creative Space dapat dibedakan menjadi 2 jenis tipologi, yaitu tipologi berdasarkan “Jenis Ruang” (Space Type), dan “Kualitas Keruangan” (Spatial Quality) Keduanya dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

a). Jenis Ruang atau Space Type, antara lain :

- Personal Space (ruang personal/sendiri) dimana ruang ini digunakan bagi individu untuk belajar atau bekerja sendiri.
- Collaboration Space (Ruang Kolaborasi), yang merupakan ruang untuk bekerja atau belajar Bersama, baik dengan teman, kolega, maupun mentor/pengajar
- Presentation Space (Ruang Presentasi), untuk memberikan pengarahan/presentasi, mendapatkan pelajaran, dan menampilkan sebuah karya yang telah dibuat/digagas.
- Making Space (Tempat Pembuatan), dimana tempat ini berfungsi sebagai ruang eksperimental bagi pelaku ruangnya, dimana gagasan/ide yang ada dieksekusi.
- Additional Space, yaitu tempat tambahan yang difungsikan selain untuk kegiatan kreatif, seperti kafetaria, Hall, Lobby dan sebagainya, sebuah tempat untuk melakukan jeda/beristirahat.

b).Kualitas Keruangan atau Spatial

- Quality, yaitu: Knowledge Processor, ruang dapat menyimpan, memperlihatkan, dan membantu perpindahan informasi dan pengetahuan.
- Indicator of Culture, ruang mengindikasikan kebiasaan atau kegiatan khusus, tertulis maupun tidak tertulis.
- Process Enabler, ruang dapat menyediakan sebuah struktur spasial spesifik untuk membantu atau menghalangi sebuah aktivitas.
- Social Dimension, Ruang mempengaruhi interaksi sosial, memfasilitasi ruang pertemuan komunal maupun personal.
- Source of Stimulation, Ruang memberikan sumber-sumber stimulus melalui view, suara, bau, tekstur, dan sebagainya.

Creative hub dapat memiliki dampak finansial yang signifikan bagi penggunaannya. Salah satu contohnya, *creative hub* telah berkembang menjadi platform yang mampu

menambah jumlah pendiri yang berjuang di industri yang dikenal sebagai "*new economy*". Berbagai *startup* besar muncul dari *co-working space* seperti Instagram dan Uber, yang memengaruhi ekonomi di berbagai bidang dan menciptakan model bisnis baru di seluruh dunia. Selain itu, pengguna yang sebelumnya enggan menghabiskan dana yang cukup besar untuk sarana dan prasarana tersebut sendiri dapat memanfaatkan ruang studio dan peralatan khusus yang disediakan oleh beberapa *creative hub* yang ada. Selain itu, *creative hub* turut membantu penggunanya mendapatkan sumber pendanaan awal melalui acara yang melibatkan profesional *startup* dari seluruh dunia hingga pertemuan investor yang membantu pemula mengembangkan bisnisnya. Dengan demikian, pengguna *creative hub* dapat mengedukasi atau memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada calon klien atau mitra, yang meningkatkan pertumbuhan dan kemitraan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan acara di *co-working space*, seperti demo hari untuk *startup*, di mana orang-orang dapat menunjukkan ide-ide mereka. Ini dapat mengundang investor institusional, seperti *venture capital* ke ruang kerja untuk melihat secara langsung bagaimana produk bekerja (kompasiana.com, 2023). Dalam konteks perkotaan, pusat-pusat kegiatan kreatif ini dapat digerakkan oleh komunitas (Khoo, et.al, 2024).

Dengan dampak ekonomi dan sosial, kota, pemerintah, yayasan, dan perusahaan harus menyadari betapa pentingnya pusat kreatif sebagai katalisator untuk perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan bekerja sama dengan *creative hub*, pemerintah dapat lebih mudah menghubungi pelaku ekonomi kreatif lainnya. Pemerintah dapat bekerja sama dengan *creative hub* untuk membantu banyak pelaku industri lainnya, termasuk individu, usaha kreatif, dan *startup* guna mendapatkan pelatihan, promosi, atau pengembangan produk dan bisnis mereka. Selain itu, melalui *creative hub*, pemerintah dapat menemukan dan memilih *startup* yang berpotensi untuk mendapatkan dukungan dalam program kerja sama dengan *startup* atau perusahaan asing untuk meningkatkan ekosistem. Kelangsungan industri kreatif didukung melalui program peningkatan keterampilan pengelola dan hibah, pendanaan awal, dan insentif pajak yang berbeda untuk setiap tahapan pertumbuhan. Pada akhirnya, kolaborasi dengan pusat kreatif yang dijalankan seoptimal mungkin dapat membantu pemerintah meningkatkan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia (kompasiana.com, 2023).

Dalam konteks Kota Makassar, program *Creative Hub* dari Pemkot Makassar ditujukan sebagai pusat pelatihan keterampilan bagi generasi muda di Kota Makassar. *Creative hub* akan menjadi solusi strategis untuk masalah pengangguran di kalangan pemuda, yang nantinya akan difokuskan pada pelatihan intensif, sehingga anak-anak muda Makassar dapat mengasah keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Bahkan, program ini diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memberdayakan anak muda yang belum memiliki keterampilan khusus. Selain berfokus pada pelatihan keterampilan, *creative hub* juga akan memberikan kursus yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pemuda di masing-masing kecamatan. Melalui program ini, diharapkan setiap pemuda yang mengikuti pelatihan di *creative hub* akan memiliki bekal yang cukup untuk langsung memasuki dunia kerja atau bahkan memulai usaha sendiri. Setelah satu atau dua bulan pelatihan, mereka diharapkan bisa langsung bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri.

Salah satu keunggulan *creative hub* Pemerintah Kota Makassar adalah penyebarannya yang merata di seluruh kecamatan, dalam hal ini akan tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar, sehingga masyarakat baik yang tinggal di pusat kota maupun di daerah pinggiran dapat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelatihan keterampilan yang terfokus dan sesuai dengan kebutuhan Industri/dunia kerja saat ini, seperti teknologi informasi, *digital marketing*, desain grafis, kewirausahaan, hingga keterampilan di sektor jasa. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat mencetak generasi muda yang siap bersaing dan mampu menjawab tantangan pasar kerja modern, yang tidak sekedar mengikuti perkembangan *trend* yang ada, juga sesuai dengan kebutuhan industri di Makassar (tribunnews.com, 2024; sulsel.fajar.co.id, 2024). Bahkan lebih jauh, *creative hub* di Kota Makassar telah menjadi ajang kolaborasi stakeholder terkait, salah satunya Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, yang menyatakan komitmennya untuk turut menyukseskan program ini (tribunnews.com, 2025; antaranews.com, 2025).

2.1.3. Hubungan *Creative Hub* dengan Bidang Pekerjaan Umum

Creative hub merupakan ruang kolaboratif yang mengintegrasikan kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif untuk menciptakan inovasi sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Menurut Florida (2014), kota yang memberi ruang bagi kreativitas akan memiliki daya saing lebih tinggi karena dapat menarik *creative class*, kelompok masyarakat dengan orientasi pada pengetahuan, inovasi, dan seni. *Creative hub* sering hadir di ruang publik atau bangunan kota yang telah direvitalisasi sebagai bagian dari strategi pembangunan kota kreatif (*creative city*). Landry (2008), menyebutkan bahwa kota kreatif membutuhkan dukungan infrastruktur fisik yang kuat, seperti akses transportasi, ruang publik, dan bangunan adaptif. Dalam konteks ini, *creative hub* bukan sekadar ruang seni, tetapi juga instrumen pengembangan wilayah.

Bidang pekerjaan umum (PU) berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, drainase, trotoar, gedung publik, dan taman kota. Menurut Kementerian PUPR (2025), infrastruktur merupakan fondasi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur publik yang baik memungkinkan terciptanya ruang hidup yang layak, inklusif, dan produktif, atau dengan kata lain, infrastruktur publik yang baik tidak saja unggul dari segi teknis tetapi juga mampu memberikan dampak (*impact*) positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur, kota dapat membuka akses untuk aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi kreatif. Artinya, PU menyediakan *hardware* kota, sementara *creative hub* mengisi *software* kota melalui aktivitas masyarakat.

Salah satu bentuk kolaborasi nyata antara PU dan *creative hub* adalah program revitalisasi ruang publik atau bangunan lama. UN-Habitat (2020) mencatat bahwa banyak kota di dunia berhasil mengubah bangunan atau ruang publik yang tidak terpakai menjadi pusat kegiatan kreatif, seperti galeri seni, studio komunitas, ruang kerja bersama (*co-working space*), dan tempat pelatihan masyarakat. Di Indonesia, konsep ini terlihat pada revitalisasi kawasan kota lama (misalnya Kota Lama Semarang), pedestrianisasi Malioboro di Yogyakarta, dan pusat *creative hub* Dharma Negara Alaya Denpasar, yang dalam hal ini Dinas PU membangun infrastruktur dasar dan komunitas kreatif mengelola aktivitas sosial-ekonomi di dalamnya.

Dari telaah di atas dapat kita lihat bahwa kolaborasi PU dan *creative hub* memberikan dampak luas, baik dari sisi pembangunan fisik maupun pembangunan

sosial-ekonomi. Infrastruktur publik memperkuat aksesibilitas dan kenyamanan kota, sedangkan *creative hub* meningkatkan interaksi sosial, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat identitas budaya lokal. Model kolaboratif ini selaras dengan pendekatan pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable urban development*) yang menekankan integrasi antara infrastruktur, masyarakat, dan inovasi (UN-Habitat, 2020).

Creative hub dan bidang pekerjaan umum secara *inheren* saling melengkapi. PU membangun sarana dan prasarana kota, sedangkan *creative hub* menjadi penggerak aktivitas masyarakat yang inovatif. Dengan demikian, kota tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang berkembangnya kreativitas dan ekonomi masyarakat. Konsep ini mendukung pengembangan kota kreatif sebagaimana dianjurkan dalam agenda pembangunan nasional, yang juga menjadi salah satu sasaran utama intervensi kebijakan nasional, dalam hal ini ekosistem kreatif perlu diperkuat dan diarahkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, yang dapat dicapai melalui sejumlah strategi, diantaranya perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global dengan aktivitas pemasaran melalui media digital dan fisik, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni; penguatan aksi afirmasi produk kreatif lokal yang didukung forum sinergi dan insentif; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, inkubasi produk, serta riset kolaboratif dengan institusi pendidikan tinggi; pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, termasuk pembangunan hub/sentra kreatif yang didukung kelembagaan pengelola dan klaster kreatif sebagai ruang kreasi terutama di kota yang tergabung dalam provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif (dalam hal ini Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi prioritas); yang kesemuanya itu dilakukan melalui intervensi kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif; penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta penguatan ekosistem kuliner (Bappenas, 2025); yang kesemuanya ini dapat diwadahi melalui *creative hub*.

2.1.4. Strategi Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Creative Hub di Kota Makassar

Kajian-kajian kebijakan yang berkembang di Lembaga Administrasi Negara (LANRI), sinkronisasi kebijakan dapat dilakukan melalui sejumlah tahapan, yakni: identifikasi kebijakan dan program di pusat dan daerah; analisis kesesuaian arah, sasaran, dan indikator kebijakan; Koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan; Harmonisasi substansi kebijakan melalui forum formal seperti Musrenbang, Rakortek, dan Rakorbangnas; Integrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; sampai dengan Monitoring dan evaluasi bersama untuk menjamin konsistensi implementasi. Hal ini secara terperinci dapat disajikan sebagai berikut.

Gambar 1.
Bagan Alur Sinkronisasi Kebijakan



Model sinkronisasi kebijakan di atas jika ingin diadaptasikan dalam penelitian ini, khususnya terkait pembangunan dan pengembangan *creative hub* di seluruh kecamatan di Kota Makassar, maka diperlukan sejumlah adaptasi. Pertama, dasar implementasi program MCH yang menjadi basis pembentukan dan pengembangan *creative hub* di seluruh kecamatan, bersumber dari janji politik Pemerintahan Kota Makassar yang

terjewantahkan dalam RPJMD Kota Makassar 2025-2049. Kedua, program MCH sebagai salah satu program prioritas menjadi fokus implementasi program sebagaimana tertuang dalam RPJMD tersebut. Ketiga, koordinasi dan konsultasi lintas sektor dimaksudkan sebagai pemetaan/identifikasi potensi, kebutuhan, dan permasalahan di lingkup kecamatan, yang menghasilkan klasterisasi model *creative hub* yang sesuai dengan peruntukan setiap kecamatan. Keempat, harmonisasi substansi kebijakan. Pada titik ini, diperlukan adanya kesepahaman dan komitmen diantara stakeholder kebijakan, mulai dari Dinas Pariwisata selaku leading stakeholder, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Dinas PU selaku penyedia hardware atau infrastruktur fisik. Kelima, pelaksanaan terpadu di seluruh kecamatan berdasarkan klasterisasi pembangunan dan pengembangan *creative hub* oleh Dinas PU. Keenam, monitoring dan evaluasi secara bersama oleh seluruh stakeholder program *creative hub*, mulai dari jajaran Pemkot Makassar, sektor swasta yang terlibat, Politeknik STIA LAN Makassar selaku perwakilan universitas, Komunitas Kreatif sebagai salah satu pilar kemasyarakatan, dan media massa, yang dapat dilakukan dengan model *pentahelix collaboration*. Hal ini sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.

Strategi Sinkronisasi Kebijakan

Pembangunan dan Pengembangan *Creative Hub* Kota Makassar



2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam studi terhadap *creative hub* yang dilakukan *scholars* selama lebih dari dua dekade dari perspektif kebijakan, disimpulkan bahwa pusat kreatif dalam perspektif kebijakan masih dalam tahap awal, dalam artian pemerintah daerah masih kesulitan mendefinisikan apa sebenarnya pusat kreatif itu. Analisis yang ada juga menunjukkan bahwa kebijakan pusat kreatif, meskipun menciptakan ruang bagi seniman, didasarkan pada nilai-nilai selain nilai artistik, terutama ekonomi dan sosial (Boswinkel et.al, 2023).

Studi awal yang dilakukan, *creative hub* secara inheren memainkan peran penting dalam pembangunan sosial-ekonomi dengan mendorong inovasi dan mendukung pertumbuhan inklusif (Flego et.al, 2024). Mereka dapat bertindak sebagai katalisator pembangunan ekonomi dengan menarik pemuda dan menyediakan kesempatan kerja, sebagaimana kasus di Malaysia (Khoo et al., 2024). Namun, sangat diperlukan dukungan pemerintah yang lebih besar, koordinasi pemangku kepentingan yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas *creative hub* tersebut.

Dalam studi yang dilakukan *scholars* lainnya, *creative hub* memiliki beragam manifestasi di seluruh dunia, mulai dari inisiatif komunitas berskala kecil di Hanoi hingga proyek berskala besar di Jakarta Timur. Pusat kreatif dalam praktiknya tidak jarang menghadapi tantangan, seperti mengamankan dana dan sponsor yang cukup, serta menavigasi kontrol negara. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, mereka menyediakan ruang bagi otonomi dan keterlibatan politik yang memungkinkan individu-individu kreatif untuk menantang kontrol negara dari bawah ke atas (Labbe et al., 2022).

Studi di Eropa dengan Negara Republik Ceko sebagai contohnya, menghasilkan pengalaman yang menunjukkan bahwa pusat kreatif berkontribusi pada regenerasi perkotaan dan pembangunan ekonomi lokal dengan menarik bisnis kreatif dan mendorong ekonomi budaya yang dinamis. Dukungan sektor publik sangat penting bagi keberlanjutan pusat-pusat kreatif di Republik Ceko. Dukungan finansial dan pembangunan komunitas diidentifikasi sebagai kekuatan utama, sementara mengamankan dana yang memadai masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, keterlibatan sektor publik dan dukungan finansial seringkali diperlukan untuk keberlanjutan jangka panjang mereka. (Chaloupková et al., 2023).

Studi lain mencoba mengevaluasi implementasi program *creative hub*. Dari studi yang dilakukan, didapatkan bahwa efektivitas pusat kreatif sangat bergantung pada konteks, dibentuk oleh kondisi lokal, sejarah, dan kebutuhan spesifik pengguna, termasuk ekonomi budaya dan kebutuhan pekerja budaya yang menempati ruang tersebut. Mengalihkan fokus dari infrastruktur ke dukungan kebutuhan pengguna sangat penting bagi keberhasilan pusat kreatif. Evaluasi harus menghindari generalisasi model tunggal dan sebaliknya fokus pada keragaman empiris (Pratt, 2021).

Riset-riset terdahulu yang dilakukan, nampak jelas bahwa arah strategi implementasi program *creative hub* yang dibangun Pemkot Makassar telah berada pada trek yang tepat, dalam hal ini dimulai dari pemetaan potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang eksis dan berkembang di sektor kecamatan sebagai basis pembangunan *creative hub* oleh PU, yang kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi kebijakan dari level Pemkot hingga *street level government* dan stakeholder di lingkup kecamatan, sehingga terjalin kesepahaman dan harmonisasi dalam kesatuan visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan guna menyukseskan program MCH. Dengan demikian, MCH yang nantinya dibangun dan dikembangkan dapat menjadi pusat yang memwadahi kreativitas dan inovasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sekaligus menjadi pusat peningkatan kapasitas dan keterampilan publik, yang pada gilirannya dapat membuka peluang dan akses bagi lapangan kerja dan dunia industri, yang nantinya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, implementasikan strategi sinkronisasi kebijakan pembangunan *creative hub* Kota Makassar didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada kebutuhan penelitian yang ingin mendapatkan data yang valid, reliabel, objektif, dan komprehensif mengenai potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap kecamatan di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih juga karena dapat mengakomodir fleksibilitas yang sangat mungkin dijumpai di lapangan, dalam hal ini keragaman data dan informasi, keunikan komunitas kreatif di setiap wilayah, dan prioritas stakeholder program *creative hub* yang lintas sektor.

3.2. Sumber Data

Menurut Lofland & Lofland (Cresswell, 2012:157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto atau video.

Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :

1. Data primer,

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan sumber-sumber tidak tertulis atau data lapangan melalui wawancara dan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada informan berdasarkan data yang dibutuhkan. Untuk pendalaman informasi peneliti akan melakukan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan informan/peserta dari Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Ketenagakerjaan, serta Masyarakat, Pemuda, dan Pelaku UMKM yang tersebar di 15 Kecamatan di Kota Makassar.

Untuk teknik penentuan informan dilakukan secara purposive Sampling yaitu dengan memilih informan yang representative untuk memberikan informasi mengenai

potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap kecamatan yang perlu diwadahi melalui pembangunan *creative hub*.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus.

Jenis data yang dikumpulkan melalui kedua sumber data tersebut dapat berbentuk, berupa :

1. Kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai secara mendalam (*idenph interview*) sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto/film.
2. Sumber tertulis. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah, koran, arsip, dokumen pribadi, dan atau dokumen resmi.
3. Data statistik. Data statistik yang tersedia pada pihak-pihak yang terkait.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang valid, objektif, dan reliabel, dan komprehensif, penelitian ini mengkombinasikan sejumlah teknik pengumpulan data. Pertama wawancara, yang diarahkan untuk mendapatkan pemahaman tentang desain program *creative hub* yang ingin diimplementasikan. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mendalami sejumlah data, fakta, dan informasi yang lebih mendalam, yang diperoleh dari instrumen pengumpulan data lainnya. Terkait hal ini, instrumen wawancara akan dibuat lebih fleksibel seiring perkembangan data, fakta, dan informasi yang didapatkan di lapangan. Kedua, observasi, baik lapang maupun virtual, yang dilakukan untuk memotret kesesuaian model *creative hub* yang akan dibangun dalam kaitannya dengan kebutuhan dan tuntutan stakeholder, sekaligus dalam kaitannya dengan dinamika *creative hub* kontemporer. Terkait hal ini, instrumen observasi juga dibuat fleksibel seiring kebutuhan data dan informasi yang berkembang di lapangan. Ketiga, telaah dokumen, yang diarahkan untuk mendapatkan data perbandingan dari sejumlah

artikel, baik ilmiah maupun kontemporer melalui *mass media*, guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait *creative hub* dan dinamikanya.

Instrumen ini juga dapat menjadi basis kajian dalam kaitannya dengan penyesuaian pembangunan *creative hub* dengan dokumen kebijakan Pemkot Makassar. Keempat *Focus Group Discussion* (FGD), yang dilakukan guna menjangkau informasi dan kesepahaman yang utuh di kalangan stakeholder program Makassar *Creative Hub*, terutama terkait potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap kecamatan yang perlu diwadahi melalui pembangunan *creative hub*. Selain itu, FGD ini juga akan dilakukan guna mendapatkan harmonisasi diantara implementor program *creative hub*, mulai dari Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan *creative hub* di setiap kecamatan.

Khusus untuk FGD, pengumpulan data melalui instrumen ini didesain dalam dua tahapan. Pertama, FGD dilakukan dengan mengumpulkan stakeholder program MCH lingkup kecamatan dalam sebuah forum yang diinisiasi Pemkot Makassar, dalam artian stakeholder program mulai dari pemerintahan kecamatan, sektor swasta, hingga komunitas kreatif di 15 kecamatan akan dibagi ke dalam dua klaster sesuai kedekatan wilayah. Klasterisasi ini pada dasarnya dilakukan hanya dalam rangka mempermudah tim peneliti dalam mengumpulkan stakeholder guna kebutuhan pengumpulan data. Kedua, FGD dilakukan guna mendapatkan kesepahaman dan komitmen diantara implementor program MCH, yang terdiri dari Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Ketenagakerjaan. Terkait hal ini, tim peneliti akan mendesain format/instrumen FGD yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pengumpulan data.

3.4. Teknik Analisis Data

Potensi kompleksitas data kualitatif yang mungkin diperoleh di lapangan berdasarkan konteks dan keragaman sumber data penelitian, mengakibatkan tim peneliti memilih pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA) sebagai basis analisis data, yang dimulai dari membuat kerangka, mengelompokkan data, analisis data, hingga pelaporan. Pendekatan ini dipilih karena tim peneliti ingin menghasilkan pembangunan *creative hub* yang lebih partisipatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan

evaluasi. Secara umum, analisis didasarkan pada LFA yang dikembangkan Keerti (2012), dengan *logical framework matrix* yang terdiri dari *goal*, *purpose*, *output*, dan *activities*.

Dalam penelitian ini, *goal* dapat dipahami sebagai target jangka panjang yang ingin dicapai melalui program MCH, yakni peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja; *purpose* dapat dipahami sebagai target jangka pendek-menengah, yakni dampak/kebermanfaatan yang didapatkan masyarakat, yakni ide-ide kreatif dan inovatif dapat tersalurkan dengan jauh lebih baik dan terwadahi, peningkatan skill/keterampilan kerja masyarakat, serta terfasilitasinya kebutuhan dunia kerja/industri; *output*, dapat dipahami sebagai hasil yang ingin dicapai dalam program, yakni terbangunnya pusat kreatif yang mampu mewadahi kreativitas, pengembangan skill, dan *co-working space* di setiap kecamatan; serta *activities*, yang dapat dipahami sebagai elemen-elemen utama dari komponen program yang melaluinya *output* dapat dicapai, dalam hal ini pembangunan *creative hub* akan didasarkan pada sejumlah aktivitas mulai dari pemetaan potensi, kebutuhan, dan permasalahan, sampai dengan sinkronisasi kebijakan, sehingga pembangunan *creative hub* benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan sekaligus sesuai dengan tuntutan kelompok sasaran. Untuk kebutuhan penelitian, tim akan memodifikasi dan menyusun *Logical Framework Matrix* yang sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan.

Sumber : <https://makassarkota.go.id/peta-wilayah-administrasi-kota-makassar/>, 2025
 Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Luas dan Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2023

Kecamatan	Luas Area (km ²)
Biringkanaya	48,22
Bontoala	2,10
Makassar	2,52
Mamajang	2,25
Manggala	24,14
Mariso	1,82
Panakuk kang	17,05
Rappocini	9,23
Tallo	5,83
Tamalanrea	31,84
Tamalate	20,21
Ujung Pandang	2,63
Ujung Tanah	4,40
Wajo	1,99
Kepulauan Sangkarrang	1,54
Kota Makassar	175,77

Sumber: Makassar Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kecamatan di Kota Makassar yang paling luas ialah Kecamatan Biringkanaya dan kecamatan yang memiliki luas paling kecil ialah Kepulauan Sangkarrang. Secara astronomis, Kota Makassar terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi antara berada pada koordinat 119°4'29,038"–119°32'35,781" Bujur Timur dan 4°58'30,052"–5°14'0,146" Lintang Selatan dengan luasan 175,77 km². Makassar sebagai pintu gerbang dan sebagai kota metropolitan terbesar di kawasan timur Indonesia. Mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia.

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.

b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

Kondisi Demografi Kota Makassar

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi objek tetapi juga menjadi subyek (pelaksana) dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang mempunyai kontribusi positif bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi bagi kemajuan Kota Makassar bila dapat dikelola dengan baik.

Penduduk Kota Makassar tahun 2023 tercatat sebanyak 1.474.393 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 732.391 jiwa laki laki dan 742.002 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 98,70, angka ini menunjukkan bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 98 - 99 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 175,77 km², maka kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu 8.388 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Makassar dengan 32.634 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tamalanrea yaitu 3.337 per kilometer persegi.

Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. PUK terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar adalah sebesar 58,72 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nya adalah sebesar 10,60 persen. Sebanyak 31,67 persen PUK berpendidikan SMA. Jika dilihat menurut jam kerja seluruhnya, 80,89 persen PUK bekerja selama 35 jam atau lebih, sedangkan menurut status pekerjaannya, 58,35 persen bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Berikut jumlah penduduk Kota Makassar menurut kecamatan pada tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Biringkanaya	215.820
Bontoala	55.201
Makassar	82.237
Mamajang	58.293
Manggala	160.466
Mariso	58.730
Panakuk kang	144.204
Rappocini	150.613
Tallo	148.055
Tamalanrea	106.262
Tamalate	188.432
Ujung Pandang	24.851
Ujung Tanah	36.745
Wajo	29.503
Kepulauan Sangkarrang	14.981
Jumlah	1.474.393

Sumber: Makassar Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kecamatan di Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ialah Kecamatan Biringkanaya yaitu sebanyak 215.820 jiwa dan kecamatan yang memiliki penduduk paling sedikit ialah Kepulauan Sangkarrang yaitu sebanyak 14.981 jiwa.

Pemerintahan Kota Makassar

Pemerintahan Kota Makassar memiliki visi misi yang dapat diuraikan sebagai berikut. Visi :

“Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan”

Misi :

1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau;
2. Meningkatkan kualitas layanan dasar bidang Pendidikan dan Kesehatan secara merata;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan dan ramah lingkungan;

4. Mengembangkan pusat inovasi kepemudaan dan pengembangan olahraga, seni budaya serta pariwisata;
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan Terpercaya;
6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
7. Menegakkan ketertiban umum dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana

Sebanyak 11.165 Pegawai Negeri Sipil berada dibawah Pemerintah Kota Makassar, yang terdiri dari 3.423 orang PNS laki-laki dan 6.632 orang PNS perempuan. Menurut tingkat pendidikan, tercatat bahwa sebagian besar PNS berpendidikan S1 ke atas yaitu sebanyak 8.250 orang atau sekitar 82,05 persen. jumlah pegawai negeri sipil di Kota Makassar berkurang pada tahun 2023 yaitu sebanyak 10.055 dan jenis kelamin pegawai negeri sipil di Kota Makassar ialah perempuan sebanyak 6.632 pada tahun 2023.

Kondisi Perekonomian Kota Makassar

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 226.902,79 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 17.967,00 milyar dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 208.935,79. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 133.312,60 milyar di tahun 2022 menjadi Rp 140.197,90 milyar di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023, Kota Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,31 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Makassar pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarnya mencapai 20,03 persen.

Kondisi Sosial Kesejahteraan

Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah sekolah di Kota Makassar pada jenjang RA 92 sekolah, SD 472 sekolah, MI 70 sekolah, SMP 222 sekolah, MTs 52 sekolah, SMA 137 sekolah, SMK 78 sekolah, MA 32 sekolah, dan 93 universitas/ politeknik/ akademi.

Kementerian Kesehatan mencatat, Kota Makassar memiliki 170 tenaga medis, 430 tenaga keperawatan, 366 tenaga kebidanan, dan 124 tenaga kefarmasian. Selain ditunjang oleh tenaga kesehatan, Kota Makassar juga memiliki fasilitas kesehatan yang cukup lengkap, yang terdiri dari 34 unit rumah sakit, 47 unit puskesmas, dan beberapa fasilitas kesehatan lainnya.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini juga ditunjukkan dengan banyaknya tempat peribadatan umat Islam di Kota Makassar, yang terdiri dari 1.430 mesjid dan 117 musholah. Hasil dari SUSENAS Maret 2023 menunjukkan garis kemiskinan Kota Makassar berada pada angka Rp 570.286 dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,07 persen. IPM 2023 sebesar 84,85 dengan pertumbuhan 0,47 persen.

Kondisi Perdagangan

Jumlah sarana perdagangan di Kota Makassar cukup bervariasi. Pada tahun 2023, sarana perdagangan yang berada di Kota Makassar antara lain pasar sebanyak 18 unit, toko sebanyak 461 unit, dan kios sebanyak 10.682 unit. Pedagang menurut klasifikasinya dibedakan menjadi pedagang kecil, menengah, dan besar. Hingga tahun 2023, terdapat 12.563 pedagang kecil, 9.550 pedagang menengah, dan 5.890 pedagang besar.

Dalam melakukan sebuah usaha terdapat beberapa kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi, diantaranya harus mendaftarkan perusahaan serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tahun 2023, tercatat sejumlah 69.038 perusahaan yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menurut badan hukumnya terdiri dari

13.914 Perseroan Terbatas, 21.579 CV/Firma, 366 Koperasi, dan 29.008 Usaha Perorangan, dan Lainnya sebanyak 4.171 unit usaha.

4.1.2. Deskripsi Umum Makassar *Creative Hub*

Makassar *Creative Hub* sendiri adalah representasi dari banyak fungsi bangunan di antaranya area display, coworking space, bioskop mini, studio editing, ruang workshop, dan amphitheater mini. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan di sini, seperti workshop film atau animasi, pemutaran film, seminar, ataupun talkshow (Pranyoto, 2019), serta banyak fungsi yang ada, dalam pembangunannya permasalahan arsitektural terjadi di dalam desain bangunan dan ruang – ruang pada bangunan. Pada umumnya luasan ruang dapat ditentukan dengan penentuan aktivitas dan kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Kemudian kebutuhan ruang diolah membentuk 2 alternatif konfigurasi ruang dengan tingkat kualitas ruang yang optimal.

Makassar *Creative Hub* dari Pemkot Makassar ditujukan sebagai pusat pelatihan keterampilan bagi generasi muda di Kota Makassar. *Creative hub* akan menjadi solusi strategis untuk masalah pengangguran di kalangan pemuda, yang nantinya akan difokuskan pada pelatihan intensif, sehingga anak-anak muda Makassar dapat mengasah keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Bahkan, program ini diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memberdayakan anak muda yang belum memiliki keterampilan khusus. Selain berfokus pada pelatihan keterampilan, *creative hub* juga akan memberikan kursus yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pemuda di masing-masing kecamatan. Melalui program ini, diharapkan setiap pemuda yang mengikuti pelatihan di *creative hub* akan memiliki bekal yang cukup untuk langsung memasuki dunia kerja atau bahkan memulai usaha sendiri. Setelah satu atau dua bulan pelatihan, mereka diharapkan bisa langsung bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri.

MCH adalah salah satu dari tujuh program unggulan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Appi-Aliyah. Program ini merupakan bukti komitmen Pemkot dalam menciptakan ekosistem yang inklusif, gratis, dan membuka peluang besar bagi anak-anak muda di Kota Makassar. MCH tidak hanya sekadar bangunan, namun sebagai ekosistem hidup yang mendorong kolaborasi lintas disiplin, mempertemukan ide-ide

segar, serta membekali anak-anak muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa kini.

Di tengah tantangan pengangguran dan kesenjangan akses terhadap pelatihan berkualitas, Makassar Creative Hub lahir sebagai solusi konkret membuka ruang, memperluas kesempatan, dan menyulam masa depan kota lewat kreativitas warganya. MCH dirancang sebagai ruang hidup, bukan hanya bangunan. Aksesnya terbuka gratis, inklusif bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok marginal. Beberapa fasilitas seperti kafe, ruang komunitas, serta toko kreatif, telah dirancang ramah disabilitas, lengkap dengan akses dan fasilitas penunjang.

Program MCH tidak hanya tentang ruang fisik, tapi tentang membuka kemungkinan. Makassar Creative Hub ini merupakan tempat anak muda untuk menyulam ide-ide dari berbagai latar belakang, disiplin, dan generasi. Inilah tempat untuk merespons kebutuhan angkatan kerja muda Makassar. MCH diharapkan menjadi salah satu solusi strategis. Ini bukan satu-satunya cara, tapi ini adalah salah satu cara paling konkret bagaimana kami merespons tantangan pengangguran.

MCH juga akan terhubung dengan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai mitra teknis. Jika kelas penuh atau butuh peralatan khusus seperti pertukangan, pelatihan akan dialihkan ke fasilitas BLK. MCH juga ini menekankan pentingnya kesetaraan akses terhadap peluang kerja, mengingat masih banyak perusahaan di Makassar yang diisi tenaga kerja dari luar.

Dengan semangat kolaborasi, MCH hadir bukan hanya sebagai pusat pelatihan, tapi juga ruang inspirasi dan produksi karya, dari Losari hingga lorong-lorong kota. Ini adalah langkah awal mewujudkan Makassar sebagai kota kreatif yang setara, berdaya, dan terbuka untuk semua.

Pemkot Makassar juga telah merancang rencana ekspansi MCH ke kecamatan lain di Makassar, agar masyarakat dari wilayah terluar seperti Sudiang pun bisa mengakses pelatihan serupa tanpa harus datang ke pusat kota. Makassar Creative Hub merupakan salah satu dari tujuh program prioritas yang telah dicanangkan pasangan Appi-Aliyah, bersama dengan Makassar Super App, berbagi jaminan sosial, sambungan air bersih gratis, dan pembangunan stadion dan seragam gratis dan iuran sampah gratis.

Makassar Creative Hub merupakan sebuah rancangan pusat kolaborasi kreatif yang berfungsi sebagai simpul pertemuan berbagai elemen pentahelix dalam pengembangan ekonomi kreatif. Hub ini ditujukan untuk menjadi wadah kolaborasi seperti berbagai creative hub yang telah hadir di kota lain. Visi utamanya adalah menjadi pusat kreatif terintegrasi yang mendukung inovasi, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi kreatif di Makassar dan sekitarnya. Misi yang diusung mencakup pengembangan ekosistem kreatif melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan, fasilitasi pemasaran produk kreatif serta UMKM lokal, serta pembangunan infrastruktur fisik dan keuangan yang berkelanjutan.

Program Makassar Creative Hub menysasar 15 kecamatan dan berfokus pada kelompok anak muda, UMKM, pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kelompok rentan dan disabilitas. Rencana implementasinya dibagi dalam tahapan 100 hari, satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun, mulai dari studi ekosistem, pembentukan struktur organisasi, peluncuran program pelatihan, branding, kemitraan, hingga pembangunan gedung fisik serta pengembangan dana abadi sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Di sisi lain, sejumlah hambatan sektoral diidentifikasi, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya SDM terlatih, rendahnya pemasaran pariwisata, rendahnya kesadaran terhadap kekayaan intelektual, minimnya fasilitas pelatihan tenaga kerja, rendahnya minat berkoperasi, serta kurangnya dukungan bagi wirausaha muda.

Skema kolaborasi Makassar Creative Hub mencakup tiga pilar utama: Skill Academy, Production Studio, serta Exhibition/Event. Melalui skema ini, berbagai fasilitas, dana hibah, inkubasi, workshop, forum diskusi, serta pendampingan akan diberikan untuk mendorong peluang kerja, pengembangan IP, dan kolaborasi komunitas. Dalam satu tahun program kerja, fokus utama meliputi Skill Academy, riset dan pengarsipan, pengembangan fasilitas creative hub, peningkatan ubiquity UMKM di kecamatan, pemberian dana bantuan, dan Festival Market Forum.

Skill Academy menawarkan program inkubasi, residensi, workshop singkat, networking, proyek nyata, pendampingan sertifikasi, serta kursus bahasa Inggris untuk meningkatkan kompetensi peserta. Riset dan pengarsipan dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, studi literatur, digitalisasi arsip, dan penerbitan berbagai bentuk output seperti jurnal, zine, buku, dokumentasi video, dan arsip digital. Fasilitas

Makassar Creative Hub mencakup ruang kelas, ruang pertemuan, studio musik dan rekaman, galeri, co-working space, digital content studio, auditorium, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Program Ubiquitas UMKM menghadirkan ruang multifungsi berbasis kontainer di kecamatan berupa hangout space, ruang pameran produk, dan mini market UMKM. Selain itu, program Dana Bantuan mendukung proyek, usaha, dan inovasi kreatif melalui pendanaan, fasilitas, jasa pemasaran, serta akses promosi dan pasar. Market Forum dirancang sebagai pusat, pasar, dan arena pameran bagi pelaku industri kreatif, menyediakan ruang pameran, platform proyek, edukasi, networking, proyek nyata, dan pertunjukan. Untuk menjalankan keseluruhan program, struktur organisasi dibentuk dengan divisi keuangan, operasional, riset dan akademi, program, kreatif, serta kemitraan, dilengkapi berbagai koordinator lintas dinas untuk memastikan sinergi antarsektor.

Salah satu keunggulan *creative hub* Pemerintah Kota Makassar adalah penyebarannya yang merata di seluruh kecamatan, dalam hal ini akan tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar, sehingga masyarakat baik yang tinggal di pusat kota maupun di daerah pinggiran dapat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelatihan keterampilan yang terfokus dan sesuai dengan kebutuhan Industri/dunia kerja saat ini, seperti teknologi informasi, *digital marketing*, desain grafis, kewirausahaan, hingga keterampilan di sektor jasa. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat mencetak generasi muda yang siap bersaing dan mampu menjawab tantangan pasar kerja modern, yang tidak sekedar mengikuti perkembangan *trend* yang ada, juga sesuai dengan kebutuhan industri di Makassar (tribunnews.com, 2024; sulsel.fajar.co.id, 2024). Bahkan lebih jauh, *creative hub* di Kota Makassar telah menjadi ajang kolaborasi stakeholder terkait, salah satunya Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, yang menyatakan komitmennya untuk turut menyukseskan program ini (tribunnews.com, 2025; antaranews.com, 2025).

4.1.3. Deskripsi Analisis Data dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dielaborasi sejumlah data terkait pembangunan *creative hub* yang sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang ada di setiap kecamatan dalam lingkup Kota Makassar, mulai dari Kecamatan Wajo, Kecamatan

Kepulauan Sangkarrang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Maccini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalate, hingga Kecamatan Mariso. Adapun hasil elaborasi atas permasalahan, kebutuhan, dan potensi setiap kecamatan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Kecamatan Wajo

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum SDM di Kecamatan wajo tidak terserap dan kurang dikembangkan sebagaimana yang diharapkan karena beberapa hal, diantaranya pusat perekonomian yang tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya sinergi stakeholder, dan kurangnya sarana pengembangan kompetensi, yang pada gilirannya belum mampu menghasilkan produk unggulan di wilayahnya. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Wajo memiliki sejumlah kebutuhan, terutama terkait dengan pengembangan sentra ekonomi kerakyatan, sarana penyaluran aktivitas kepemudaan, dan akses pasar atas produk UMKM, yang diharapkan dapat difasilitasi melalui MCH. Hal ini penting, mengingat potensi Kecamatan Wajo yang memiliki komunitas kreatif di setiap kelurahan, antusias terhadap potensi ekonomi UMKM, dan didukung situasi sosial yang kondusif. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, Potensi Kecamatan Wajo

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Pusat perekonomian yang yang sebelumnya berkontribusi besar, seperti Makassar Trade Center (MTC) kini tidak lagi berfungsi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Butuh sinergi stakeholder terkait untuk perizinan pasar sulap/pusat kuliner ● Butuh MCH seperti di Losari ● Butuh sarana/fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dengan UMKM ● Pengembangan pusat kuliner di kawasan Jl. Cokroaminoto, yang berpotensi 	<p>Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Kebudayaan.</p>

<p>sebagaimana yang diharapkan, yang pada gilirannya SDM tidak terserap dan meningkatkan pengangguran</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Potensi tidak tersalurkan karena tidak ada yang memotivasi ● Pemerintah kecamatan kurang mendukung pengembangan komunitas karena dianggap terkait hal-hal politis ● Belum ada lembaga keterampilan (<i>skill course</i>) eksternal yang dapat mewadahi pengembangan kompetensi masyarakat ● Belum ada produk unggulan yang dihasilkan di wilayah ● Menjadi kawasan lokalisasi PSK 	<p>untuk anak muda (19.00 ke atas sudah sepi, karena anak muda bergaul di wilayah luar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Produk-produk UMKM bisa masuk ritel 	<p>menyerap PAD melalui retribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Budaya tudang sipulung yang terjaga di kalangan masyarakat dalam menyelesaikan konflik/ permasalahan ● Konflik masyarakat yang relatif kurang ● Setiap kelurahan ada komunitasnya ● Bisa berkolaborasi dengan komunitas tionghoa yang relatif banyak di wilayah (seperti festival barongsay, dll) 	
---	---	--	--

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pada Kecamatan Wajo terdapat beberapa potensi untuk pengembangan perekonomian. salah satunya adalah Makassar Trade Center (MTC) yang menjadi pusat perekonomian yang menyerap banyak tenaga kerja. Beberapa Tahun Lalu MTC menjadi Primadona untuk penjualan barang-barang elektronik, namun kini tidak lagi berfungsi secara optimal dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena toko-toko yang ada di

MTC tidak mampu berinovasi dalam memasarkan produknya melalui Marketplace sehingga gagal bersaing.

Selain itu masalah lain yang terjadi di Kecamatan Wajo adalah Tidak adanya ruang pengembangan keterampilan untuk Masyarakat dan minimnya wadah untuk menyalurkan potensi menyebabkan banyak masyarakat, terutama generasi muda, kehilangan motivasi untuk berkarya. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya potensi produk unggulan Kecamatan Wajo sebagai identitas ekonomi lokal serta melemahnya dukungan pemerintah kecamatan Wajo terhadap komunitas masyarakat maupun pemuda karena dianggap memiliki sensitivitas politik. Pada saat yang sama, beberapa kawasan di Kecamatan Wajo berkembang menjadi lokalisasi PSK, yang menurunkan citra sosial wilayah dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang sehat. Situasi tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak akan revitalisasi ruang publik, peningkatan kompetensi masyarakat, dan penciptaan peluang usaha yang inklusif.

Dalam konteks tersebut, masyarakat membutuhkan kehadiran Makassar Creative Hub sebagai pusat aktivitas ekonomi kreatif, pelatihan, dan kolaborasi lintas komunitas. Creative Hub ini diharapkan mampu menjadi ruang bertemunya stakeholder dalam penyelenggaraan pertunjukan hiburan masyarakat, pusat kuliner, serta kegiatan ekonomi lain yang legal dan tertata. Fasilitas ini juga diharapkan dapat berfungsi untuk menyediakan ruang interaksi dan aktivitas bagi anak muda, menghidupkan kawasan pada malam hari, dan memperluas akses pemasaran dengan membuka peluang bagi produk-produk UMKM masuk ke jaringan ritel. Dengan hadirnya sarana pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, masyarakat di Kecamatan Wajo dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan berdaya saing sehingga mampu memperbaiki perekonomian keluarga dan menumbuhkan perekonomian kawasan secara berkelanjutan.

Kecamatan Wajo sebenarnya memiliki modal sosial dan ekonomi yang kuat untuk mendukung pengembangan Creative Hub ini. Antusiasme masyarakat terhadap keberadaan UMKM sangat tinggi, ditambah dengan berkembangnya pusat kuliner di Jl. Cokroaminoto yang berpotensi besar menyumbang PAD melalui retribusi. Selain itu, budaya Tudang Sipulung yang masih dijaga menjadi kekuatan sosial untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, sementara rendahnya konflik sosial dan

keberadaan komunitas di setiap kelurahan menjadi fondasi partisipasi masyarakat dalam program ini. Peluang kolaborasi juga semakin besar dengan banyaknya komunitas Tionghoa di wilayah tersebut yang aktif menggelar kegiatan budaya, seperti festival barongsai, yang dapat memperkuat daya tarik Creative Hub sebagai ruang ekonomi kreatif berbasis budaya.

Untuk mewujudkan pembangunan Creative Hub, diperlukan sinergi lintas organisasi perangkat daerah. Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam mendampingi pengembangan usaha, pelatihan manajemen, pemasaran, hingga akses pembiayaan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertanggung jawab dalam konsep pengembangan program dan event, promosi destinasi, serta penciptaan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Sementara itu, Dinas Kebudayaan berperan menjaga integrasi nilai-nilai budaya dan mengembangkan kegiatan seni serta budaya daerah sebagai identitas dan daya tarik kawasan. Kolaborasi lintas-OPD ini memastikan bahwa Creative Hub tidak hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi juga berfungsi sebagai ekosistem ekonomi kreatif yang hidup, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan Creative Hub di Kecamatan Wajo merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali fungsi kawasan sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Kehadirannya tidak hanya berpotensi mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang pembelajaran, kolaborasi komunitas, serta destinasi ekonomi kreatif yang dapat membangun kembali citra kawasan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Transformasi ini akan mengarahkan Kecamatan Wajo menjadi ruang yang produktif, aman, inklusif, dan bernilai bagi masyarakat serta Kota Makassar secara keseluruhan.

2. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki permasalahan terkait dengan sarana listrik yang hanya dapat diakses secara terbatas, pemasaran hasil industri kelautan/perikanan yang hanya di lingkup lokal, belum terkelolanya sampah dengan baik, dan tingkat pendidikan

masyarakat yang relatif rendah dibanding wilayah lainnya di Kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki sejumlah kebutuhan terkait pengelolaan produk industri kelautan/perikanan, terutama fasilitasi sertifikasi usaha/produk dan pengembangan SDM melalui sejumlah pelatihan ketenagakerjaan. Hal ini penting, mengingat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki potensi kelautan/perikanan yang besar, yang tidak saja dapat dikembangkan untuk kepentingan industri pengolahan hasil kelautan/perikanan, tetapi juga untuk kepentingan pariwisata berbasis kepulauan. Selain itu, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang telah memiliki sejumlah UMKM yang bergerak di sektor kelautan/perikanan, yang selama ini telah mampu menghasilkan 2 produk unggulan. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Kep. Sangkarrang

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Listrik hanya menyala dari pukul 16.00-06.00 ● Pemasaran hasil industri pengolahan kelautan/perikanan hanya sebatas di lingkup kepulauan saja ● Pengolahan sampah ● Tiga besar terendah persentase jumlah penduduk berpendidikan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitasi sertifikasi produk usaha (BPOM, Halal) ● Pelatihan ketenagakerjaan (content creator, make up artist, pengolahan hasil laut, dll), yang dilakukan secara merata (tidak saja di satu pulau, apalagi seperti yang selama ini hanya dilakukan di kawasan perkotaan) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil laut/perikanan ● Pariwisata berbasis kepulauan. Selama ini yang dilirik hanya Pulau Samalona, padahal terdapat pulau lainnya banyak yang tidak kalah menariknya bahkan belum terjamah (alami), seperti Kodingareng Keke dan Lanjukang. Terdapat juga objek wisata bawah laut ● Terdapat 	<p>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM</p>

		beberapa UMKM pengolahan hasil laut/ perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 2 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya 	
--	--	---	--

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar merupakan kebutuhan strategis mengingat wilayah kepulauan ini menghadapi berbagai tantangan struktural dalam pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Saat ini, keterbatasan utama adalah terkait akses listrik yang hanya menyala pada pukul 16.00–06.00. Hal ini menghambat aktivitas produksi dan ekonomi masyarakat pada siang hari, terutama usaha yang berbasis kelautan dan perikanan. Selain itu, pemasaran produk hasil industri pengolahan laut masih hanya berputar di lingkungan internal Kecamatan Kepulauan Sangkarrang saja, sehingga potensi nilai jual dan peningkatan pendapatan belum optimal.

Masalah lain adalah masalah pengolahan sampah yang berdampak pada kualitas lingkungan dan citra kawasan wisata. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, membuat lapangan usaha kreatif dan inovatif sulit berkembang tanpa intervensi peningkatan Pendidikan maupun keterampilan masyarakat di Kecamatan Sangkarrang. Permasalahan tersebut menunjukkan kebutuhan nyata untuk menghadirkan sarana pendidikan dan juga tempat untuk pelatihan keterampilan, untuk meningkatkan kualitas produk, dan perluasan pasar usaha.

Kecamatan Sangkarrang sejatinya memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan ekonomi yang kuat untuk menjadi kawasan ekonomi kreatif berbasis kepulauan. Sumber daya hasil laut/perikanan yang melimpah memberikan peluang besar bagi inovasi pengolahan produk unggulan, apalagi telah terdapat UMKM lokal yang bergerak di bidang tersebut dan menghasilkan dua produk unggulan wilayah. Potensi pariwisata berbasis kepulauan semakin memperkuat prospek ekonomi kreatif, mengingat hanya sebagian kecil destinasi yang sudah terkelola seperti Pulau Samalona, sementara pulau lain seperti Kodingareng Keke dan Lanjukang memiliki daya tarik wisata alami, termasuk

objek wisata bawah laut yang dapat menjadi ikon promosi kreatif. Bila sektor wisata, UMKM, dan budaya lokal dikolaborasikan melalui Creative Hub, maka Sangkarrang dapat tampil bukan hanya sebagai kawasan wisata, tetapi juga sebagai sentra industri kreatif maritim.

Untuk menjawab persoalan dan memanfaatkan potensi tersebut, masyarakat Kecamatan Sangkarrang membutuhkan Creative Hub yang berperan sebagai pusat pelatihan, inovasi, dan pemasaran terpadu. Creative Hub ini diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah pelatihan keterampilan kerja dan ekonomi kreatif seperti content creator, pengolahan hasil laut, dan bidang lainnya, dengan penyelenggaraan yang merata antar pulau sehingga tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Selain itu, Creative Hub juga perlu memfasilitasi sertifikasi produk usaha—BPOM, Halal, dan sertifikasi mutu lainnya—agar UMKM berbasis hasil laut dapat bersaing di pasar wilayah daratan Kota Makassar maupun secara nasional. Kehadiran fasilitas ini akan memperkuat kapasitas usaha sekaligus membantu masyarakat mengemas potensi lokal menjadi produk bernilai tinggi yang siap dipasarkan lebih luas.

Untuk merealisasikan pembangunan Creative Hub ini, sinergi lintas OPD sangat dibutuhkan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki peran strategis dalam merancang program ekonomi kreatif berbasis wisata dan promosi destinasi kepulauan. Dinas Perikanan dan Pertanian berperan dalam peningkatan kualitas bahan baku, diversifikasi pengolahan hasil laut, hingga penyediaan pendampingan teknis. Sementara Dinas Koperasi dan UKM bertanggung jawab mendukung sertifikasi produk, pendampingan bisnis, dan memperluas akses pemasaran. Dengan koordinasi yang kuat antar-OPD, Creative Hub dapat berfungsi bukan hanya sebagai bangunan fisik pelatihan, tetapi sebagai pusat ekosistem ekonomi kreatif yang menghubungkan pelatihan keterampilan, produksi, distribusi, pariwisata, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan Creative Hub di Kecamatan Sangkarrang bukan sekadar kebutuhan fasilitas, tetapi langkah strategis untuk mengintegrasikan potensi maritim, pariwisata, dan UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi kawasan. Kehadirannya diharapkan mampu memperluas pasar hasil laut, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, memperbaiki lingkungan dan citra kawasan wisata, serta

mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan Kota Makassar.

3. Kecamatan Ujung Tanah

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Ujung Tanah memiliki permasalahan terkait akses pemasaran produk hasil UMKM, kurangnya fasilitas pengembangan kreativitas anak muda, belum adanya sarana/fasilitas bagi kelompok disabilitas, dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Ujung Tanah memiliki sejumlah kebutuhan, terutama terkait dengan pemasaran produk hasil UMKM, yang dibarengi dengan fasilitasi jaringan kemitraan/stakeholder yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kemasyarakatan, dan pengembangan SDM melalui pelatihan ketenagakerjaan.

Hal ini penting, mengingat Kecamatan Ujung Tanah memiliki potensi kelautan/perikanan yang besar, yang tidak saja dapat berkontribusi dalam bentuk produk, tetapi juga dapat dikemas dalam bentuk penyelenggaraan event/festival. Bahkan, Kecamatan Ujung Tanah mampu mengembangkan sejumlah potensi yang dimiliki tanpa membebani anggaran pemerintahan, melalui kolaborasi yang apik dengan sejumlah sektor swasta dalam lingkup wilayahnya. Selain itu, Kecamatan Ujung Tanah telah mampu menghasilkan 7 produk unggulan, yang 1 diantaranya telah diekspor ke luar negeri. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Ujung Tanah

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● UMKM terkendala pemasaran ● Produk UMKM sulit masuk ke ritel modern (Alfamart dll, karena sulit persyaratan masuknya). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan kewirausahaan berbasis pesisir ● Booth untuk promosi/pemasaran produk UMKM di ritel modern 	<ul style="list-style-type: none"> ● Potensi kelautan/perikanan yang besar, seperti Paotere (bisa dibuatkan event/festival) ● Pengembangan potensi dengan “0” rupiah APBD 	<p>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pekerjaan Umum</p>

<p>Jangan perpanjang izin jika tidak support UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kurang lahan/sarana pengembangan kreativitas anak muda ● Tidak ada sarana yang memfasilitasi kelompok disabilitas ● Peringkat kedua terendah persentase jumlah penduduk berpendidikan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitasi penertiban bangunan liar ● Fasilitasi akses masyarakat ke pelabuhan rakyat yang dikelola Pelindo ● Hasil olahan UMKM disalurkan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) 	<p>melalui kolaborasi (seperti dengan dewan CSR, perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bisa menyediakan bangunan fisik untuk MCH ● Terdapat 7 kelurahan yang memiliki produk unggulan, 1 diantaranya telah diekspor ke luar negeri 	
--	---	---	--

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Ujung Tanah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Saat ini, pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Ujung Tanah terkendala pemasaran karena terbatasnya akses untuk menembus jaringan ritel modern; berbagai persyaratan yang ketat menyebabkan produk lokal sulit diterima sehingga menghambat peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, di kecamatan Ujung Tanah ini masih kekurangan sarana dan ruang publik untuk pengembangan kreativitas anak muda, serta belum memiliki fasilitas yang mengakomodasi kelompok disabilitas, sehingga inklusi sosial belum terpenuhi secara optimal.

Kondisi tingkat pendidikan juga menjadi tantangan, mengingat Ujung Tanah menempati peringkat kedua terendah dalam persentase penduduk berpendidikan tinggi. Hal ini memperkuat urgensi penyediaan fasilitas peningkatan keterampilan dan wadah kolaborasi yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama pada sektor usaha dan ekonomi kreatif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat membutuhkan kehadiran Creative Hub sebagai pusat pelatihan, promosi, dan pemberdayaan ekonomi kreatif

berbasis pesisir. Melalui pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan yang relevan, pelaku UMKM dapat diperkuat mulai dari tahap produksi hingga pemasaran. Creative Hub juga diharapkan dapat menghadirkan booth khusus yang menjembatani promosi dan pemasaran produk lokal ke ritel modern, sehingga menjadi solusi bagi hambatan masuk pasar yang selama ini dihadapi.

Kecamatan Ujung Tanah memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan Creative Hub. Wilayah ini dikenal sebagai sentra kelautan dan perikanan, terutama dengan keberadaan Pelabuhan Paotere yang menjadi ikon ekonomi dan budaya pesisir yang dapat dikembangkan sebagai event atau festival dengan daya tarik tinggi. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui kolaborasi tanpa ketergantungan pembiayaan APBD, misalnya dengan menggandeng Dewan CSR dan perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan sehingga pembangunan Creative Hub dapat bersifat berkelanjutan. Ketersediaan lahan/bangunan fisik untuk pusat kegiatan menambah keunggulan wilayah ini dalam merealisasikan Creative Hub. Terlebih lagi, terdapat tujuh kelurahan di Ujung Tanah yang telah memiliki produk unggulan—bahkan salah satunya telah diekspor ke luar negeri—yang memperlihatkan bahwa potensi peningkatan daya saing produk lokal sangat tinggi bila ditopang dengan manajemen pemasaran dan fasilitas produksi yang baik.

Fasilitas ini juga berpotensi menjadi pusat layanan inklusif bagi kelompok disabilitas serta ruang pengembangan kreativitas anak muda, mengingat minimnya sarana ekspresi dan pengembangan bakat di wilayah ini. Selain itu, Creative Hub dapat menjadi ruang koordinasi dan fasilitasi penertiban bangunan liar serta pembukaan akses masyarakat ke pelabuhan rakyat yang dikelola Pelindo. Hasil olahan UMKM dapat dioptimalkan pula untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga manfaat ekonomi kreatif dapat terhubung langsung dengan peningkatan kesejahteraan sosial.

Untuk mewujudkan pembangunan Creative Hub tersebut, dibutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat memfasilitasi desain program kegiatan, kurasi event, dan promosi destinasi berbasis kelautan. Dinas Perikanan dan Pertanian dapat memperkuat kapasitas pelaku usaha berbasis hasil laut melalui inovasi pengolahan dan pendampingan teknis. Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam memperluas pemasaran, fasilitasi sertifikasi produk, dan

kemitraan dengan ritel modern maupun jaringan pemasaran lainnya. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam penyediaan dan penataan infrastruktur fisik Creative Hub serta memastikan kenyamanan dan aksesibilitas bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan sinergi lintas sektor ini, Creative Hub akan berfungsi sebagai pusat transformasi kewirausahaan dan ekonomi kreatif yang tidak hanya menyelesaikan persoalan pemasaran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan di Kecamatan Ujung Tanah.

4. Kecamatan Ujung Pandang

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Ujung Pandang memiliki permasalahan jumlah masyarakat yang relatif sedikit dibanding wilayah lainnya di Kota Makassar. Sekalipun demikian, Kecamatan Ujung Pandang justru menjadi salah satu wilayah bagi berkumpulnya kelompok anak jalanan dan gelandangan. Selain itu, masyarakatnya relatif kurang memahami program MCH. Padahal wilayah ini merupakan salah satu *pilot project* MCH saat ini. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Ujung Pandang memiliki sejumlah kebutuhan terkait pengembangan SDM melalui edukasi/pelatihan, yang tidak saja menggali kreativitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan sektor ekonomi. Hal ini penting, mengingat potensi Kecamatan Ujung Pandang sebagai wilayah destinasi wisata warga lokal dan luar daerah, yang didukung dengan adanya sejumlah sentra ekonomi yang dapat memberdayakan UMKM. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6
Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Ujung Pandang

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah masyarakat relatif sedikit ● Terkadang mendengar MCH tapi bingung cara 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan MCH ● Perlu 	<ul style="list-style-type: none"> ● Merupakan salah satu wilayah pilot project MCH yang berjalan saat ini ● Sebagai 	<p>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Ketenagakerjaan</p>

<p>mengaksesnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadi wilayah yang paling banyak dijadikan tempat berkumpul kelompok anak jalanan dan gelandangan 	<p>menghidupkan kembali TPS3R</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edukasi/pelatihan pembuatan barang-barang ekonomis (kompos, perabot hasil daur ulang, dll) • Pelatihan/workshop untuk menggali ide/kreativitas anak muda 	<p>destinasi wisata warga lokal dan luar daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas warga lokal di jam-jam tertentu lebih banyak di luar wilayah (pagi-sore), sementara warga dari luar justru datang ke sini • Relatif banyak UMKM (Penjual Pisang Epe dll) dan komunitas kemasyarakatan (misalnya Komunitas Amana Gappa/Ko Maga) • Kawasan ekonomi perlu dihidupkan kembali (seperti Kanrerong Karebosi, Pasar Terong, dll) • Budidaya Maggot • Kawasan Balang Tonjong bisa dikembangkan jadi pusat ekonomi kekinian (pemancingan, wisata, dll) • Terdapat 5 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya 	<p>yang bisa berkolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar serta Dinas Lingkungan Hidup</p>
---	---	---	---

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Ujung Pandang merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendorong keterlibatan

masyarakat dalam pengelolaan pusat kreasi yang inklusif. Meskipun jumlah penduduk relatif sedikit, wilayah ini menghadapi persoalan sosial seperti maraknya keberadaan anak jalanan dan gelandangan yang menjadikannya sebagai tempat berkumpul. Selain itu, masyarakat lokal masih kurang memahami cara mengakses fasilitas Makassar Creative Hub (MCH) meskipun sudah sering mendengar keberadaannya, sehingga manfaat program belum tersampaikan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih dekat dan partisipatif melalui penyediaan ruang pelatihan, pemberdayaan, dan pendampingan langsung di lingkungan masyarakat agar MCH tidak hanya dikenal, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai ruang pengembangan kreativitas, usaha, dan pemberdayaan sosial.

Kecamatan Ujung Pandang memiliki potensi yang sangat kuat untuk mengembangkan Creative Hub sebagai katalis pertumbuhan ekonomi kreatif. Wilayah ini merupakan salah satu pilot project MCH yang sudah berjalan dan dikenal sebagai destinasi wisata favorit warga lokal maupun luar daerah. Mobilitas penduduk yang tinggi—di mana masyarakat lokal lebih sering beraktivitas di luar wilayah pada pagi–sore hari sementara masyarakat yang berasal dari luar Kecamatan Ujung Pandang datang masuk ke kawasan ini untuk sekedar berwisata ataupun aktivitas lainnya, menjadikan Kecamatan Ujung Pandang ini sebagai titik pertemuan strategis bagi kegiatan ekonomi dan kreatif. Banyaknya UMKM seperti penjual Pisang Epe dan berbagai komunitas masyarakat seperti Komunitas Amana Gappa menunjukkan ketersediaan ekosistem sosial untuk pengembangan usaha berbasis komunitas.

Kawasan perdagangan seperti Kanrerong Karebosi dan Pasar Terong juga dapat dihidupkan kembali sebagai pusat perputaran ekonomi lokal, termasuk melalui peluang budidaya maggot atau pengembangan kawasan Balang Tonjong sebagai pusat ekonomi kekinian berbasis wisata dan rekreasi. Dengan keberadaan produk unggulan wilayah, Creative Hub dapat menjadi penghubung antara produksi, inkubasi usaha, pemasaran, dan inovasi.

Untuk menggali potensi tersebut tersebut, masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang membutuhkan pelibatan aktif dalam pengelolaan Creative Hub, guna membangun rasa memiliki dan menjamin keberlanjutan program. Penghidupan kembali TPS3R sebagai sarana edukasi lingkungan dan ekonomi sirkular menjadi bagian penting

agar masyarakat dapat mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomi seperti kompos, perabot daur ulang, atau produk kreatif lainnya. Selain itu, pelatihan dan workshop untuk menggali kreativitas anak muda perlu diselenggarakan secara rutin untuk membuka peluang usaha baru, sekaligus meminimalisir potensi kerentanan sosial dari kelompok-kelompok berisiko. Melalui pendekatan ini, Creative Hub dapat menjadi ruang inovatif yang memproduksi karya kreatif sekaligus meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Agar Creative Hub di Kecamatan Ujung Pandang berjalan optimal, kolaborasi lintas-organisasi perangkat daerah diperlukan untuk mendukung penguatan ekosistem kreatif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berperan dalam pengembangan program kreatif, kurasi event, dan promosi wisata kawasan. Dinas Koperasi dan UKM dapat mendukung pendampingan usaha dan akses pemasaran bagi pelaku UMKM, sementara Dinas Ketenagakerjaan—melalui kolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar—berperan dalam peningkatan keterampilan masyarakat terutama di bidang yang membuka peluang kerja produktif. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dapat berperan penting dalam pengembangan TPS3R dan ekonomi sirkular berbasis lingkungan. Dengan sinergi semua pihak, Creative Hub dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran, ruang kolaborasi komunitas, pusat inkubasi usaha, serta platform pemberdayaan sosial yang mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat identitas kawasan sebagai pusat kreativitas dan destinasi wisata kota.

5. Kecamatan Makassar

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum masyarakat di Kecamatan Makassar belum memiliki pemahaman yang utuh terkait program MCH. Sekalipun demikian, masyarakat di Kecamatan Makassar memiliki kebutuhan pengembangan SDM melalui sejumlah pelatihan, sebagaimana yang dapat difasilitasi/diwadahi MCH. Hal ini penting, mengingat potensi komunitas kreatif di Kecamatan Makassar yang telah berupaya mengembangkan potensinya, salah satunya melalui pengembangan kawasan kuliner, yang sekalipun belum dapat dilakukan secara konsisten. Selain itu, Kecamatan

Makassar mampu menghasilkan 2 produk unggulan di wilayahnya. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Makassar

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak yang belum paham apa itu MCH 	<ul style="list-style-type: none"> Wadah seperti creative hub yang memfasilitasi pelatihan seperti di BLK 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat grup RT/RW yang berkolaborasi mendirikan pusat kuliner sepanjang Maccini Sawah, namun kurang berkelanjutan Terdapat 2 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya 	<p>Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Makassar menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi terhadap program Makassar Creative Hub (MCH) yang selama ini belum sepenuhnya dipahami oleh warga. Minimnya informasi dan sosialisasi mengenai konsep, fungsi, dan manfaat MCH menyebabkan masyarakat belum melihatnya sebagai sarana strategis untuk peningkatan keterampilan dan pengembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan perlunya fasilitas yang mudah diakses dan dekat dengan warga, sehingga masyarakat tidak hanya mengenal MCH secara terminologi, tetapi benar-benar mampu memanfaatkan keberadaannya untuk mengembangkan kemampuan dan peluang ekonomi mandiri.

Kecamatan Makassar memiliki potensi yang kuat untuk mendukung pengembangan Creative Hub. Salah satu potensi yang perlu dioptimalkan adalah keberadaan grup RT/RW yang sebelumnya berkolaborasi membangun pusat kuliner di sepanjang area Maccini Sawah; meskipun inisiatif ini tidak berlanjut secara berkelanjutan, budaya

kolaborasi tersebut menjadi modal sosial penting untuk menghidupkan kembali aktivitas kewirausahaan berbasis komunitas melalui pendampingan dan fasilitasi Creative Hub. Selain itu, wilayah ini memiliki dua produk unggulan yang menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi kemasan, strategi pemasaran, dan perluasan akses pasar. Bila Creative Hub mampu menghubungkan potensi ini dengan pelatihan dan pemasaran yang tepat, maka Kecamatan Makassar dapat menciptakan rantai ekonomi kreatif yang produktif dan berkelanjutan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, masyarakat Kecamatan Makassar membutuhkan wadah seperti Creative Hub yang memfasilitasi pelatihan keterampilan sebagaimana Balai Latihan Kerja (BLK), tetapi dengan pendekatan yang lebih inklusif, modern, dan berbasis kolaborasi. Sarana ini diharapkan mampu menyediakan pelatihan kewirausahaan, keterampilan kreatif, literasi digital, serta inkubasi usaha agar masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan adanya ruang praktis untuk belajar, berlatih, dan berjejaring, Creative Hub dapat menjadi katalis pembentukan pelaku usaha baru sekaligus memperkuat pelaku UMKM yang sudah berjalan.

Keberhasilan Creative Hub di Kecamatan Makassar membutuhkan sinergi lintas-organisasi perangkat daerah. Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam pendampingan usaha, penyediaan pelatihan manajemen bisnis, fasilitasi pemasaran, hingga perluasan jejaring ritel dan e-commerce. Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat mengembangkan kegiatan kreatif, event promosi, dan kurasi aktivitas berbasis potensi lokal yang mendukung daya tarik ekonomi kreatif wilayah. Kolaborasi kedua OPD ini penting untuk memastikan Creative Hub bukan hanya berdiri sebagai bangunan pelatihan, tetapi benar-benar menjadi ekosistem pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Makassar.

6. Kecamatan Tallo

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Tallo memiliki

permasalahan sosial-kemasyarakatan yang diwarnai dengan konflik destruktif, yang diperparah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Selain itu, belum terdapat sarana/wadah yang mampu memfasilitasi kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Tallo memiliki sejumlah kebutuhan yang mampu mewadahi kreativitas masyarakat dan sejumlah fasilitasi pemasaran UMKM. Hal ini penting, mengingat Kecamatan Tallo memiliki struktur kemasyarakatan yang relatif didominasi kalangan muda produktif. Selain itu, terdapat 1 produk unggulan yang mampu dihasilkan di wilayahnya. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Tallo

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Banyak masalah sosial, pendidikan, ekonomi ● Belum terwadahnya kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas (belum inklusif) ● Tiga besar terendah ketiga persentase jumlah penduduk berpendidikan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlu wadah buat anak muda untuk menyalurkan kreativitas guna mencegah mereka terlibat tindakan kriminal ● Perlu gerai-gerai untuk pemasaran UMKM ● Perlu sarana/fasilitas olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> ● Potensi tanaman bambu untuk industri ● Banyak anak muda ● Terdapat 1 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya 	<p>Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Ketenagakerjaan</p>

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Tallo merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai masalah sosial, pendidikan, dan ekonomi yang selama ini masih kuat dirasakan oleh masyarakat. Kecamatan Tallo termasuk dalam tiga besar daerah terendah persentase penduduknya yang berpendidikan tinggi, sehingga akses terhadap peningkatan keterampilan dan peluang ekonomi masih terbatas. Di sisi lain, kebutuhan kelompok rentan dan penyandang disabilitas belum terakomodasi secara

inklusif akibat ketiadaan ruang kegiatan yang ramah dan partisipatif bagi mereka. Kompleksitas permasalahan ini mendorong perlunya upaya intervensi inovatif melalui penyediaan fasilitas pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi yang dekat dengan warga, terutama generasi muda yang rentan terhadap keterlibatan dalam tindakan kriminal akibat kurangnya ruang positif untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitas.

Kecamatan Tallo memiliki potensi kuat untuk mendukung pembangunan Creative Hub, khususnya karena jumlah anak muda yang besar dapat menjadi motor penggerak kegiatan kreatif dan sosial. Potensi industri bambu juga membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam lokal, mulai dari kerajinan, furnitur, hingga produk dekoratif bernilai jual tinggi. Selain itu, kecamatan ini telah memiliki satu produk unggulan yang dapat dikembangkan lebih jauh melalui inovasi desain, peningkatan kualitas, serta strategi pemasaran. Bila potensi ini dikembangkan dalam kerangka Creative Hub, maka Kecamatan Tallo dapat membangun rantai ekonomi kreatif yang melibatkan pelatihan, produksi, distribusi, dan branding produk unggulan berbasis komunitas.

Masyarakat Kecamatan Tallo membutuhkan kehadiran Creative Hub sebagai wadah yang ramah dan inklusif bagi semua kelompok, termasuk anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas. Creative Hub dapat berfungsi sebagai ruang produktif agar anak muda dapat menyalurkan kreativitasnya melalui pelatihan keterampilan kerja, kelas seni, kegiatan digital kreatif, hingga program komunitas yang membangun karakter positif. Selain itu, kebutuhan akan gerai-gerai pemasaran UMKM dapat difasilitasi melalui ruang penjualan, *showcase* produk, ataupun platform pemasaran digital yang terintegrasi dengan pendampingan usaha. Penyediaan sarana olahraga sebagai bagian dari aktivitas positif dan pembangunan mental generasi muda juga menjadi elemen penting agar Creative Hub mampu menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan kompetitif secara konstruktif.

Untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan terealisasinya manfaat ekonomi kreatif secara berkelanjutan, diperlukan sinergi lintas organisasi perangkat daerah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berperan dalam pendampingan usaha, pengembangan UMKM, hingga perluasan akses pemasaran offline maupun digital. Dinas

Pemuda dan Olahraga dapat mendukung pelaksanaan aktivitas olahraga dan kegiatan kepemudaan untuk mengalihkan risiko perilaku negatif menjadi produktivitas dan kreativitas. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dapat menghadirkan pelatihan kompetensi kerja dan penguatan produktivitas untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja, khususnya generasi muda. Melalui kolaborasi ini, Creative Hub di Kecamatan Tallo akan menjadi pusat solusi sosial-ekonomi yang inklusif, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7. Kecamatan Bontoala

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Bontoala memiliki permasalahan terkait pemasaran produk ekonomi kemasyarakatan. Sekalipun hampir setiap kelurahan menghasilkan produk ekonomi, namun tidak ada diversifikasi produk sehingga relatif mengalami kendala dalam pemasarannya. Selain itu, Kecamatan Bontoala menjadi salah wilayah favorit berkumpulnya anak jalanan, sehingga angka kenalakan remaja yang berujung pada kriminalitas relatif tinggi. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Bontoala memiliki sejumlah kebutuhan, yang dapat memfasilitasi kreativitas kelompok anak muda sekaligus mengembangkan kompetensi mereka di wilayahnya. Selain itu, Kecamatan Bontoala juga membutuhkan fasilitasi dalam bentuk edukasi terhadap pelaku-pelaku UMKM yang dapat mengembangkan usahanya. Hal ini penting, mengingat potensi Kecamatan Bontoala yang struktur kemasyarakatannya relatif didominasi kelompok muda kreatif. Selain itu, terdapat pula sejumlah industri kreatif yang berkembang di wilayah ini, sehingga mampu menghasilkan 2 produk unggulan. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Bontoala

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Ada 12 kelurahan yang memproduksi produk yang sama, sehingga tidak ada produk unggulan untuk dipromosikan ke luar wilayah ● Pemasaran produk (terutama sulit menyalurkan produk-produk hasil daur ulang sampah) ● Persepsi masyarakat yang masih belum paham pentingnya legalitas usaha ● Masih tinggi angka kenalakan remaja yang mengarah pada tindakan kriminalitas ● Terdapat wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya anak jalanan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlu wadah yang menyalurkan kreativitas anak muda (berharap Kec. Bontoala jadi salah satu prioritas MCH) ● Perlu workshop/seminar untuk memantik kreativitas anak muda ● Sosialisasi masuk ke lorong-lorong terkait usaha agar UMKM bisa naik kelas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Banyak anak muda kreatif ● Ada industri kreatif pengolahan sampah daur ulang menjadi kerajinan (botol bekas menjadi bunga), industri konfeksi, perbengkelan, UMKM, dll ● Dapat membangun kerjasama dengan koperasi ● Terdapat 2 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya 	<p>Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan.</p>

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Bontoala menjadi kebutuhan strategis untuk merespons berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah tidak adanya diferensiasi produk antar 12 kelurahan karena semua memproduksi jenis produk UMKM yang sama, sehingga

kesulitan dalam promosi ke luar wilayah dan tidak muncul identitas produk unggulan yang kuat.

Masalah pemasaran juga dialami oleh pelaku usaha, terutama terkait penyaluran produk hasil daur ulang sampah yang masih belum terserap oleh pasar. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha turut menghambat perkembangan UMKM, baik dari sisi akses permodalan, kemitraan, maupun perluasan pasar. Dari aspek sosial, angka kenakalan remaja yang tinggi serta keberadaan wilayah yang menjadi tempat berkumpul anak jalanan menunjukkan perlunya intervensi berbasis pengembangan karakter dan pemberdayaan anak muda untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal maupun pengulangan siklus kemiskinan.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat Kecamatan Bontoala membutuhkan ruang kreatif terpadu yang dapat mendorong aktivitas produktif, inovatif, dan positif bagi anak muda. Creative Hub diharapkan menjadi wadah penyaluran kreativitas, tempat pelatihan keterampilan, dan sarana berkumpul yang sehat untuk menjauhkan remaja dari lingkungan negatif. Workshop, seminar, mentoring usaha, serta pelatihan pengembangan kreativitas menjadi komponen penting yang harus difasilitasi untuk memantik produktivitas generasi muda sekaligus memunculkan ide-ide baru yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha. Selain itu, sosialisasi dan pendampingan usaha yang masuk secara langsung ke lorong-lorong diperlukan agar UMKM mampu naik kelas, memahami pentingnya legalitas usaha, dan memiliki strategi pemasaran modern yang lebih kompetitif.

Dari sisi potensi, sebenarnya Kecamatan Bontoala memiliki modal sosial dan ekonomi kreatif yang besar untuk mendukung pengembangan Creative Hub. Banyak anak muda kreatif yang dapat menjadi motor penggerak berbagai kegiatan pelatihan dan bisnis berbasis industri kreatif. Wilayah ini juga memiliki ekosistem produksi yang variatif, mulai dari industri kreatif pengolahan sampah daur ulang menjadi kerajinan, hingga industri konfeksi, perbengkelan, dan UMKM. Potensi kerja sama dengan koperasi membuka peluang penguatan akses permodalan, distribusi produk, dan pembentukan rantai ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selain itu, keberadaan dua produk unggulan merupakan modal awal untuk mendorong inovasi, branding, dan ekspansi pasar melalui dukungan Creative Hub sebagai pusat pembinaan ekonomi kreatif.

Dalam implementasinya, pembangunan Creative Hub di Kecamatan Bontoala sangat membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga dapat memfasilitasi aktivitas kepemudaan dan program pengembangan kreativitas remaja untuk mencegah perilaku berisiko. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menjadi kunci dalam peningkatan kapasitas usaha, legalitas, pendampingan bisnis, dan akses pemasaran. Dinas Lingkungan Hidup dapat berperan dalam pengembangan industri kreatif berbasis daur ulang sampah sebagai konsep ekonomi sirkular yang bernilai jual. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dapat mendukung pelatihan keterampilan kerja untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja dan meningkatkan peluang kerja bagi generasi produktif. Kolaborasi antar-OPD ini akan menjadikan Creative Hub sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang inklusif, pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas, dan ruang inovasi berkelanjutan bagi Kecamatan Bontoala.

8. Kecamatan Rappocini

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Rappocini mengalami permasalahan terkait kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha terkait legalitas usaha. Selain itu, Kecamatan Rappocini juga menjadi salah satu wilayah favorit berkumpulnya anak jalanan di Kota Makassar. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Rappocini memiliki sejumlah kebutuhan, terutama sarana pendidikan kreatif yang dapat mengembangkan kompetensi masyarakat. Selain itu, dibutuhkan juga fasilitasi pemerintah terkait edukasi dan legalitas usaha kemasyarakatan. Hal ini penting, mengingat Kecamatan Rappocini memiliki potensi UMKM yang dapat memanfaatkan potensi di wilayahnya menjadi produk industri kreatif, sehingga mampu menghasilkan 1 produk unggulan yang telah dipasarkan hingga ke luar negeri. Selain itu, Kecamatan Rappocini juga didukung dengan potensi kemasyarakatan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi terbanyak dibanding wilayah lainnya di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Rappocini

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Banyak pelaku usaha belum punya nomor induk berusaha (NIB) ● Terdapat wilayah yang menjadi lokasi berkumpulnya anak jalanan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlu sarana bagi penggiat konten (konten kreator) ● Perlu ada sarana pendidikan kreatif (seperti pengolahan sampah mandiri, dll) ● Perlu fasilitasi pemerintah dengan model jemput bola terkait legalitas usaha kemasayarakat an 	<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat sejumlah UMKM kreatif. Ada yang diinisiasi PKK Kecamatan (salah satunya bergerak dibidang daur ulang kain perca menjadi kotak tisu bermotif lontara) ● Bank sampah di Gunung Sari, yang mengolah sampah menjadi kerajinan (seperti maket rumah adat, dll) ● Persentase tertinggi jumlah penduduk berpendidikan tinggi (DI-S3) ● Terdapat 1 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya dan telah diekspor ke luar negeri 	<p>Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Potensi yang dimiliki Kecamatan Rappocini memperkuat urgensi pembangunan Creative Hub. Wilayah ini memiliki banyak UMKM kreatif, termasuk yang diinisiasi oleh PKK Kecamatan seperti usaha daur ulang kain perca menjadi kotak tisu bermotif lontara, yang dapat dipromosikan sebagai identitas budaya lokal. Bank sampah di Gunung Sari yang mengolah sampah menjadi kerajinan unik seperti maket rumah adat menunjukkan

peluang besar pengembangan ekonomi sirkular berbasis kreativitas. Selain itu, Rappocini memiliki persentase tertinggi jumlah penduduk berpendidikan tinggi (DI–S3), yang merupakan modal sosial penting untuk menghadirkan ekosistem pengetahuan, mentoring, dan inovasi bagi pelaku usaha maupun anak muda. Produk unggulan wilayah yang telah berhasil menembus pasar ekspor semakin menguatkan posisi Rappocini sebagai hub ekonomi kreatif potensial yang mampu dikembangkan lebih jauh melalui kolaborasi, kurasi produk, dan pembinaan berkelanjutan. Hal ini masih dapat dikembangkan dengan pembangunan Creative Hub.

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Rappocini menjadi urgensi penting untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat urban yang semakin kompleks. Salah satu persoalan utama yang ditemukan ialah masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga menghambat akses mereka terhadap permodalan, kemitraan, dan peluang pemasaran yang lebih luas. Selain itu, terdapat wilayah yang menjadi tempat berkumpul anak jalanan, menunjukkan kebutuhan intervensi sosial berbasis pemberdayaan dan kreativitas untuk memutus rantai kerentanan sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya dikelola secara optimal dan masih membutuhkan sistem pendampingan legalitas usaha serta ruang pengembangan keterampilan yang inklusif dan produktif.

Untuk merespons kebutuhan tersebut, masyarakat Kecamatan Rappocini membutuhkan fasilitas Creative Hub sebagai sarana yang dapat memfasilitasi berbagai pelatihan berbasis kreativitas, teknologi, dan kewirausahaan. Keberadaan sarana untuk penggiat konten (content creator) serta ruang pendidikan kreatif seperti pelatihan pengolahan sampah mandiri menjadi kebutuhan mendesak untuk mengakomodasi minat dan kemampuan generasi muda. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan strategi layanan jemput bola untuk membantu proses legalitas usaha masyarakat—mulai dari pembuatan NIB hingga perizinan lanjutan—agar pelaku UMKM dapat naik kelas dan memiliki daya saing. Creative Hub juga dapat dirancang sebagai pusat kegiatan yang memadukan edukasi keterampilan, inkubasi usaha, dan pembinaan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dalam mendukung terwujudnya Creative Hub, diperlukan sinergi lintas organisasi perangkat daerah agar pemberdayaan masyarakat berjalan komprehensif. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berperan dalam melaksanakan pendampingan usaha, legalitas, pengembangan branding, hingga perluasan pemasaran. Dinas Ketenagakerjaan dapat mengintegrasikan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri kreatif dan ekonomi digital. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkontribusi dalam pembinaan kewirausahaan berbasis keluarga dan kegiatan inklusif yang memberdayakan perempuan dan kelompok rentan. Kolaborasi ini akan mewujudkan Creative Hub sebagai ruang yang tidak hanya mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif tetapi juga menyelesaikan persoalan sosial melalui kreativitas, inovasi, dan pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan.

9. Kecamatan Manggala

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Manggala memiliki permasalahan terkait pengembangan UMKM yang relatif fluktuatif. Selain itu, kecamatan ini juga menjadi salah satu wilayah favorit berkumpulnya gelandangan di Kota Makassar. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Manggala memiliki sejumlah kebutuhan dalam hal pengembangan produk industri, yang mampu menghasilkan produk jadi (tidak sekedar memasarkan bahan mentah). Hal ini penting, mengingat potensi Kecamatan Manggala yang relatif memiliki industri kreatif kemasyarakatan, sehingga mampu menghasilkan 1 produk unggulan di wilayahnya. Selain itu, Kecamatan Manggala juga didukung potensi kemasyarakatan dengan tingkat pendidikan yang tinggi dibanding wilayah lainnya di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 11

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Manggala

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan UMKM masih fluktuatif ● Terdapat wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya gelandangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlu pengembangan industri pengolahan kulit agar tidak sekedar menjual bahan mentah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat industri rumah potong hewan, industri kerajinan perak, dll ● Memiliki jumlah penduduk berpendidikan tinggi yang relatif banyak ● Terdapat 1 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya 	<p>Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup</p>

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Manggala merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan ekonomi dan sosial yang masih menghambat optimalisasi potensi masyarakat. Hingga kini, pengembangan UMKM di wilayah tersebut masih fluktuatif, menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memiliki dukungan ekosistem pemberdayaan yang stabil, baik dari sisi produksi, pemasaran, maupun peningkatan kapasitas. Selain itu, keberadaan wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya gelandangan mencerminkan adanya permasalahan sosial yang membutuhkan intervensi pemberdayaan berbasis inklusi agar masyarakat rentan tidak semakin terpinggirkan. Kondisi ini menandakan pentingnya ruang kreatif berbasis komunitas untuk menghadirkan aktivitas produktif, pembelajaran, dan peningkatan ekonomi yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat.

Dari sisi kebutuhan, Kecamatan Manggala membutuhkan fasilitas pengembangan industri kreatif terutama pada sektor pengolahan kulit. Selama ini masyarakat hanya menjual bahan mentah, sehingga nilai tambah ekonomi belum dimaksimalkan. Creative Hub dapat menjadi ruang pelatihan dan produksi bersama yang memfasilitasi proses

hilirisasi industri pengolahan kulit—mulai dari pembuatan kerajinan, fashion, hingga produk aksesoris—sehingga UMKM setempat lebih berdaya saing. Selain itu, Creative Hub dapat berfungsi sebagai pusat workshop, pendampingan bisnis, kurasi produk, serta ruang interaksi kreatif antar komunitas untuk menciptakan inovasi dan jejaring usaha yang lebih luas.

Potensi ekonomi kreatif Kecamatan Manggala memperkuat urgensi pendirian Creative Hub. Wilayah ini memiliki sejumlah aktivitas industri berbasis kerajinan, termasuk salah satunya adalah rumah potong hewan yang dapat mendukung pemenuhan bahan baku kulit, serta industri kerajinan perak yang dapat dikembangkan lebih profesional melalui desain dan pemasaran kreatif. Jumlah penduduk berpendidikan tinggi yang relatif banyak menjadi modal sosial penting untuk pengembangan kegiatan pelatihan, mentoring, hingga penciptaan startup berbasis kreativitas. Selain itu, keberadaan satu produk unggulan regional membuka peluang ekspansi pasar jika didukung dengan branding, standar mutu, dan pemasaran digital.

Untuk memastikan implementasi Creative Hub berjalan optimal, dibutuhkan kolaborasi antarsektor melalui peran OPD terkait. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berperan dalam pendampingan usaha, legalitas, promosi, hingga penguatan kelembagaan UMKM. Dinas Ketenagakerjaan dapat mendorong pelatihan vokasi berbasis industri kreatif, termasuk pengolahan kulit dan kerajinan, sebagai bagian dari perluasan kesempatan kerja. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dapat mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular dan pemanfaatan limbah kulit serta limbah industri lainnya agar proses kreatif tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sinergi lintas OPD ini sangat penting agar Creative Hub bukan hanya menjadi ruang kreatif, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pusat pemberdayaan sosial di Kecamatan Manggala.

10. Kecamatan Tamalanrea

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Tamalanrea memiliki permasalahan terkait kompetensi SDM dalam mengelola dan mengembangkan UMKM, yang diperparah dengan kurangnya minat generasi muda dalam mengembangkan

keahlian/keterampilannya. Selain itu, UMKM di wilayah ini juga masih mengalami kendala soal pemasaran serta kurangnya sarana/prasarana usaha bagi kelompok rentan dan disabilitas. Bahkan, kecamatan ini juga menjadi salah satu wilayah favorit bagi berkumpulnya gelandangan. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Tamalanrea memiliki sejumlah kebutuhan, terutama yang memfasilitasi tidak saja peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM UMKM, tetapi juga kelompok anak muda serta kelompok rentan dan disabilitas, mengingat rendahnya animo masyarakat dalam mengembangkan kompetensi/skillnya. Hal ini penting, mengingat potensi Kecamatan Tamalanrea yang memiliki UMKM yang banyak, yang didukung potensi tenaga kerja yang relatif banyak dalam hal kuantitas. Bahkan, kelompok rentan dan disabilitas di wilayah ini mampu menghasilkan produk industri kerajinan, yang juga didukung sejumlah stakeholder yang mampu memfasilitasi pengembangan kompetensi kemasyarakatan. Kecamatan ini juga memiliki wilayah yang dapat dikembangkan potensi pariwisata dan potensi industri ekonomi kreatif lainnya. Selain itu, kecamatan ini juga didukung dengan kondisi masyarakat yang relatif memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dibanding wilayah lainnya di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Tamalanrea

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Andai UMKM dipusatkan di satu tempat (seperti CFD), sulit mengatur jadwal bergilir untuk jualan ● Kurang sarana/prasarana usaha untuk kelompok rentan dan disabilitas ● Produk UMKM masih sulit masuk dalam ritel ● Masih kurang SDM kompeten 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlu dukungan sarana/prasarana pemasaran untuk usaha kelompok rentan dan disabilitas ● Perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM UMKM (salah satunya IRT) ● Perlu inisiasi lebih dari 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan wilayah majemuk ● Ada kawasan wisata Lantebung (mangrove) ● Banyak UMKM, terutama di kawasan BTP (terutama kuliner) ● Kelompok rentan dan disabilitas mampu menghasilkan produk UMKM (menjahit dan permak pakaian, tas dll) 	<p>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup</p>

<p>dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Banyak anak muda seperti kekurangan minat mengembangkan skill nya ● Kurangnya minat masyarakat dalam industri pengolahan sampah ● Terdapat lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya gelandangan 	<p>pemerintah untuk pengembangan UMKM, seni-budaya, dll (jemput bola), karena banyak masyarakat apatis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Potensi tenaga kerja relatif tinggi (terutama kalangan IRT) ● Banyak pihak eksternal yang mau memfasilitasi pengembangan skill SDM ● Ada potensi untuk industri pengolahan sampah ● Peringkat kedua persentase jumlah penduduk berpendidikan tinggi di Kota Makassar ● Terdapat 1 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya dan telah diekspor ke luar negeri 	
---	--	---	--

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Tamalanrea menjadi kebutuhan strategis untuk mengatasi berbagai persoalan sosial-ekonomi yang masih menghambat kemajuan komunitas UMKM dan generasi muda. Permasalahan utama yang muncul antara lain sulitnya penyusunan sistem pemasaran bersama ketika UMKM dipusatkan di satu lokasi seperti car free day, sehingga distribusi pendapatan tidak merata. Selain itu, masih minimnya sarana dan prasarana usaha bagi kelompok rentan dan disabilitas menyebabkan mereka belum mendapatkan ruang layak untuk mengembangkan keterampilan dan produktivitas ekonomi. Produk UMKM juga masih kesulitan masuk ke ritel modern karena keterbatasan standar produk, legalitas, dan kapasitas produksi. Di sisi lain, kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan UMKM dan rendahnya minat anak muda mengembangkan skill memperlihatkan perlunya ekosistem edukasi

kreatif yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat. Ditambah lagi, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam industri pengolahan sampah serta keberadaan wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya gelandangan menunjukkan kebutuhan intervensi sosial berbasis pemberdayaan dan kreativitas.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Kecamatan Tamalanrea membutuhkan Creative Hub yang dapat menjadi pusat pelatihan, pemasaran, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan Creative Hub akan memungkinkan peningkatan sarana pemasaran UMKM, termasuk bagi kelompok rentan dan disabilitas, yang perlu diberikan ruang yang setara dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen bisnis, produksi, digital marketing, hingga penyusunan legalitas usaha menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong UMKM naik kelas, khususnya rumah tangga industri (IRT) yang selama ini menjalankan usaha dalam skala kecil. Banyaknya masyarakat yang masih apatis terhadap program pemerintah juga menunjukkan bahwa dibutuhkan pola pendekatan jemput bola untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat.

Kecamatan Tamalanrea memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar untuk dikembangkan melalui Creative Hub. Wilayah yang majemuk secara sosial ini memiliki pusat wisata alam berupa Kawasan Wisata Mangrove Lantebung yang dapat dikolaborasikan dengan sektor ekonomi kreatif untuk menarik wisatawan dan memperluas pasar lokal. UMKM berkembang pesat terutama di kawasan Perumahan BTP (dominan sektor kuliner), menunjukkan peluang pembentukan klaster kuliner berbasis inovasi dan branding.

Kelompok rentan dan disabilitas telah membuktikan kemampuan menghasilkan produk seperti jahit, permak pakaian, dan tas, sehingga Creative Hub dapat menjadi ruang inklusi sosial dan showcase keterampilan mereka. Potensi tenaga kerja, terutama dari kalangan ibu rumah tangga (IRT), serta kehadiran banyak pihak eksternal yang siap memfasilitasi peningkatan skill merupakan modal besar untuk menciptakan ekosistem pelatihan berkelanjutan. Selain itu, adanya peluang industri pengolahan sampah serta peringkat kedua penduduk berpendidikan tinggi di Kota Makassar menegaskan bahwa Tamalanrea memiliki sumber daya manusia dan peluang inovasi yang kuat. Produk

unggulan wilayah yang telah berhasil masuk pasar ekspor menjadi indikator kesiapan untuk peningkatan daya saing UMKM melalui pendampingan yang tepat.

Untuk mewujudkan Creative Hub yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, diperlukan sinergi lintas OPD. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat mengembangkan event, promosi destinasi, dan ekosistem ekonomi kreatif agar produk dan keterampilan masyarakat terserap pasar. Dinas Koperasi dan UKM berperan pada peningkatan legalitas, penyusunan badan usaha, kurasi produk, dan interkoneksi dengan ritel modern. Dinas Ketenagakerjaan dapat memastikan pelatihan peningkatan keterampilan kerja melalui pendekatan vokasi yang sesuai kebutuhan industri kreatif dan digital. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dapat mengintegrasikan program pengolahan sampah menjadi peluang usaha berbasis circular economy. Dengan koordinasi dan keberlanjutan program, Creative Hub di Kecamatan Tamalanrea dapat menjadi pusat ekonomi kreatif yang inklusif, membuka peluang kerja, mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Makassar secara signifikan.

11. Kecamatan Biringkanaya

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Biringkanaya termasuk wilayah yang relatif rawan akan konflik sosial kemasyarakatan, yang juga menjadi salah satu wilayah favorit tempat berkumpulnya anak jalanan dan gelandangan. Selain itu, masyarakat di wilayah ini relatif belum memahami program MCH. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Biringkanaya memiliki sejumlah kebutuhan terkait pengembangan kompetensi kemasyarakatan yang dapat difasilitasi MCH dengan kemudahan akses atas pemanfaatannya. Hal ini penting, mengingat potensi Kecamatan Biringkanaya yang mampu menghasilkan 6 produk unggulan di wilayahnya, yang 4 diantaranya telah dipasarkan hingga ke luar negeri, yang didukung dengan kondisi kemasyarakatan yang relatif banyak berpendidikan tinggi. Selain itu, pemerintah setempat juga telah memiliki program yang bertujuan mewadahi aktivitas kepemudaan, yang tentunya sejalan dengan program MCH. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 13

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Biringkanaya

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Masih banyak yang belum paham apa itu MCH ● Terdapat sejumlah lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya anak jalanan dan gelandangan ● Menjadi wilayah yang relatif rawan perkelahian massal (antar kelompok masyarakat dan antar pelajar/mahasiswa) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlu kemudahan akses bagi masyarakat terhadap MCH ● Pelatihan untuk UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sudah ada penyampaian awal terkait lokasi pembangunan MCH ● Ada program gelanggang remaja, yang mewadahi aktivitas olahraga anak muda (namun fasilitasnya masih dalam proses pengembangan) ● Memiliki jumlah penduduk berpendidikan tinggi yang relatif banyak ● Terdapat 6 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya, 4 diantaranya telah diekspor ke luar negeri 	<p>Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UKM</p>

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Kecamatan Biringkanaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif. Sudah ada penyampaian awal lokasi pembangunan MCH, yang memperlihatkan bahwa wilayah ini telah masuk dalam prioritas pengembangan kreativitas berbasis komunitas. Program gelanggang remaja yang telah mewadahi aktivitas olahraga anak muda juga dapat dikolaborasikan dengan keberadaan

Creative Hub sebagai ruang pengembangan minat, bakat, sportainment, dan event berbasis komunitas. Selain itu, jumlah penduduk berpendidikan tinggi yang relatif banyak menjadi modal sosial penting untuk mengembangkan ekosistem inovasi, mentoring, dan wirausaha kreatif. Biringkanaya juga mencatat pencapaian signifikan dengan lahirnya enam produk unggulan, empat diantaranya telah berhasil menembus pasar ekspor, sehingga kehadiran Creative Hub sangat potensial untuk mempercepat ekspansi pasar, mendorong standar produksi, dan meningkatkan kualitas UMKM.

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Biringkanaya menjadi kebutuhan penting untuk menanggapi tantangan sosial dan ekonomi yang masih cukup dominan di wilayah tersebut. Hingga kini, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep Makassar Creative Hub (MCH), sehingga manfaat dan peluang yang sebenarnya dapat mereka peroleh belum tersosialisasi secara optimal. Selain itu, keberadaan sejumlah lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya anak jalanan dan gelandangan mencerminkan persoalan sosial yang membutuhkan intervensi berbasis pemberdayaan dan inklusi. Wilayah ini juga dikenal relatif rawan perkelahian massal, baik antar kelompok masyarakat maupun antar pelajar/mahasiswa, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyediakan ruang ekspresi positif bagi anak muda agar energi sosial mereka dapat diarahkan ke kegiatan produktif. Kondisi ini secara keseluruhan menegaskan perlunya platform kreatif di tingkat kecamatan yang dapat menjadi solusi edukatif, kolaboratif, dan ekonomi bagi masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, masyarakat Kecamatan Biringkanaya memerlukan kemudahan akses terhadap Creative Hub agar seluruh kalangan—termasuk anak muda, pelaku UMKM, dan kelompok rentan—dapat memanfaatkannya tanpa hambatan. Ketersediaan pelatihan UMKM juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam pengelolaan usaha, inovasi produk, pemasaran digital, hingga perluasan jejaring bisnis. Kemudahan akses dan kualitas program pelatihan menjadi kunci untuk mengubah minat masyarakat dari sekadar partisipan menjadi pelaku aktif dalam ekosistem ekonomi kreatif. Creative Hub diharapkan menjadi ruang yang mampu menumbuhkan kreativitas sekaligus menghadirkan kegiatan yang menjauhkan masyarakat dari konflik sosial, mendorong kohesi sosial, serta membuka peluang pendapatan dan lapangan kerja.

Keberhasilan pembangunan Creative Hub di Kecamatan Biringkanaya membutuhkan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Pemuda dan Olahraga dapat mendorong program pembinaan anak muda dan event berbasis komunitas agar energi positif dan kreativitas mereka tersalurkan dengan baik. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat mengembangkan ekosistem kegiatan kreatif, promosi produk, event lokal, hingga pengembangan klaster industri kreatif unggulan untuk memperluas potensi ekonomi masyarakat. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM memegang peran penting dalam pendampingan usaha, pembinaan legalitas, peningkatan kualitas produk, hingga integrasi UMKM dengan pasar yang lebih besar. Kolaborasi lintas OPD ini akan memastikan Creative Hub tidak hanya menjadi ruang fisik, tetapi juga motor penggerak kreativitas, pemberdayaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kecamatan Biringkanaya.

12. Kecamatan Panakukkang

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum masyarakat di Kecamatan Panakukkang belum memiliki pemahaman yang utuh terkait program MCH. Selain itu, UMKM di wilayah ini relatif terkendala soal pemasaran, yang diperparah dengan skill SDM yang relatif kurang. Bahkan, wilayah ini menjadi salah satu tempat favorit berkumpulnya anak jalanan dan gelandangan, yang pada gilirannya menghasilkan perilaku menyimpang anak muda. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Panakukkang memiliki sejumlah kebutuhan yang tidak saja mampu mengembangkan kompetensi kemasyarakatan sehubungan dengan industri ekonomi, tetapi juga yang mampu memfasilitasi pengembangan kebudayaan. Bahkan, dibutuhkan wadah yang mampu mengakomodir kepentingan UMKM dari luar wilayah/luar Makassar. Hal ini penting, mengingat potensi Kecamatan Panakukkang yang relatif memiliki banyak UMKM atau menjadi market UMKM, sekalipun kebanyakan diantaranya merupakan industri rumahan. Selain itu, wilayah ini juga relatif memiliki potensi seni-budaya yang dapat dikembangkan menjadi industri kreatif kemasyarakatan. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Panakukkang

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak yang belum paham apa itu MCH • UMKM rumahan terkendala pemasaran • Skill SDM UMKM relatif kurang • Banyak anak muda yang salah pergaulan (isap lem, dll) • Terdapat wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya anak jalanan dan gelandangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diakomodir UMKM yang ada, baik internal Panakukkang maupun dari luar wilayah/luar makassar dalam MCH, termasuk untuk pengembangan produk • Perlu mini library untuk meningkatkan literasi masyarakat, khususnya terkait budaya • Perlu pelatihan untuk anak muda (mural, kaos oblong, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak UMKM (kurang lebih 1000) yang nampak dalam CFD Boulevard • Relatif banyak hasil produksi UMKM (yang dijalankan IRT) • Ada budidaya maggot • UMKM makanan khas di Kampung Rama • Pengembangan seni dan budaya di kawasan Paropo • Co-Working Space dalam bentuk warkop relatif banyak • Terdapat 2 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya 	<p>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan</p>

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Panakukkang menjadi urgensi strategis mengingat masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Makassar Creative Hub (MCH), keterbatasan pemasaran UMKM rumahan, dan rendahnya kompetensi SDM pelaku usaha. Di saat yang sama, kecamatan ini juga menghadapi masalah sosial seperti penyalahgunaan zat oleh anak muda serta keberadaan titik berkumpulnya anak jalanan dan gelandangan. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya intervensi berbasis ruang kreatif yang dapat menjadi wadah pembinaan ekonomi dan pembinaan karakter generasi muda. Berdasarkan kebutuhan lapangan, Creative Hub dirancang untuk

mengakomodasi UMKM lokal maupun dari luar wilayah, terutama dalam pengembangan dan promosi produk, menyediakan mini library berbasis literasi budaya, serta menghadirkan pelatihan kreativitas bagi anak muda seperti mural, produksi kaos oblong, dan bidang seni lainnya.

Potensi Panakkukang sangat mendukung keberadaan hub ini karena memiliki sekitar 1000 UMKM yang aktif saat CFD Boulevard, berbagai produk yang dihasilkan oleh IRT, UMKM makanan khas dari Kampung Rama, kegiatan seni dan budaya di kawasan Paropo, hingga budidaya maggot berbasis ekonomi sirkular. Keberadaan banyak co-working space berbasis warkop menunjukkan kultur kolaboratif yang dapat disinergikan menuju pembentukan ekosistem kreatif formal. Untuk memastikan pembangunan Creative Hub berjalan komprehensif dan berkelanjutan, sejumlah OPD perlu berperan sebagai leading dan supporting sector, antara lain Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pembinaan industri kreatif, Dinas Koperasi dan UKM untuk penguatan usaha kecil menengah, Dinas Lingkungan Hidup untuk mendorong inovasi berbasis ekonomi hijau seperti budidaya maggot, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pemberdayaan IRT dan proteksi kelompok rentan, serta Dinas Ketenagakerjaan untuk peningkatan kemampuan kerja dan pelatihan teknis. Dengan sinergi seluruh potensi dan kolaborasi OPD, Creative Hub di Panakkukang diharapkan menjadi ruang ekonomi kreatif terpadu yang bukan hanya memperkuat daya saing UMKM, tetapi juga membangun budaya literasi, memperkuat karakter anak muda, dan menjadi ruang publik yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Untuk merealisasikan pengembangan Creative Hub ini, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dapat berperan aktif antara lain Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Ketenagakerjaan. Kerja sama antara OPD ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam program-program yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Panakkukang. Dengan pendekatan yang terpadu, diharapkan Creative Hub dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

13. Kecamatan Mamajang

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Mamajang memiliki polemik terkait terbatasnya lahan/wilayah/ruang yang dapat diesplorasi, yang diperparah dengan kurangnya sarana/prasarana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan industri. Bahkan, kecamatan ini termasuk salah satu wilayah yang rawan akan konflik sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Mamajang memiliki kebutuhan yang dapat diwadahi/difasilitasi MCH, yang melibatkan aktivitas pengembangan SDM melalui pelatihan, *co-working space*, dan bahkan *makerspace*. Hal ini penting, mengingat potensi Kecamatan Mamajang yang merupakan kawasan perdagangan. Selain itu, di wilayah ini terdapat UMKM center dan telah mampu menghasilkan 2 produk unggulan, yang salah satunya telah dipasarkan ke luar negeri. Selain itu, wilayah ini juga didukung dengan banyaknya komunitas/kelompok kepemudaan. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Mamajang

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none">• Lahan terbatas (wilayah relatif sempit)• Kurang sarana/prasarana untuk kegiatan komunitas sosial-kemasyarakatan (sehingga aktivitas/kegiatan justru ke luar kota)• Tidak ada rumah produksi khusus industri kerajinan• Termasuk wilayah yang rawan perkelahian massal (antar kelompok	<ul style="list-style-type: none">• Perlu Ruang Terbuka Hijau (RTH)• Perlu galeri di MCH untuk pameran produk UMKM• Ruang-ruang pelatihan (multimedia, fotografi, marketing, dll)• Perlu <i>co-working space</i>, kafe tempat berkumpulnya content creator (ada ruang	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan perdagangan• Terdapat 2 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya, 1 diantaranya telah diekspor ke luar negeri (hasil industri olahan enceng gondok sebagai kerajinan misalnya miniatur becak, phinisi, dll)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan

<p>masyarakat, antar kelurahan, maupun pelajar/mahasiswa)</p>	<p>produksi ringan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perlu pelatihan terkait pemasaran (seperti website UMKM, dll) karena produk sudah sampai ke luar negeri lewat tamu-tamu hotel ● Perlu ada festival yang dapat memanfaatkan kanal (festival kanal) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Banyak organisasi kepemudaan ● Terdapat galeri UMKM center di Sungai Saddang ● Ada potensi anggaran di pusat melalui kementerian pariwisata/BEK terkait MCH ● Terdapat sejumlah co-working space yang dapat dirangkul 	
---	--	--	--

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, memerlukan analisis yang mendalam terkait permasalahan, kebutuhan, potensi, dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah terbatasnya lahan di wilayah yang relatif sempit, kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan komunitas sosial-kemasyarakatan, serta tidak adanya rumah produksi khusus untuk industri kerajinan. Selain itu, Kecamatan Mamajang juga dikenal sebagai wilayah yang rawan perkelahian massal, baik antar kelompok masyarakat maupun di kalangan pelajar dan mahasiswa, yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Dari analisis tersebut, muncul kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat digunakan oleh masyarakat, serta galeri di dalam Creative Hub untuk memamerkan produk-produk UMKM. Selain itu, diperlukan ruang pelatihan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan di bidang multimedia, fotografi, dan pemasaran. Ketersediaan co-working space dan kafe sebagai tempat berkumpul bagi content creator juga sangat penting, termasuk ruang produksi ringan yang dapat mendukung kreativitas. Pelatihan pemasaran, seperti pembuatan website UMKM, diperlukan karena produk lokal telah mencapai pasar internasional melalui tamu-

tamu hotel. Di samping itu, pengadaan festival yang memanfaatkan kanal di wilayah tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri.

Di sisi lain, potensi yang ada di Kecamatan Mamajang sangat menjanjikan. Kawasan perdagangan yang berkembang pesat, serta adanya dua produk unggulan, salah satunya yang telah diekspor ke luar negeri, menunjukkan adanya kreativitas yang dapat dimanfaatkan. Produk kerajinan dari olahan enceng gondok, seperti miniatur becak dan phinisi, menjadi contoh nyata dari potensi yang dapat dikembangkan. Selain itu, keberadaan banyak organisasi kepemudaan dan galeri UMKM center di Sungai Saddang menunjukkan adanya dukungan komunitas yang kuat. Terdapat juga potensi anggaran dari pusat melalui kementerian pariwisata atau Badan Ekonomi Kreatif (BEK) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan Creative Hub. Sejumlah co-working space yang sudah ada juga dapat dirangkul untuk menciptakan ekosistem yang lebih kolaboratif.

Kecamatan Mamajang memiliki berbagai potensi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu yang paling menonjol adalah produk unggulan berupa kerajinan dari olahan enceng gondok, seperti miniatur becak dan phinisi, yang telah sukses diekspor ke luar negeri. Selain itu, kawasan perdagangan yang aktif di Mamajang menciptakan peluang bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas. Keberadaan banyak organisasi kepemudaan juga berperan penting sebagai penggerak dalam berbagai kegiatan kreatif dan inovatif. Galeri UMKM center di Sungai Saddang dapat dimanfaatkan untuk memamerkan produk lokal, menarik perhatian pengunjung, dan meningkatkan daya jual. Terdapat pula beberapa co-working space yang mendukung kolaborasi antara pelaku usaha, content creator, dan komunitas kreatif lainnya. Potensi sumber daya manusia yang memiliki bakat dan keterampilan dalam seni dan kerajinan dapat diberdayakan untuk memperkuat industri kreatif. Di samping itu, kesempatan untuk mengadakan festival yang memanfaatkan kanal di wilayah ini dapat menarik wisatawan dan meningkatkan kesadaran akan produk lokal. Dengan produk yang sudah menembus pasar internasional, Mamajang memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Untuk merealisasikan pengembangan Creative Hub ini, beberapa OPD yang dapat berkontribusi secara signifikan antara lain Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perdagangan. Kerja sama antara OPD ini sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan program-program yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mamajang. Melalui pendekatan yang integratif, diharapkan Creative Hub dapat menjadi pusat inovasi dan kreativitas yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat setempat.

14. Kecamatan Tamalate

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Tamalate memiliki permasalahan terkait generasi muda dengan skill yang relatif kurang, yang juga menjadi salah satu wilayah favorit bagi berkumpulnya anak jalanan dan gelandangan. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Tamalate membutuhkan wadah yang dapat memfasilitasi pengembangan seni-budaya, mengedukasi kelompok anak muda, merangkul kelompok rentan dan disabilitas, serta mengembangkan kompetensi masyarakat terkait pengelolaan SDA kelautan, yang kesemuanya itu dapat difasilitasi MCH. Hal ini penting, mengingat potensi Kecamatan Tamalate yang merupakan kawasan pesisir dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, yang mayoritasnya merupakan kalangan usia produktif. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi pariwisata, seni-budaya, yang didukung lembaga pelatihan keterampilan yang relatif lengkap, sehingga wilayah ini mampu menghasilkan 8 produk unggulan, yang 1 diantaranya telah dipasarkan ke luar negeri. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 16

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Tamalate

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Anak muda kekurangan skill ● Memiliki sejumlah wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya anak jalanan dan gelandangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlu wadah untuk menyatukan komunitas seni-budaya ● Perlu merangkul kelompok rentan dan disabilitas melalui kegiatan yang dapat menjauhkan diri dari pergaulan negatif ● Perlu edukasi dan literasi terkait kepemudaan ● Perlu edukasi terkait pengelolaan SDA Kelautan ● Perlu pelatihan terkait perhotelan, perbengkelan, dll 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan Pesisir dengan jumlah penduduk yang relatif banyak ● Terdapat kampung budaya di kawasan Daeng Tata III ● Kegiatan seni-budaya relatif aktif ● Tiap kelurahan beda karakteristiknya ● Banyak usia produktif ● Banyak potensi wisata (CPI, perbatasan, dll) dan industri perhotelan ● Merupakan wilayah yang memiliki lembaga pelatihan keterampilan yang relatif lengkap (bahasa asing, komputer, tata busana, kecantikan, otomotif, elektronika, dll) ● Terdapat 8 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya, 1 diantaranya telah diekspor ke luar negeri 	<p>Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Dinas Ketenagakerjaan</p>

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Dalam upaya pengembangan Creative Hub di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, terdapat beberapa analisis yang perlu dipertimbangkan terkait permasalahan, kebutuhan, potensi, dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab. Permasalahan yang dihadapi di wilayah ini mencakup kekurangan skill di kalangan anak muda, serta keberadaan sejumlah wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya anak jalanan dan gelandangan, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat pengembangan komunitas.

Dari situasi tersebut, muncul kebutuhan yang jelas untuk menciptakan wadah yang dapat menyatukan komunitas seni-budaya, yang bisa menjadi platform bagi ekspresi kreatif dan kolaborasi. Selain itu, penting untuk merangkul kelompok rentan dan disabilitas melalui kegiatan yang dapat menjauhkan mereka dari pergaulan negatif. Edukasi dan literasi terkait kepemudaan juga menjadi aspek penting untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan yang memadai. Pengelolaan sumber daya alam kelautan juga harus diajarkan, mengingat potensi yang ada di kawasan pesisir. Pelatihan di bidang perhotelan, perbengkelan, dan keterampilan lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing anak muda di pasar kerja.

Di sisi lain, potensi yang dimiliki Kecamatan Tamalate sangat menguntungkan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Kawasan pesisir dengan jumlah penduduk yang relatif banyak memberikan peluang untuk pengembangan komunitas. Terdapat kampung budaya di kawasan Daeng Tata III dan kegiatan seni-budaya yang relatif aktif, yang menunjukkan adanya dukungan komunitas terhadap kreativitas. Setiap kelurahan di Tamalate memiliki karakteristik yang unik, dan banyaknya usia produktif menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar. Selain itu, banyak potensi wisata, seperti CPI dan perbatasan, serta industri perhotelan yang berkembang, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kecamatan ini juga memiliki lembaga pelatihan keterampilan yang lengkap, mulai dari bahasa asing, komputer, tata busana, kecantikan, otomotif, hingga elektronika. Terdapat pula delapan produk unggulan yang dihasilkan di wilayah tersebut, satu di antaranya telah diekspor ke luar negeri.

Untuk merealisasikan pengembangan Creative Hub ini, beberapa OPD yang dapat berperan aktif adalah Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Ketenagakerjaan.

Kerja sama antara OPD ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam program-program yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tamalate. Dengan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif, diharapkan Creative Hub dapat menjadi pusat inovasi dan kreativitas yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat setempat.

Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat krusial dalam mendukung pembangunan Creative Hub di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dinas Perikanan dan Pertanian, misalnya, dapat berkontribusi melalui pengembangan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi lokal, dengan memberikan pelatihan terkait kelautan dan pertanian. Sementara itu, Dinas Kebudayaan berfokus pada pelestarian budaya lokal dengan mengorganisir kegiatan seni dan budaya yang menarik minat masyarakat serta wisatawan. Dinas Koperasi dan UKM memainkan peran penting dalam pendampingan usaha kecil, memberikan pelatihan dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertanggung jawab untuk mempromosikan wisata dan kreativitas, serta mendorong kolaborasi antara pelaku industri kreatif dan sektor pariwisata. Dinas Ketenagakerjaan juga berperan penting dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang relevan dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Selain itu, koordinasi antara OPD diperlukan untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan saling mendukung dan terintegrasi. Dengan kolaborasi yang efektif, pembangunan Creative Hub di Kecamatan Tamalate diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kreativitas, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan memberdayakan ekonomi lokal.

15. Kecamatan Mariso

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian melalui sejumlah instrumen pengumpulan data didapatkan, bahwa secara umum Kecamatan Mariso merupakan salah satu wilayah dengan permasalahan sosial yang relatif kompleks, mulai dari darurat pedagang kaki lima (PKL), tingkat kemiskinan ekstrim, kriminalitas-premanisme yang relatif tinggi, yang diperparah dengan belum adanya lembaga keterampilan eksternal yang dapat mewadahi pengembangan kompetensi kemasyarakatan. Berdasarkan hal itu, Kecamatan Mariso memiliki sejumlah kebutuhan yang dapat memfasilitasi

pengembangan kompetensi ketenagakerjaan/industri ekonomi kreatif, yang juga dapat merangkul kelompok rentan dan disabilitas. Selain itu, dibutuhkan pula wadah yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan *event/festival*. Hal ini penting, mengingat potensi Kecamatan Mariso yang memiliki potensi industri kuliner, seni-budaya dan kerajinan, sehingga mampu menghasilkan 2 produk unggulan. Hal ini sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 17

Hasil Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi Kecamatan Mariso

Permasalahan	Kebutuhan	Potensi	OPD Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ● Darurat PKL (di mana ada lahan kosong, di situ PKL menjual) ● Masih banyak masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrim ● Belum ada lokasi yang ditunjuk untuk MCH ● Kriminalitas-premanisme masih relatif tinggi ● Belum ada lembaga keterampilan (<i>skill course</i>) eksternal yang dapat mewadahi pengembangan kompetensi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlu drainase ● Perlu pelatihan terkait pengelolaan UMKM ● Perlu pengembangan kerajinan bordir ● Perlu wadah untuk penyelenggaraan festival-festival ● Perlu diperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas ● Perlu pelatihan ketenagakerjaan (seperti satpam untuk mengurangi kriminalitas/premanisme) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat sejumlah UMKM (terutama kuliner) ada juga kerajinan ● Terdapat potensi kegiatan seni kemasyarakatan ● Terdapat 2 produk unggulan yang dihasilkan di wilayahnya 	<p>Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>

Sumber : Data FGD Peneliti, Tahun 2025

Pembangunan Creative Hub di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat

setempat. Saat ini, terdapat darurat pedagang kaki lima (PKL) di mana lahan kosong dimanfaatkan untuk berjualan, serta tingginya tingkat kemiskinan ekstrim yang mengharuskan adanya perhatian serius. Selain itu, belum adanya lokasi yang ditunjuk untuk MCH (Masyarakat Cinta Hasil) dan tingginya angka kriminalitas serta premanisme semakin memperburuk situasi. Dalam konteks ini, kebutuhan mendesak muncul, di antaranya pelatihan pengelolaan UMKM, pengembangan kerajinan bordir, dan penyediaan wadah untuk festival-festival yang dapat menghidupkan kreativitas masyarakat. Tak kalah penting adalah perhatian terhadap kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas, serta pelatihan ketenagakerjaan, seperti pelatihan untuk satpam, guna mengurangi tingkat kriminalitas.

Kecamatan Mariso memiliki potensi yang signifikan, termasuk keberadaan sejumlah UMKM, terutama di sektor kuliner, dan potensi kegiatan seni kemasyarakatan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Terdapat juga dua produk unggulan yang dihasilkan dari wilayah ini, yang bisa menjadi daya tarik dalam pengembangan ekonomi lokal. Untuk mendukung pembangunan Creative Hub ini, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan berperan aktif. Dinas Koperasi dan UKM dapat memberikan pelatihan pengelolaan usaha kecil, sedangkan Dinas Kebudayaan akan berfokus pada pengembangan kegiatan seni dan budaya setempat. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dapat berkontribusi dalam promosi dan pelaksanaan festival-festival yang dapat menarik minat masyarakat dan wisatawan. Dengan kolaborasi berbagai OPD ini, diharapkan Creative Hub di Kecamatan Mariso tidak hanya menjadi pusat kreativitas, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, dan pengurangan kemiskinan di daerah tersebut.

4.1.4. Pembahasan Sinkronisasi Kebijakan Makassar *Creative Hub*

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sinkronisasi kebijakan dalam penelitian ini terkait dengan dua hal. Pertama, sinkronisasi antara kebijakan/program strategis Pemkot Makassar, dalam hal ini program MCH dengan stakeholder terkait, terutama yang berada di lingkup kecamatan sebagai target utama/sasaran program, sehingga tercipta harmonisasi dalam kesatuan arah dan tujuan implementasi program. Kedua, sinkronisasi antara sesama stakeholder level kecamatan

dalam memetakan permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang ada di setiap kecamatan, yang memberi data/informasi signifikan sebagai basis pembentukan *creative hub* di setiap kecamatan. Adapun terkait kedua hal ini, dapat dielaborasi sebagai berikut.

Pertama, sinkronisasi antara kebijakan/program MCH dengan kecamatan sebagai target pembangunan MCH. Terkait hal ini, hasil penelusuran data mengungkapkan bahwa terdapat sinkronisasi yang relatif baik antara program MCH dengan kecamatan selaku target pembangunan MCH. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan seluruh perwakilan pemerintah kecamatan yang seluruhnya relatif telah memiliki pemahaman yang mendasar atas program MCH. hal ini sebagaimana nampak dalam uraian berikut.

“...kami sudah banyak melakukan MOU di wilayah kami terkait kegiatan tersebut...salah satunya antara Lembaga Asian Nusantara dengan Pemkot Makassar...Di wilayah kami juga akan dibangun creative hub...salah satunya ada fasilitas pertunjukan...”

(Sumber: Hasil FGD dengan perwakilan pemerintah Kecamatan Wajo)

Hasil penelusuran data lainnya juga mendapatkan hal yang relatif senada, yang kian memberikan pemahaman bahwa pemerintah lingkup kecamatan relatif telah memiliki pemahaman mendasar terkait program MCH, sebagai berikut.

“...MCH ini melibatkan pentahelix...Kita perlu duduk bersama dengan melibatkan banyak kerjasama...kedepannya bisa mengajak dewan CSR...perlu mengadakan event festival di Paotere, apalagi potensi perikanan juga besar...Kalau kita berbicara tentang UMKM berarti berbicara pemasaran...berbicara tentang kreativitas berbicara mengenai ruang...output dari pelatihan, tetapi mereka tidak tahu memasarkan di mana...cuman kadang terkendala di izin dan birokratis yang berbelit-belit....Kreativitas pemuda terkendala lahan untuk pemuda...Sarana disabilitas tidak ada...”

(Sumber: Hasil FGD dengan perwakilan pemerintah Kecamatan Ujung Tanah)

Kedua, sinkronisasi antara sesama stakeholder level kecamatan dalam memetakan potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang ada di setiap kecamatan. Terkait hal ini, hasil penelusuran data mengungkapkan bahwa telah terdapat sinkronisasi antara stakeholder lingkup kecamatan dalam hal permasalahan, kebutuhan, dan potensi dengan hal-hal yang dapat diwadahi/difasilitasi program MCH. Dari FGD yang dilakukan, terungkap secara garis besar 3 hal yang menjadi penekanan

stakeholder lingkup kecamatan, yakni: 1) Pengembangan SDM melalui pelatihan; 2) Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan UMKM dan kolaborasi lintas sektor; serta 3) Pengembangan sektor lokal unggulan (pariwisata, seni budaya, kuliner dll). Hal ini pada dasarnya sejalan dengan apa yang pada gilirannya akan diwadahi/difasilitasi melalui program MCH, yakni *academy skill, production, dan exhibition/event*. Dengan adanya korelasi antara kedua hal ini, yakni antara permasalahan, kebutuhan, dan potensi stakeholder lingkup kecamatan dengan apa yang diwadahi/difasilitasi melalui program MCH. Adapun hal ini sebagaimana nampak dalam uraian berikut :

“...saya Ketua KNPI Kecamatan Bontoala...banyak hal yang kami harapkan dari program ini...salah satunya kami berharap adanya workshop untuk pemuda-pemudi...banyak pemuda kreatif tetapi kurang pelatihan...”

(Sumber: Hasil FGD dengan perwakilan kelompok anak muda Kec. Bontoala)

Hasil penelusuran dengan sumber lain juga mengungkapkan hal senada, sebagaimana nampak berikut.

“...saya dari tamalanrea...sebenarnya pengembangan skill banyak yang mau memberikan...tapi perlu dorongan untuk pemuda agar mau mengembangkan skill mereka...selain itu perlu ada pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga...mereka penggerak utama UMKM di wilayah kami...”

(Sumber: Hasil FGD dengan perwakilan UMKM Kec. Tamalanrea)

Dari uraian di atas, nampak bahwa telah terdapat sinkronisasi, baik antara kebijakan/program dengan pemerintahan lingkup kecamatan, maupun antara kebijakan/program dengan kelompok sasaran lingkup kecamatan (kelompok/komunitas anak muda, kelompok UMKM masyarakat, pelaku industri pariwisata dan ekraf, serta kelompok rentan dan disabilitas). Selain itu, secara inheren, telah terdapat sinkronisasi antara kebijakan/program MCH dengan beberapa dinas terkait selaku implementor, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rancangan implementasi MCH. Namun, khusus terkait hal ini, masih perlu dilakukan sinkronisasi lanjutan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Hal ini didasarkan pada

temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak permasalahan, kebutuhan, dan potensi di setiap kecamatan yang membutuhkan fasilitasi OPD lainnya selaku supporting.

Hal di atas jika dilakukan, maka sejumlah OPD yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan/mengelola MCH, dapat menjalankan perannya dengan baik, sebagai contoh Dinas Pariwisata selaku *leading stakeholder*, yang bertanggung jawab atas operasional, strategi, dan kemitraan dengan Kemenparekraf dan badan kreatif nasional; Dinas Pemuda dan Olahraga, bersama Dinas Kebudayaan, mendorong aktivasi komunitas pemuda di 15 kecamatan dan pulau, serta memfasilitasi inkubasi program dan hibah; Dinas Koperasi dan UKM menjadi penggerak inkubasi UMKM berbasis ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, dan produk digital; Dinas Komunikasi dan Informatika memastikan infrastruktur digital, media kreatif, dan teknologi penunjang di seluruh wilayah aktivitas MCH; Dinas Ketenagakerjaan menggelar pelatihan dan sertifikasi SDM subsektor ekonomi kreatif, serta membuka koneksi ke sektor kerja swasta; serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) bertanggungjawab untuk membangun wadah/menyediakan ruang fisik yang menjadi tempat penyaluran berbagai aktivitas kreatif dan peningkatan kapasitas/keterampilan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan tidak saja kolaborasi yang apik diantara stakeholder program yang ada tetapi juga sinkronisasi kebijakan dalam membangun *creative hub* di Kota Makassar, sehingga MCH hadir bukan hanya sebagai fasilitas fisik, tetapi sebagai ekosistem kreatif yang menjembatani anak muda, komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah melalui pendekatan yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat umum.

Temuan di atas secara inheren didasarkan atas pemahan bahwa sinkronisasi kebijakan merupakan proses penyelarasan substansi, arah, strategi, dan pelaksanaan kebijakan publik antara berbagai tingkatan pemerintahan dan lintas sektor agar tidak saling bertentangan, saling mendukung, dan memperkuat efektivitas pembangunan. Sinkronisasi kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMN, RPJMD, dan Renstra perangkat daerah, atau dengan kata lain, sinkronisasi kebijakan merupakan upaya mewujudkan keselarasan dan keserasian arah pembangunan nasional dan daerah melalui proses perencanaan, koordinasi, dan evaluasi yang terpadu. Selain itu, sinkronisasi kebijakan memang diharapkan untuk: a). menyatukan arah,

sasaran, dan prioritas pembangunan nasional dan daerah; b). menghindari duplikasi dan tumpang tindih program; c). menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; d). memperkuat koordinasi antar lembaga dan sektor pemerintahan; e). memastikan pelaksanaan kebijakan nasional secara konsisten di tingkat daerah; serta f). menjamin keberlanjutan program lintas periode pemerintahan.

Bentuk sinkronisasi yang perlu dilakukan di atas pada dasarnya dapat dipahami dalam beberapa model. Pertama, model koherensi, yang dilakukan untuk menjamin tidak adanya pertentangan antar kebijakan sektor dan level pemerintahan. Kedua, keterpaduan, yang dalam praktiknya setiap program lintas sektor saling mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan. Ketiga, kolaborasi, yang dapat dilihat dari koordinasi aktif antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Semua model ini pada dasarnya sejalan dengan bentuk sinkronisasi horizontal, yang pada umumnya berupa penyelarasan antara kebijakan sektor/lembaga pada level yang sama.

4.2. Implikasi Penelitian Sinkronisasi Kebijakan Makassar *Creative Hub*

Sejumlah temuan dalam penelitian ini tentunya memberikan implikasi, baik teoritis, praktis, kebijakan/program, dan metodologis. Pertama secara teoritis, temuan penelitian ini turut memperkuat konsep/teori yang menyatakan bahwa suatu program yang memiliki kemungkinan besar untuk diimplementasikan secara berhasil adalah kebijakan/program yang di dalamnya terdapat sinkronisasi antara kebijakan/program, implementor, dan pemanfaat program itu sendiri. Selain itu, temuan yang ada juga turut memperkuat konsep/teori yang menyatakan bahwa suatu kebijakan/program yang relatif mendapatkan dukungan/support dari stakeholder adalah kebijakan/program yang mampu mengakomodir interest/goals dari pengusung program, kemampuan implementor, serta permasalahan, kebutuhan, dan potensi dari kelompok sasaran. Hal inilah yang pada dasarnya tercermin dalam program MCH.

Kedua, temuan penelitian ini dapat berimplikasi secara praktis, dalam hal ini program MCH dapat dinilai sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi/dialami publik/kelompok sasaran, mampu mewedahi/memfasilitasi kebutuhan publik/kelompok sasaran, dan mampu mengembangkan potensi wilayah/kelompok

sasaran sebagaimana yang diharapkan, sehingga program MCH memang layak menjadi program primadona Pemkot Makassar untuk diimplementasikan secara berhasil.

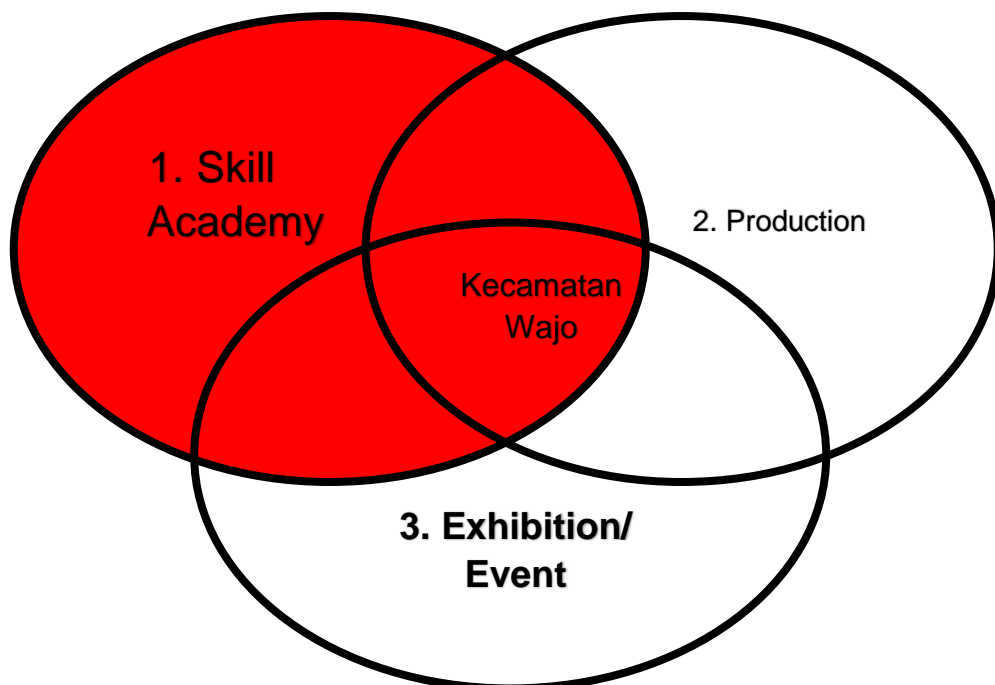
Ketiga, temuan penelitian ini dapat berimplikasi secara kebijakan/program. Terkait hal ini, sekalipun hasil penelitian mengungkapkan bahwa setiap kecamatan membutuhkan MCH selaku pusat pengembangan ekonomi kreatif, namun terdapat sejumlah keunikan/prioritas dari setiap kecamatan yang ada, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi revisi kebijakan/program.

4.2.1. Aspek skema kolaborasi,

1. Kecamatan Wajo

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Wajo dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibiton/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Wajo lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *skill academy*, karena menekankan pada kepentingan pengembangan kompetensi/kreativitas SDM. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

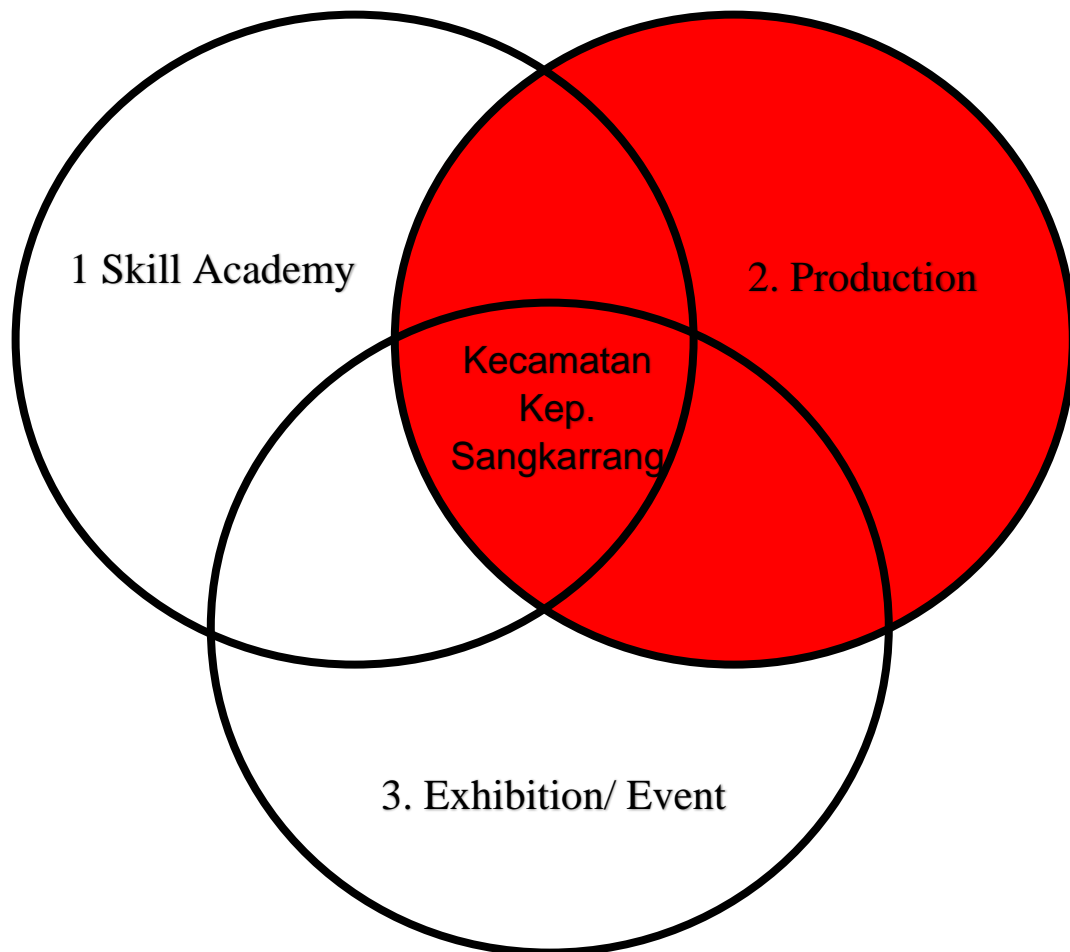
Gambar 4.
Mapping Creative Hub Kecamatan Wajo Berdasarkan Skema Kolaborasi



2. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Wajo dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibiton/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Kepulauan Sangkarrang lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *production*, karena menekankan pada kepentingan pengembangan industri pariwisata, studio kreatif penyaluran skill masyarakat, dan sarana/prasarana produksi kelautan/perikanan. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

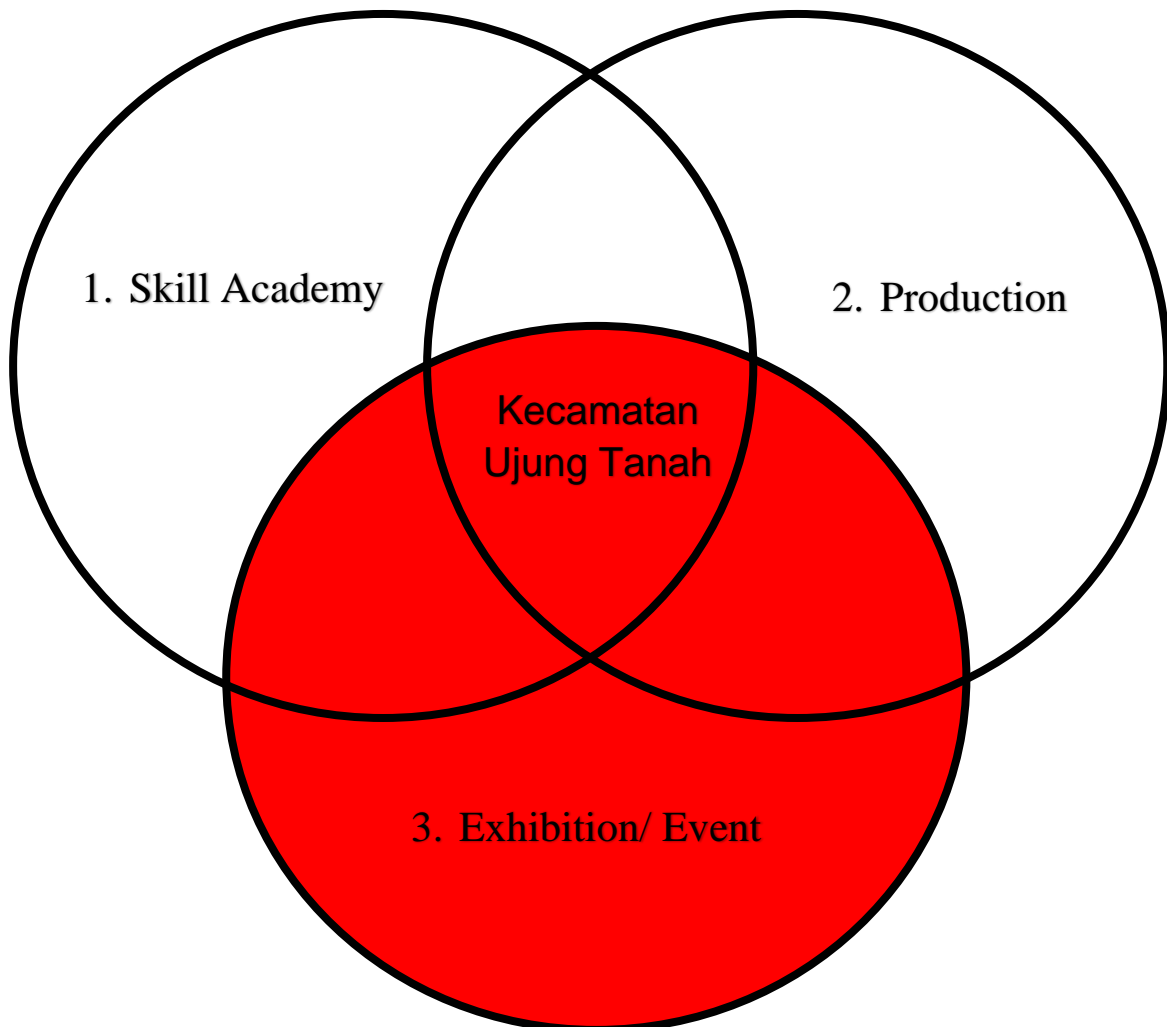
Gambar 5.
Mapping Creative Hub Kec. Kep. Sangkarrang Berdasarkan Skema Kolaborasi



3. Kecamatan Ujung Tanah

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Ujung Tanah dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibition/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Ujung Tanah lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *exhibition/event*, karena menekankan pada kepentingan kolaborasi stakeholder atau pengembangan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat memfasilitasi pengembangan potensi wilayah, peluang dan lapangan kerja, serta promosi potensi wilayah melalui festival/pameran. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut :

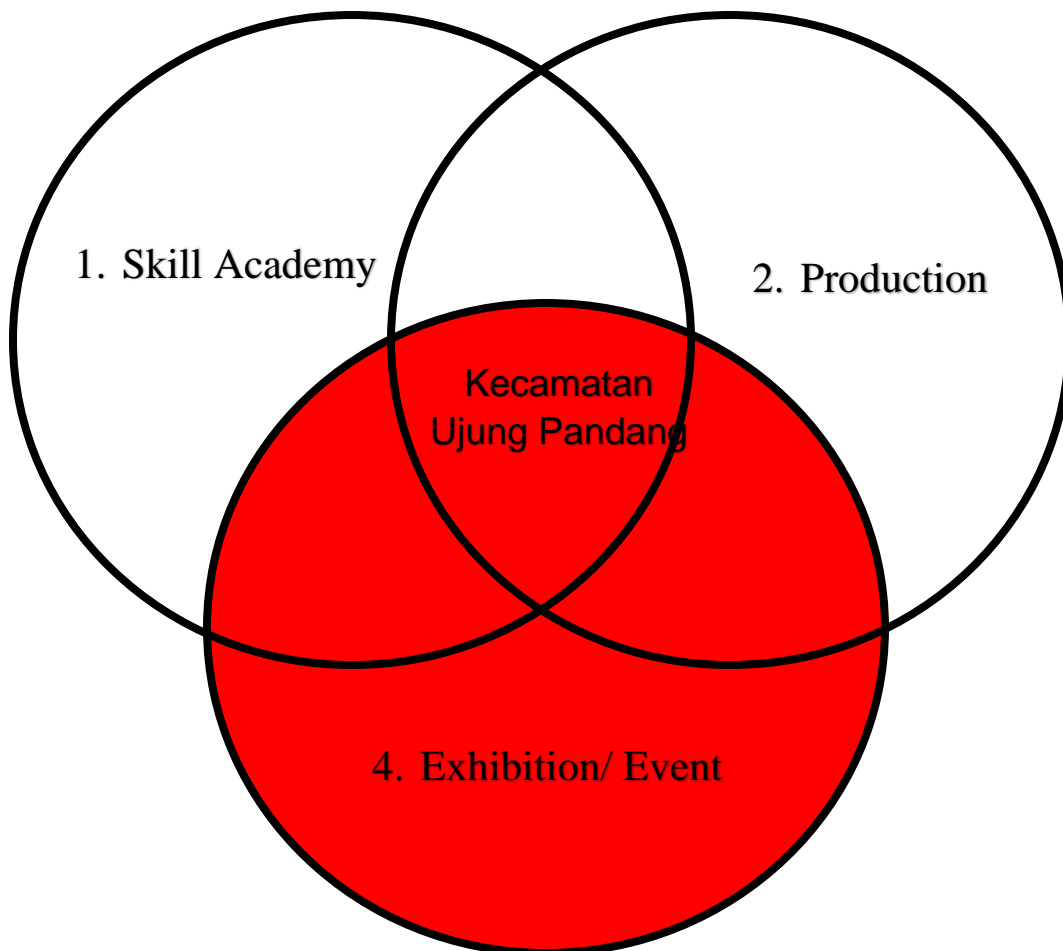
Gambar 6.
Mapping Creative Hub Kecamatan Ujung Tanah Berdasarkan Skema Kolaborasi



4. Kecamatan Ujung Pandang

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Ujung Pandang dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibition/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Ujung Pandang lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *exhibition/event*, karena menekankan pada kepentingan kolaborasi stakeholder atau pengembangan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat memfasilitasi pengembangan potensi wilayah, peluang dan lapangan kerja, serta promosi potensi wilayah melalui festival/pameran. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut :

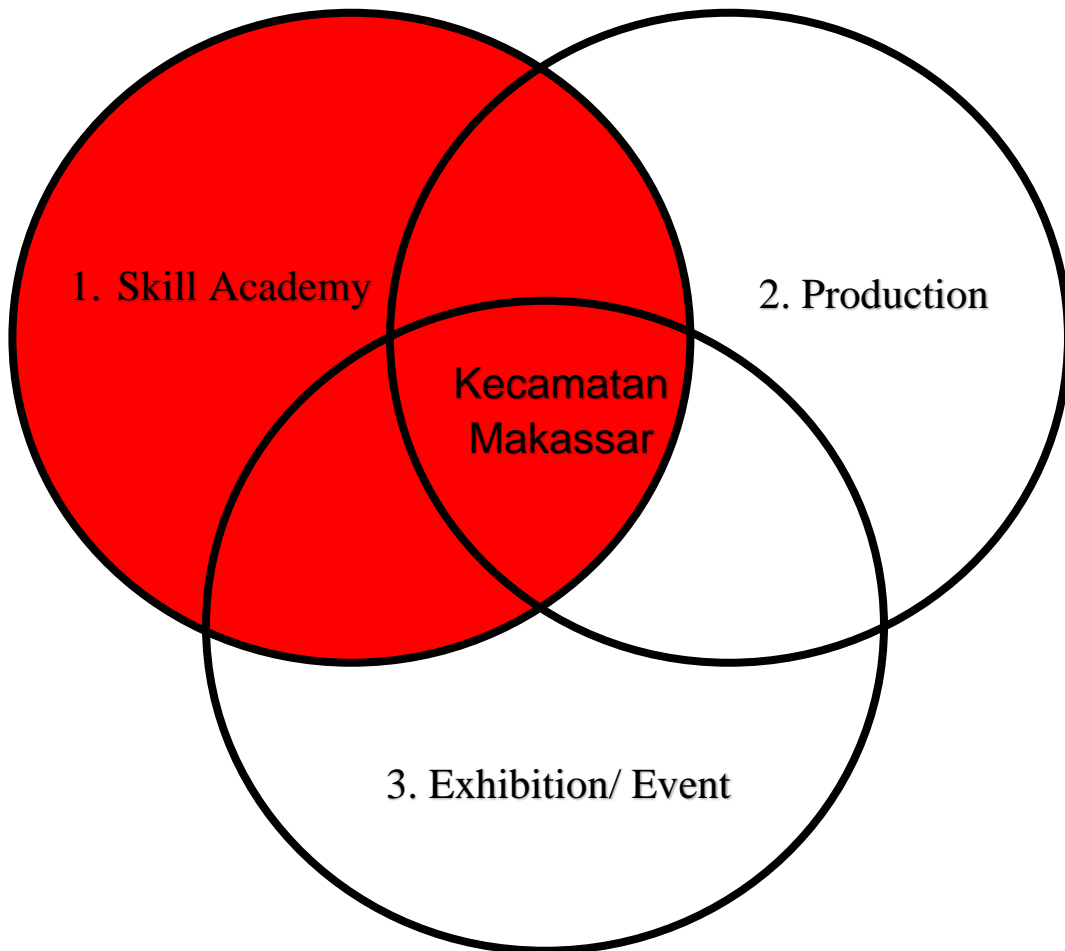
Gambar 7.
Mapping Creative Hub Kecamatan Ujung Pandang Berdasarkan Skema Kolaborasi



5. Kecamatan Makassar

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Makassar dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibition/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Makassar lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *skill academy*, karena menekankan pada kepentingan pengembangan kompetensi/kreativitas SDM. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

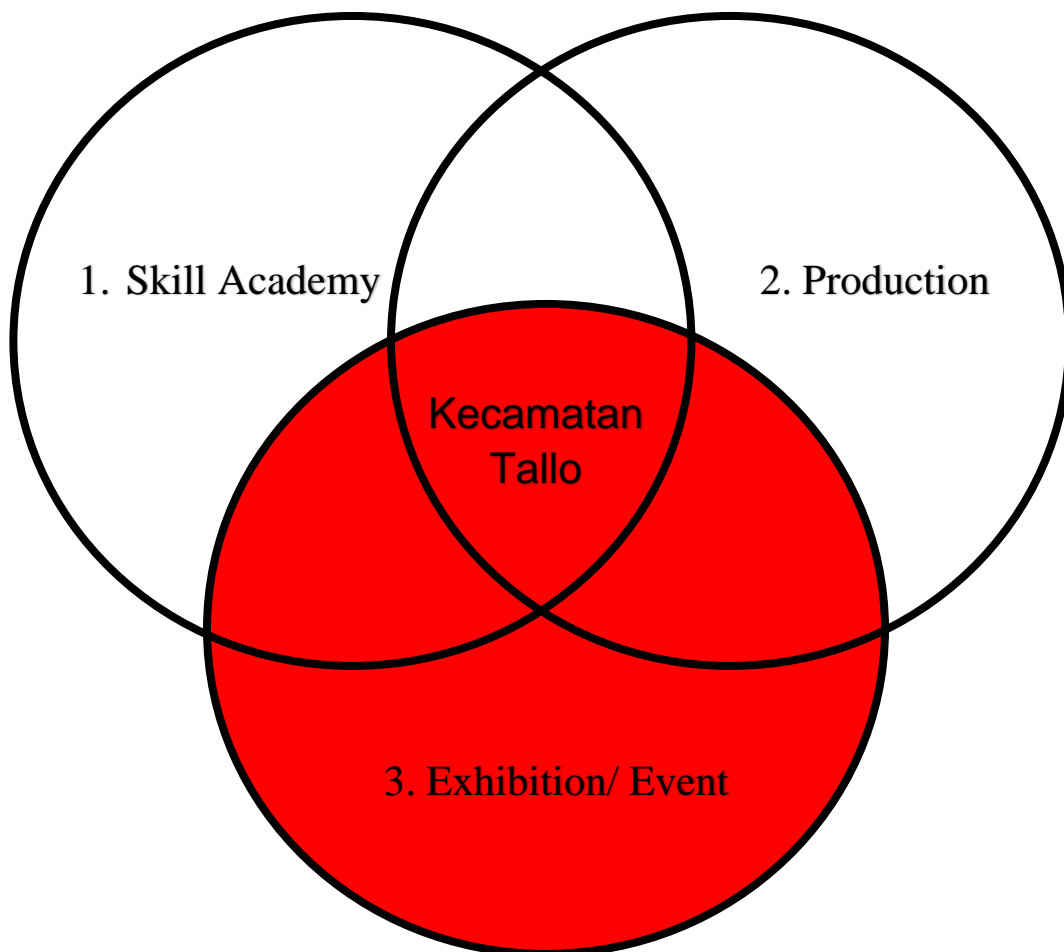
Gambar 8.
Mapping Creative Hub Kecamatan Makassar Berdasarkan Skema Kolaborasi



6. Kecamatan Tallo

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Tallo dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibition/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Tallo lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *exhibition/event*, karena menekankan pada kepentingan kolaborasi stakeholder atau pengembangan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat memfasilitasi pengembangan potensi wilayah, peluang dan lapangan kerja, serta promosi potensi wilayah melalui festival/pameran. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

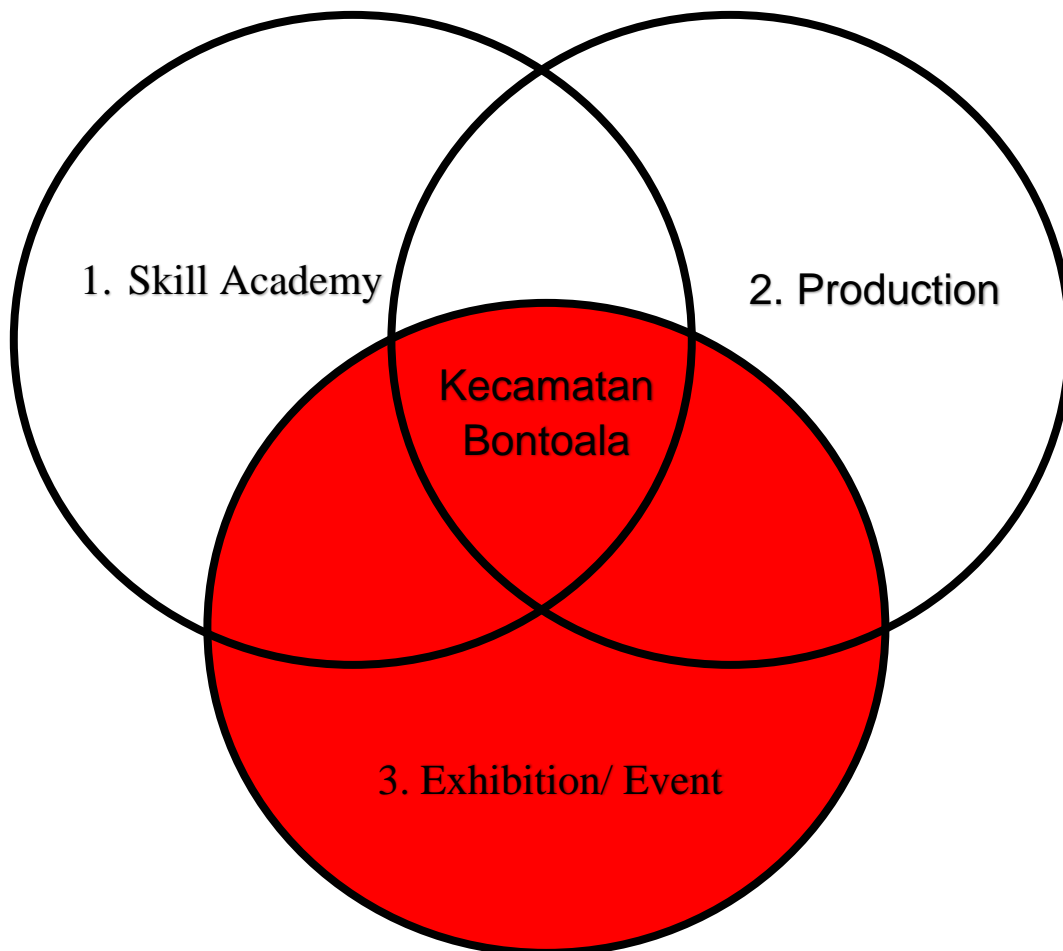
Gambar 9.
Mapping Creative Hub Kecamatan Tallo Berdasarkan Skema Kolaborasi



7. Kecamatan Bontoala

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Bontoala dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibition/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Bontoala lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *exhibition/event*, karena menekankan pada kepentingan kolaborasi stakeholder atau pengembangan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat memfasilitasi pengembangan potensi wilayah, peluang dan lapangan kerja, serta promosi potensi wilayah melalui festival/pameran. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut :

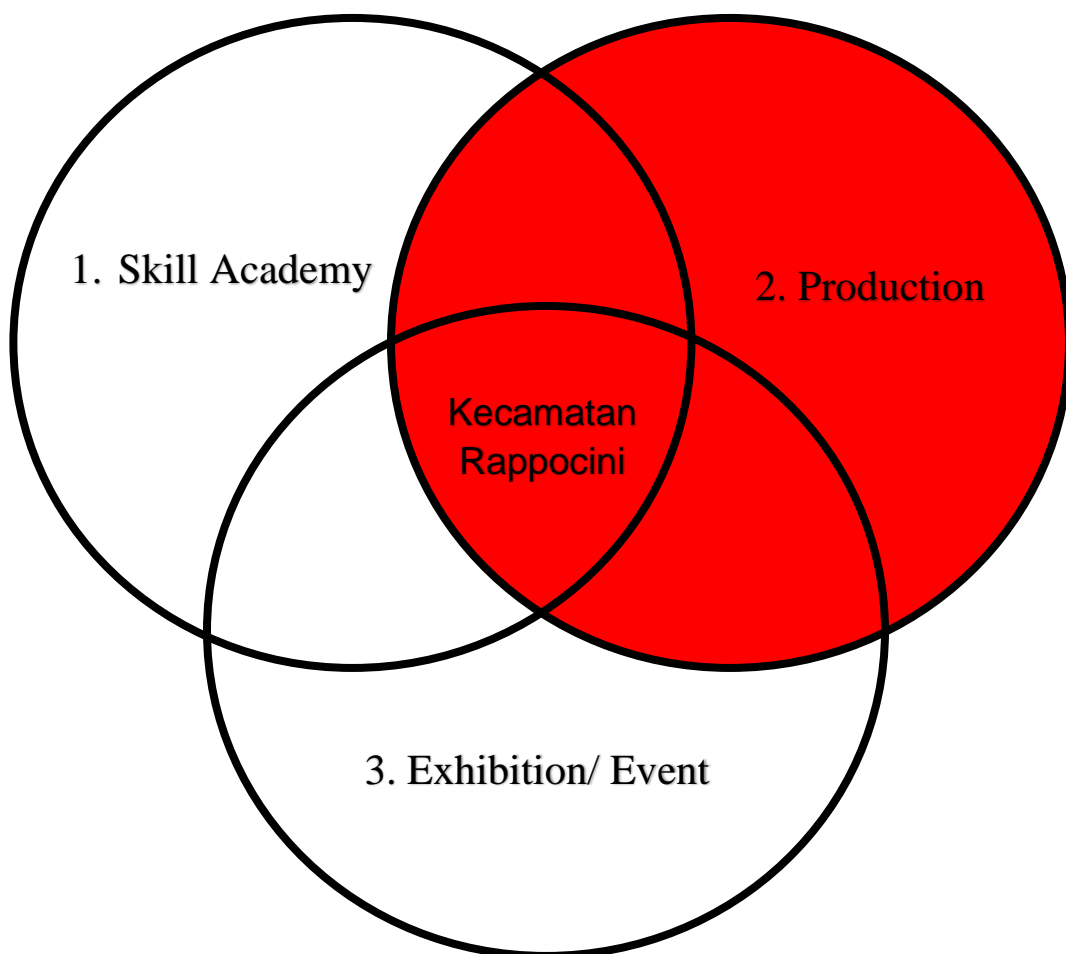
Gambar 10.
Mapping Creative Hub Kecamatan Bontoala Berdasarkan Skema Kolaborasi



8. Kecamatan Rappocini

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Rappocini dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibiton/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Rappocini lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *production*, karena menekankan pada studio kreatif penyaluran skill masyarakat dan sarana/prasarana pengembangan potensi untuk produksi kreatif. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

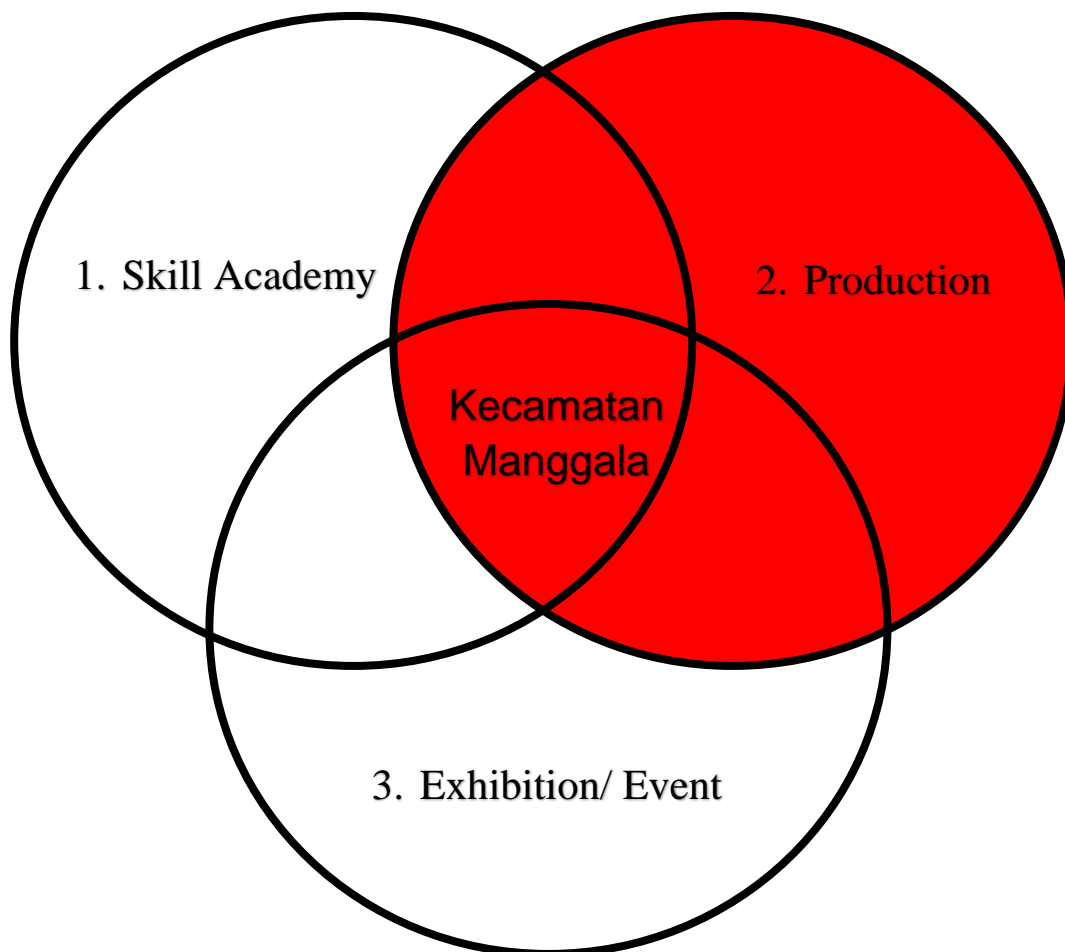
Gambar 11.
Mapping Creative Hub Kecamatan Rappocini Berdasarkan Skema Kolaborasi



9. Kecamatan Manggala

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Manggala dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibition/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Manggala lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *production*, karena menekankan pada kepentingan pengembangan studio kreatif penyaluran skill masyarakat, dan produk industri pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang lebih memiliki nilai tambah. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

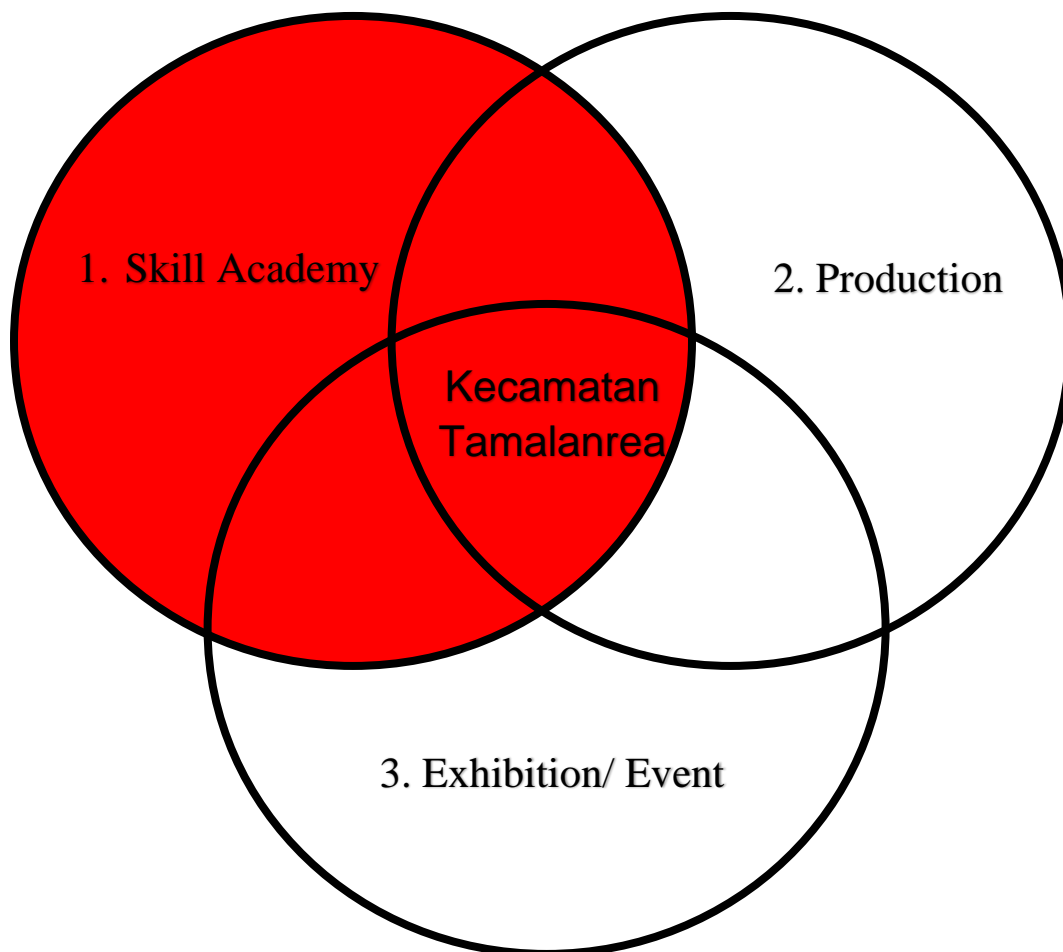
Gambar 12.
Mapping Creative Hub Kecamatan Manggala Berdasarkan Skema Kolaborasi



10. Kecamatan Tamalanrea

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Tamalanrea dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibiton/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Tamalanrea lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *skill academy*, karena menekankan pada kepentingan pengembangan kompetensi/kreativitas SDM. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

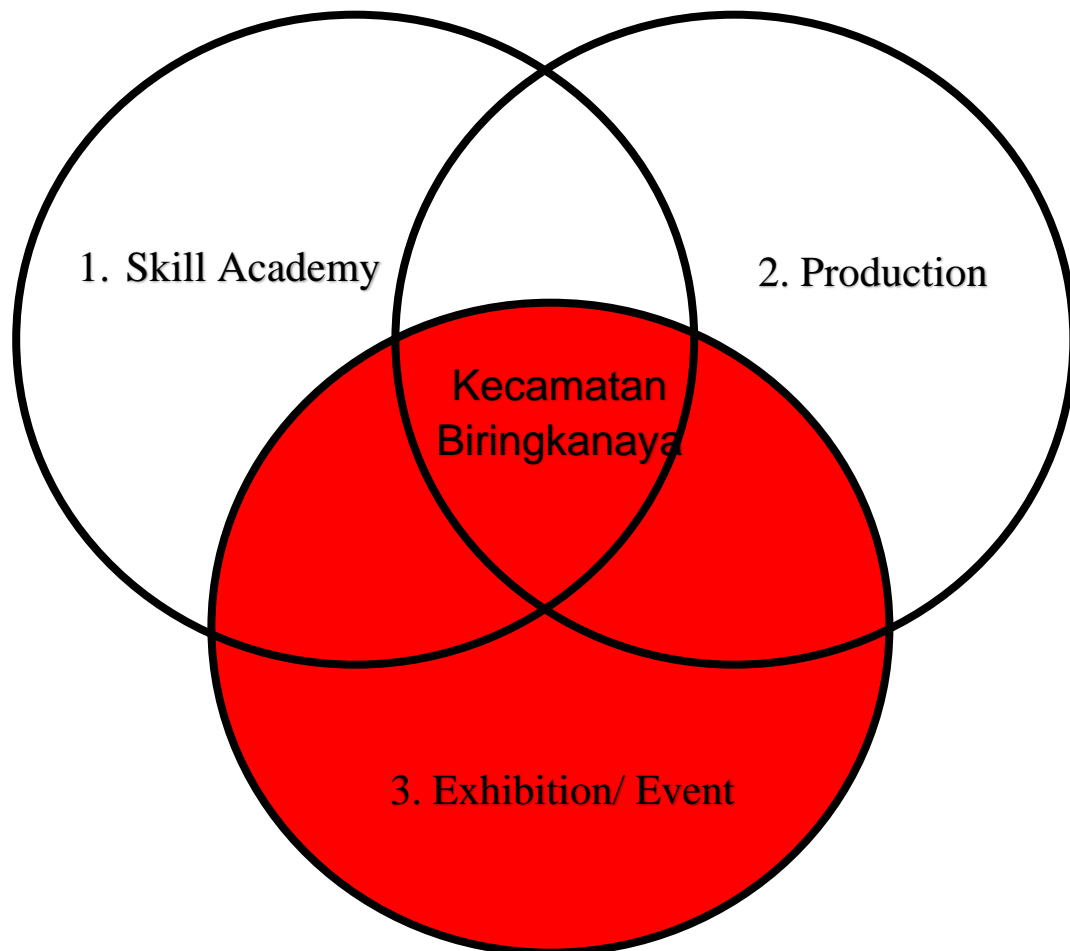
Gambar 13.
Mapping Creative Hub Kecamatan Tamalanrea Berdasarkan Skema Kolaborasi



11. Kecamatan Biringkanaya

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Biringkanaya dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibition/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Biringkanaya lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *exhibition/event*, karena menekankan pada kepentingan kolaborasi stakeholder atau pengembangan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat memfasilitasi pengembangan potensi wilayah, peluang dan lapangan kerja, serta promosi potensi wilayah melalui festival/pameran. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

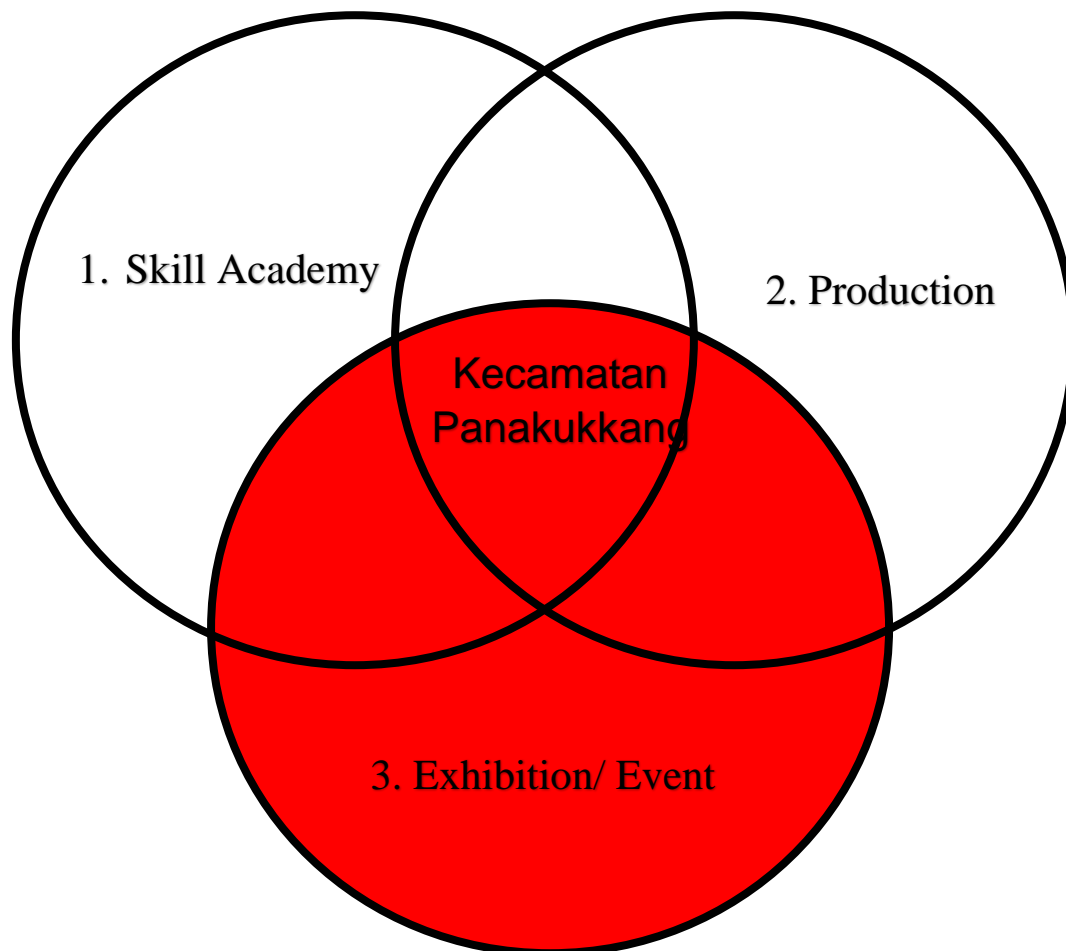
Gambar 14.
Mapping Creative Hub Kecamatan Biringkanaya Berdasarkan Skema Kolaborasi



12. Kecamatan Panakukkang

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Panakukkang dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibiton/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Panakukkang lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *exhibition/event*, karena menekankan pada kepentingan kolaborasi stakeholder atau pengembangan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat memfasilitasi pengembangan potensi wilayah, peluang dan lapangan kerja, serta promosi potensi wilayah melalui festival/pameran. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

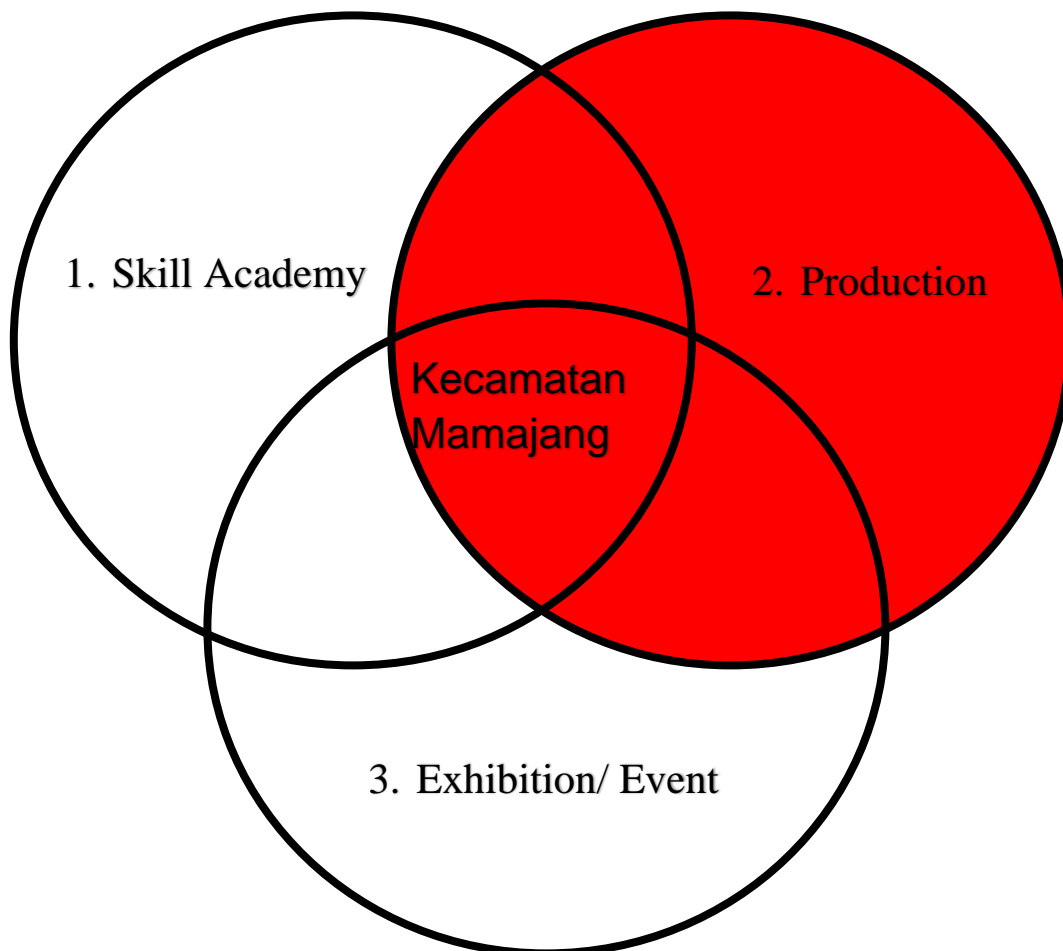
Gambar 15.
Mapping Creative Hub Kecamatan Panakukkang Berdasarkan Skema Kolaborasi



13. Kecamatan Mamajang

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Mamajang dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibiton/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Mamajang lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *production*, karena menekankan pada kepentingan pengembangan studio kreatif penyaluran skill masyarakat dan sarana/prasarana untuk pengembangan produk UMKM. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

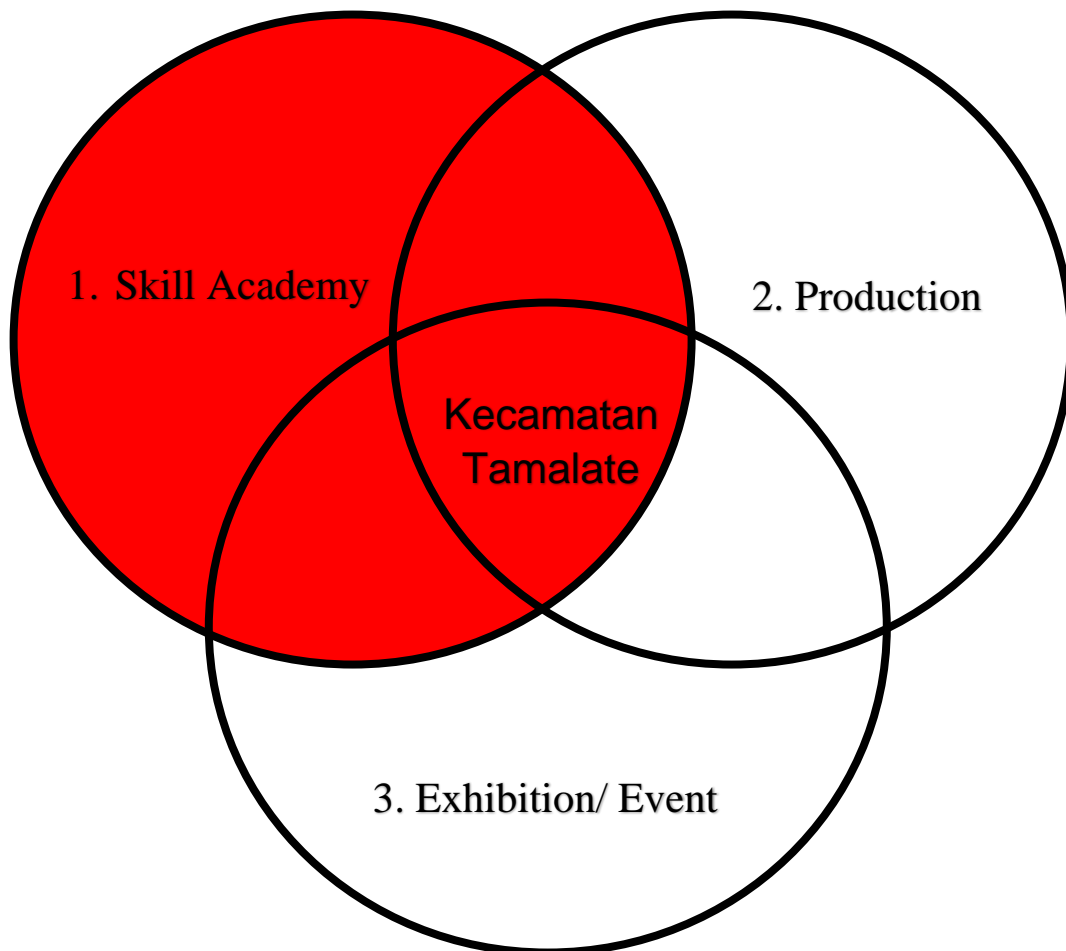
Gambar 16.
***Mapping Creative Hub* Kecamatan Mamajang Berdasarkan Skema Kolaborasi**



14. Kecamatan Tamalate

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Tamalate dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibition/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Tamalate lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *skill academy*, karena menekankan pada kepentingan pengembangan kompetensi/kreativitas SDM. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

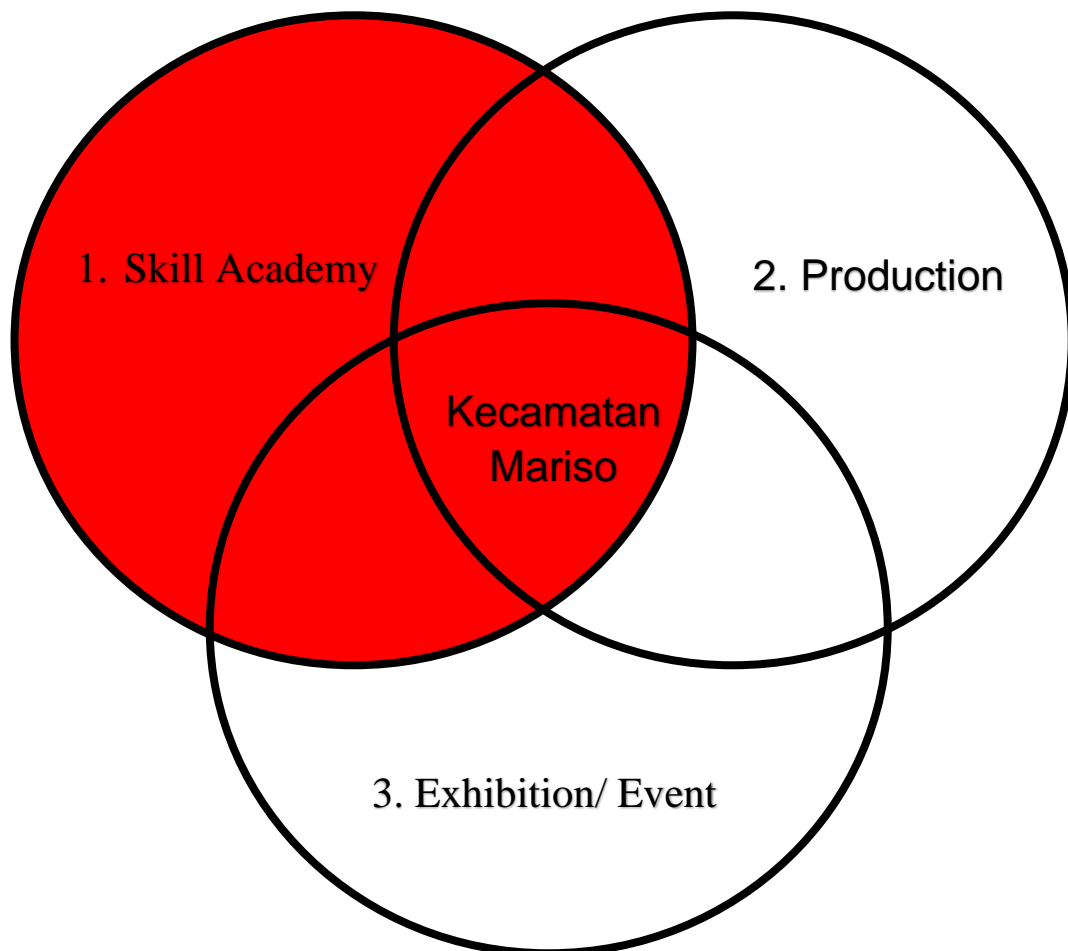
Gambar 17.
Mapping Creative Hub Kecamatan Tamalate Berdasarkan Skema Kolaborasi



15. Kecamatan Mariso

Dari temuan penelitian terkait permasalahan, kebutuhan, dan potensi di Kecamatan Mariso dapat dipahami bahwa hal tersebut dapat diwadahi/difasilitasi melalui kolaborasi dalam MCH, baik terkait dengan *academy skill*, *production*, maupun *exhibiton/event*. Namun jika dicermati lebih jauh, maka Kecamatan Mariso lebih menekankan prioritas yang lebih besar pada aspek *skill academy*, karena menekankan pada kepentingan pengembangan kompetensi/kreativitas SDM. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar berikut.

Gambar 18.
Mapping Creative Hub Kecamatan Mariso Berdasarkan Skema Kolaborasi



Dari serangkaian uraian di atas tentang identifikasi creative hub berdasarkan skema kolaborasi, dapat dipahami bahwa setiap kecamatan sekalipun memiliki harapan

untuk dibangun creative hub yang dapat memawadahi/memfasilitasi *skill academy*, *production*, maupun *exhibiton/event*, namun setiap kecamatan tetap memiliki skala prioritasnya masing-masing. Jika hal ini dipetakan, maka akan nampak sebagaimana gambar berikut.

Gambar 19.
Mapping Creative Space Berdasarkan Skema Kolaborasi



(Sumber: Hasil olah data penelitian, 2025)

4.2.2. Aspek kategorisasi *creative hub*

Implikasi lain dari temuan penelitian yang ada mengarah pada kategorisasi *creative hub* yang nantinya akan dibangun sebagai pusat kreativitas kecamatan. Dari

data yang ada, yakni permasalahan, kebutuhan, dan potensi dari setiap kecamatan terungkap bahwa setiap kecamatan memiliki harapan untuk dibangun sarana/fasilitas yang dapat mewadahi kegiatan kreatif masyarakat, baik dalam bentuk *creative space*, *co-working space*, maupun *makerspace*. Namun, dari kategorisasi yang ada, ternyata setiap kecamatan juga memiliki prioritas/penekanan terhadap satu jenis kategori *creative hub* yang ada. Hal ini sebagaimana nampak dalam tabel berikut.

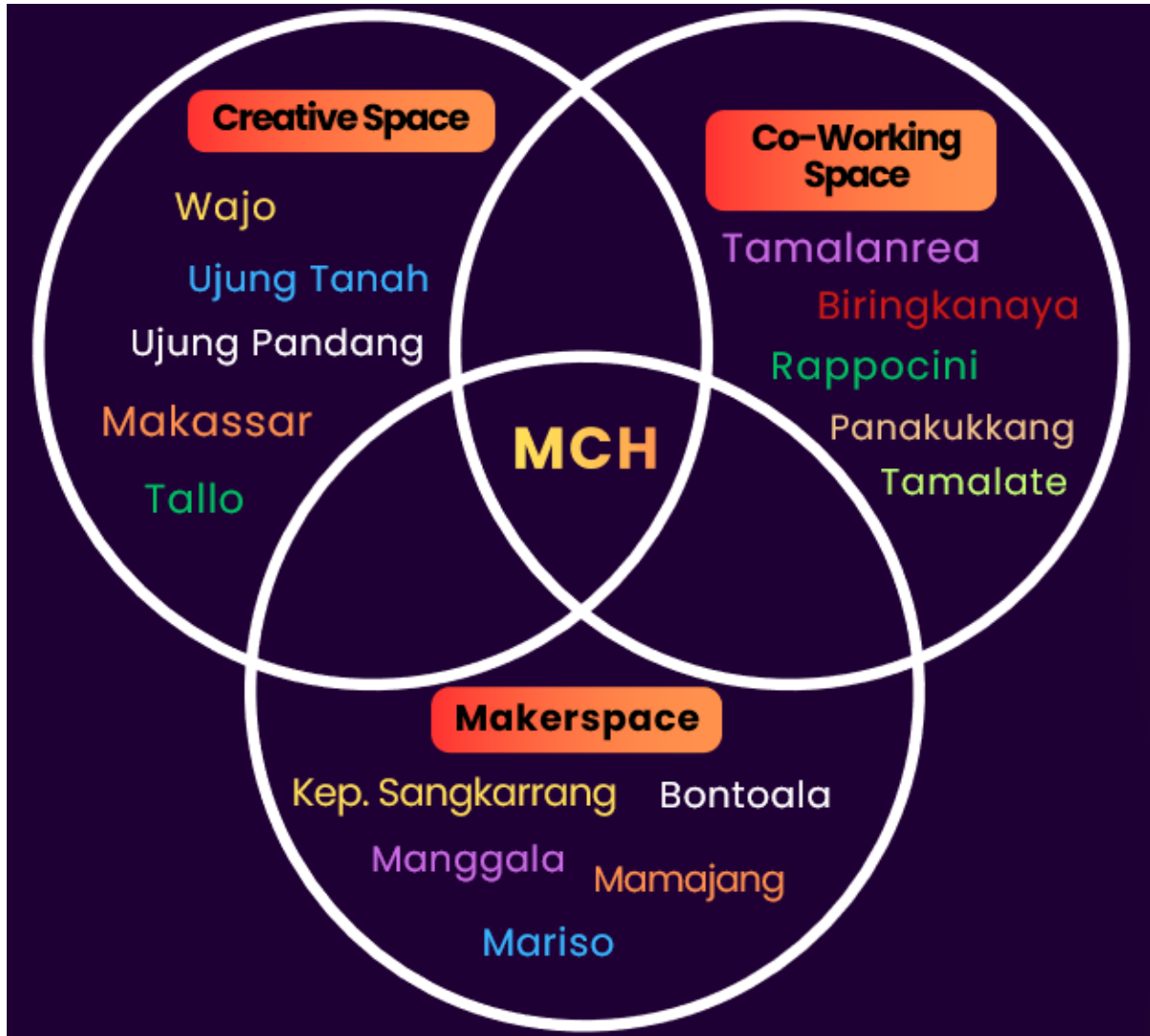
Tabel 18
Kategorisasi Creative Hub di Setiap Kecamatan Berdasarkan Skala Prioritas

No.	Wilayah	Kategori <i>Creative Hub</i>		
		<i>Creative Space</i>	<i>Co-Working Space</i>	<i>Makerspace</i>
1.	Kecamatan Wajo	√	√	√
2.	Kecamatan Kep. Sangkarrang	√	√	√
3.	Kecamatan Ujung Tanah	√	√	√
4.	Kecamatan Ujung Pandang	√	√	√
5.	Kecamatan Maccini	√	√	√
6.	Kecamatan Tallo	√	√	√
7.	Kecamatan Bontoala	√	√	√
8.	Kecamatan Rappocini	√	√	√
9.	Kecamatan Manggala	√	√	√
10.	Kecamatan Tamalanrea	√	√	√
11.	Kecamatan Biringkanaya	√	√	√
12.	Kecamatan Panakukkang	√	√	√
13.	Kecamatan Mamajang	√	√	√
14.	Kecamatan Tamalate	√	√	√
15.	Kecamatan Mariso	√	√	√

(Keterangan: Checklist **merah** menunjukkan prioritas dari setiap kecamatan)

Data dari tabel 18 di atas jika dipetakan (*mapping*) berdasarkan identifikasi di setiap yang ada, akan nampak sebagaimana gambar berikut :

Gambar 20
Mapping *Creative Space* Berdasarkan Kategorisasi



(Sumber: Hasil olah data penelitian)

Dari data pada gambar 18 dan 19 di atas memberikan implikasi bahwa sekalipun *creative hub* akan dibangun di setiap kecamatan berdasarkan rancangan awal, terdapat kemungkinan yang besar untuk mendesain pembangunan *creative hub* dengan model yang berbeda, yakni *grouping*, dalam artian *creative hub* di Kota Makassar dapat dibangun dengan membangun satu pusat *creative hub* untuk beberapa

kecamatan/wilayah, baik berdasarkan skema kolaborasi, maupun kategorisasi creative hub tersebut.

Keempat, penelitian ini juga dapat berimplikasi pada riset lanjutan, dalam hal ini berdasarkan keterbatasan penelitian yang hanya sampai memberikan rekomendasi terkait pembangunan *creative hub* yang sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang ada di setiap kecamatan. Oleh karena itu, riset lanjutan juga dibutuhkan khususnya terkait implementasi kebijakan/program creative hub, guna memastikan program MCH dapat terimplementasi dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Makassar Creative Hub (MCH) merupakan program strategis Pemkot Makassar yang dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan, mengurangi pengangguran, dan memperkuat sektor ekonomi kreatif masyarakat, terutama generasi muda. Program ini sejalan dengan visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” serta sinkron dengan arah pembangunan nasional.
2. Setiap kecamatan memiliki kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang berbeda, sehingga pembangunan creative hub perlu berbasis pada data lokal. Misalnya, wilayah pesisir membutuhkan pelatihan berbasis kelautan, sementara wilayah padat UMKM membutuhkan dukungan pemasaran dan sertifikasi.
3. Pembangunan MCH membutuhkan kolaborasi lintas OPD, mulai dari Dinas PU sebagai penyedia ruang fisik, Dinas Pariwisata sebagai leading sector, hingga OPD lain seperti Dispora, Diskominfo, Dinas Koperasi-UKM, dan Dinas Ketenagakerjaan yang berperan dalam pelatihan, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sinkronisasi kebijakan menjadi syarat penting keberhasilan program.
4. Ekonomi kreatif Makassar memiliki potensi besar, dengan lebih dari 37.000 pelaku industri kreatif dan dominasi sektor kuliner, fashion, dan kriya. Keberadaan MCH menjadi katalisator untuk mengoptimalkan potensi ini.
5. Creative hub memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan, seperti membuka peluang kerja, memperkuat komunitas, menyediakan ruang kolaboratif, serta mendorong inovasi dan lahirnya usaha baru. Dampak ini relevan dengan tantangan kota, khususnya tingginya jumlah penduduk berpendidikan menengah ke bawah dan anak putus sekolah.
6. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan Logical Framework Analysis, yang membantu mengidentifikasi tujuan jangka panjang, output yang diharapkan, serta aktivitas prioritas dalam pembangunan MCH.

5.2. Rekomendasi

1. Penguatan Sinkronisasi Kebijakan

- Diperlukan *forum koordinasi lintas OPD* yang rutin untuk menyelaraskan program, anggaran, dan peran masing-masing instansi dalam pembangunan MCH.
- Pemerintah perlu menyusun *dokumen kebijakan bersama* sebagai payung integrasi (misalnya Perwali tentang penyelenggaraan MCH).

2. Pendekatan Berbasis Kebutuhan Kecamatan

- Setiap MCH sebaiknya memiliki *kurikulum pelatihan yang berbeda* sesuai potensi lokal, seperti:
 - kelautan/perikanan di Kepulauan Sangkarrang,
 - kewirausahaan kuliner dan kreatif di Wajo,
 - digital kreatif di kecamatan perkotaan padat penduduk.
- Pemetaan potensi dan masalah harus diperbarui secara periodik agar MCH tetap relevan.

3. Penguatan Infrastruktur dan Ruang Fisik

- Dinas PU perlu memastikan bahwa desain MCH mengakomodasi:
 - akses disabilitas,
 - ruang kolaborasi, ruang produksi, makerspace, studio digital,
 - kelayakan bangunan untuk beragam aktivitas produktif.
- Di wilayah kepulauan, fokus pada akses listrik, internet, dan transportasi laut.

4. Peningkatan Kapasitas SDM

- Melibatkan pelaku industri kreatif dan akademisi sebagai mentor reguler.
- Melanjutkan kolaborasi dengan BBPVP Makassar, dan lembaga sertifikasi untuk pelatihan berbasis kompetensi.

5. Penguatan Ekosistem Bisnis Kreatif

- Pemerintah perlu membuka akses pelaku UMKM ke ritel modern dan marketplace digital.
- Menyediakan *booth display*, *market forum*, dan *inkubasi usaha* berbasis MCH.
- Memberikan insentif bagi startup atau UMKM yang berkembang melalui MCH.

6. Monitoring dan Evaluasi Berbasis LFA

- Mengembangkan indikator kinerja yang terukur: jumlah peserta, penyerapan kerja, jumlah UMKM baru, jumlah program pelatihan, dan dampak sosial-ekonomi.
- Evaluasi triwulan antar-OPD untuk memastikan kesesuaian dengan kerangka logis (goal–purpose–output–activity).

7. Penguatan Kolaborasi Komunitas

- Mengaktifkan komunitas kreatif di tingkat kecamatan sebagai mitra operasional.
- Mengadakan festival, showcase, demo day, dan event rutin sebagai ruang promosi dan jejaring.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kota Makassar. 2025. Rancangan Awal RPJMD Kota Makassar 2025-2029. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Bappeda Kota Makassar. 2025. Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Makassar 2025-2029. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Bappenas. 2025. *Relayout Narasi RPJMN 2025-2029*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bhusan, Keerti Pradhan. 2012. *The Logical Framework Approach*.
- Birkland, T. A. 2019. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (4th ed.). Routledge.
- Boswinkel, K., dan van Meerkerk, E. 2023. *Creative hubs: an anomaly in cultural policy?* *International Journal of Cultural Policy*, 29(6), 767–785. <https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2107636>.
- Chaloupková, M., Kunc, J., & Koutský, J. 2023. *Creative Economy: Support of Creative Hubs By the Public Sector in the Urban Environment*. *Technological and Economic Development of Economy*, 29(6), 1611–1632. <https://doi.org/10.3846/tede.2023.20136>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Flego, C., dan Tei, A. 2024. *Creative and cultural hub sustainability: from theory to practice*. *International Journal of Cultural Policy*. <https://doi.org/10.1080/10286632.2024.2372332>
- Florida, R. 2014. *The Rise of the Creative Class: Revisited*. Basic Books.
- Hasan, M. (2018). Pembinaan Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEKPEND)* Vol, 1.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. 2020. *Studying Public Policy: Principles and Processes* (5th ed.). Oxford University Press.
- Iswari, A.D., Anwar, H., & Firmansyah, R. (2018). Perancangan Interior Jogja Creative Hub di D.I. Yogyakarta. *eProceedings of Art & Design*, 5(3)
- Kementerian PUPR. 2025. *Final Narasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025–2029*. Kementerian PUPR Republik Indonesia.

- Khoo, S. L., Lim, Y. M., dan Badarulzaman, N. 2024. *Reconceptualising creative hubs in Malaysia: Needs and voices from creative hub users*. *City, Culture and Society*, 37. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2024.100583>.
- Kurniawan, M.A., Idrus, I., Paddiyatu, N., Syahriyunita, A., Khilda, Nur, W.R., Fuadillah, S., & Arsitektur Kontemporer, C.H. (2023). Makassar Creative Hub dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer. *Journal of Muhammadiyah's Application Technology*.
- Labbe, D., Zuberec, C., & Turner, S. 2022. *Creative hubs in Hanoi, Vietnam: Transgressive spaces in a socialist state?* *Urban Studies*, 59(15), 3184–3200. <https://doi.org/10.1177/00420980221086371>.
- Landry, C. 2008. *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. Earthscan.
- Larasati, I. S., & Sulasmiyati, S. (2018). Pengaruh Inflasi, Ekspor, dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 3(1).
- Nugroho, M.G., & Heldiansyah, J.C. (2023). Creative Hub di Banjarbaru dengan Konsep Layering. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Lanting*.
- Pratt, A. C. 2021. *Creative hubs: A critical evaluation*. *City, Culture and Society*, 24. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2021.100384>.
- Rachfa, A. S., & Muchammad, B. N. (2022). Creative Space For People with Mental Disorder in Banjarbaru. *Lanting Journal of Architecture*, 11(2), 115-126.
- Thoring, K. (2019). *Designing Creative Space: A Systemic View on Workspace Design and its Impact on the Creative Process*
- UN-Habitat. 2020. *Cities and Culture: Harnessing Culture for Sustainable Urban Development*. United Nations Human Settlements Programme.

LAMPIRAN



Nomor : 000.9.2/96/BRIDA/X/2025

Makassar, 9 Oktober 2025

Perihal : Undangan

Yth. **Dr. Muh. Idris DP., M.Si dan Tim**

Di –
Makassar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Tim Peneliti untuk berkenan hadir dalam pelaksanaan kegiatan Proposal , yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 13 Oktober 2025
Waktu : 10.30 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah
(Lantai 6 Balaikota)
Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar
Agenda : Proposal Penelitian dan Pengembangan
Pekerjaan Umum “Sinkronisasi Kebijakan
Pembangunan *Creativ Hub* di Kota Makassar”

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu Tim Peneliti diucapkan terima kasih.

KEPALA BRIDA,



H. HADIL ADHA, S.Sos.,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19700216 199803 1 004



WALI KOTA MAKASSAR

Makassar, 8 November 2025

Nomor : 000.9.2/2/BRIDA/WALI KOTA/XI/2025
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : Undangan Focus Group Discussion (FGD)

Yth. Daftar Undangan Terlampir

di

Tempat

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar dalam memenuhi kebutuhan data penelitian “**Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan *Creative Hub* di Kota Makassar**” yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar bekerja sama dengan Politeknik STIA LAN Makassar, dengan ini mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa – Rabu / 11-12 November 2025 (Jadwal Terlampir)

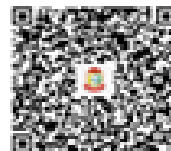
Waktu : 09.00 – Selesai (Detail Waktu Terlampir)

Tempat : Hotel Mercure

Jalan A.P. Pettarani No.4 Makassar

Demikian undangan dari kami, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Wali Kota Makassar



Munafri Arifuddin



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

Email: sekretariatbridamks@gmail.com Website: brida.makassarikota.go.id/



Nomor : 000.9.2/150/BRIDA/XI/2025

Makassar, 11 November 2025

Perihal : Undangan

Yth. Dr. Muh. Idris DP., M.Si dan Tim

Di –
Makassar

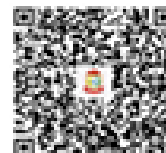
Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Tim Peneliti untuk berkenan hadir dalam pelaksanaan kegiatan Seminar Kemajuan, yang insaha Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 17 November 2025
Waktu : 13.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah
(BRIDA) Kota Makassar
Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar
Agenda : Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum " Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Creative Hub di Kota Makassar"

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu Tim Peneliti diucapkan terima kasih.

KEPALA BRIDA,



H. HAIDIL ADHA, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700216 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

Email: sekretariatbrida@smail.com Website: brida.makassarkota.go.id/



Nomor : 000.9.2/179/BRIDA/XII/2025

Makassar, 4 Desember 2025

Perihal : Undangan

Yth. Dr. Muh. Idris DP., M.Si dan Tim
Di –
Makassar

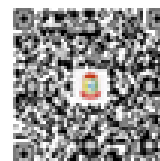
Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Tim Peneliti untuk berkenan hadir dalam pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Desember 2025
Waktu : 13.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah
(BRIDA) Kota Makassar
Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar
Agenda : Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan
Pekerjaan Umum " Sinkronisasi Kebijakan
Pembangunan *Creative Hub* di Kota Makassar"

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu Tim Peneliti diucapkan terima kasih.

KEPALA BRIDA,



H. HAIDIL ADHA, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700216 199803 1 004

Lampiran Dokumentasi Kegiatan :















